



Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat Daya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025 - 2029

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

BAPPERIDA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025–2029** dapat disusun sebagai pedoman strategis pembangunan lima tahunan yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah.

RPJMD ini disusun dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya secara berkelanjutan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta telah melalui proses penyelarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029, maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Dalam penyusunan dokumen ini, telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Melalui semangat **“Membangun Desa, Menata Kota”**, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan—dengan memperkuat fondasi desa sebagai pusat pertumbuhan dan menata kawasan perkotaan sebagai simpul pelayanan publik, ekonomi, dan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan. Tagline ini menjadi arah utama yang menjiwai seluruh strategi pembangunan daerah selama periode 2025–2029.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan RPJMD ini, termasuk jajaran perangkat daerah, DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan masukan yang konstruktif.

Akhir kata, semoga dokumen RPJMD ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya lima tahun ke depan, menuju daerah yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Tambolaka, Agustus 2025

Bupati Sumba Barat Daya



Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
dan
BUPATI SUMBA BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memasukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
17. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
20. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk :
 - a. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
 - b. menjadi acuan dalam penyusunan APBD, Renstra setiap PD dan sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2025-2029;
 - c. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - d. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati
 - e. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah daerah; dan
 - f. sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuan dari RPJMD terdiri dari:
 - a. menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan program pembangunan daerah yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. }

- b. menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah baik antar perangkat daerah, maupu antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan; dan
- f. mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal, 25 Agustus 2025

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

RAHARDU BONNU WULLA



Diundangkan di Tambolaka

pada tanggal, 25 Agustus 2025

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ETMUNDUS N. NAU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOREG 03/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknyanya Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2045 seperti yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya – upaya yang dijabarkan pada 7 (tujuh) misi, yaitu: 1) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; 2)

Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; 3) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 4) Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat; 5) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur; 6) Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan 7) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 juga membutuhkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dapat menjadi dasar dan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan, agar terjadi harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mendefinisikan KLHS adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah gerakan untuk memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan. TPB merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Sumba Barat Daya selama lima tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4.1 MAKSUD	7
1.4.2 TUJUAN	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	10
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	10
2.1.1 GEOGRAFI.....	10
2.1.1.1 LUAS WILAYAH ADMINISTRASI	11
2.1.1.2 TOPOGRAFI DARATAN.....	12
2.1.1.3 GEOLOGI.....	14
2.1.1.4 HIDROLOGI.....	16
2.1.1.5 KLIMATOLOGI.....	19
2.1.1.6 KEHUTANAN.....	21
2.1.1.7 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP.....	24
2.1.1.8 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN PANGAN.....	27
2.1.1.9 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	41
2.1.1.10 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	46

2.1.2	DEMOGRAFI.....	48
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	50
2.2.1	KESEJAHTERAAN EKONOMI	50
2.2.2	KESEHATAN UNTUK SEMUA.....	55
2.2.3	PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	57
2.2.4	BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	60
2.2.5	KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN MASYARAKAT INKLUSIF	61
2.2.6	PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF	62
2.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH	63
2.3.1	DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	63
2.3.2	IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	64
2.3.3	PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	71
2.3.4	TRANSFORMASI DIGITAL.....	72
2.3.5	INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	73
2.3.6	PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	74
2.3.7	STABILITAS EKONOMI MAKRO	78
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	80
2.4.1	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	80
2.4.2	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	82
2.4.3	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	83
2.4.4	KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH.....	83
2.5	POTENSI UNGGULAN DAERAH.....	88
2.6	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	102
2.6.1	GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR.....	103
2.6.2	PROYEKSI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN KE DEPAN	116
2.7	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	121
2.7.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	121

2.8	ISU STRATEGIS.....	140
2.8.1	ISU STRATEGIS GLOBAL.....	141
2.8.2	ISU STRATEGIS NASIONAL	142
2.8.3	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD TAHUN 2025 – 2029.....	150
2.8.4	ISU STRATEGIS REGIONAL PROV. NUSA TENGGARA TIMUR.....	151
2.8.5	ISU STRATEGIS DAERAH.....	154
BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	165
3.1	VISI.....	165
3.2	MISI	167
3.3	TUJUAN.....	170
3.4	SASARAN	171
3.5	KETERKAITAN VISI – MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 – 2029 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	180
3.6	STRATEGI.....	188
3.7	ARAH KEBIJAKAN.....	188
3.8	PROGRAM - PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	194
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	203
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	203
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	234
BAB V	PENUTUP.....	249
5.1	PEDOMAN TRANSISI	249
5.2	KAIDAH PELAKSANAAN	249

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1	LUAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	11
TABEL 2. 2	GAMBARAN TINGGI WILAYAH DIATAS PERMUKAAN LAUT (DPL) DAN JARAK KE IBU KOTA MENURUT KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.....	13
TABEL 2. 3	NAMA DAN PANJANG SUNGAI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA MENURUT KECAMATAN.....	16
TABEL 2. 4	JUMLAH MATA AIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	17
TABEL 2. 5	PENGAMATAN UNSUR IKLIM MENURUT BULAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, TAHUN 2024.....	19
TABEL 2. 6	LUAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	21
TABEL 2. 7	LUAS HUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA BERDASARKAN FUNGSI DAN STATUS.....	22
TABEL 2. 8	JENIS TUMBUHAN YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI TANAMAN OBAT DARI KAWASAN HUTAN LINDUNG ROKORAKA.....	23
TABEL 2. 9	JENIS TUMBUHAN PAKU YANG DITEMUKAN DI HUTAN WATUMBOLO, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	24
TABEL 2. 10	DISTRIBUSI LUAS BERDASARKAN KECAMATAN KAB. SUMBA BARAT DAYA.....	25
TABEL 2. 11	DISTRIBUSI LUAS BERDASARKAN KECAMATAN KAB. SUMBA BARAT DAYA.....	26
TABEL 2. 12	KOEFISIEN LIMPASAN TUTUPAN LAHAN DI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023.....	30
TABEL 2. 13	PROYEKSI DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025-2029.....	32
TABEL 2. 14	KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023.....	36
TABEL 2. 15	PROYEKSI KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029.....	38
TABEL 2. 16	LANJUTAN PROYEKSI KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029.....	39
TABEL 2. 17	LANJUTAN PROYEKSI KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029.....	40
TABEL 2. 18	PERKIRAAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER HARI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 DAN 2023.....	44
TABEL 2. 19	SITUS KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.....	61
TABEL 2. 20	PERSENTASE PMKS YANG MENERIMA BANTUAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024.....	63

TABEL 2. 21	DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA MENURUT LAPANGAN USAHA, 2020 S.D 2024.....	66
TABEL 2. 22	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020 - 2024 (MILIAR RUPIAH)	69
TABEL 2. 23	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020 - 2024 (MILIAR RUPIAH)	70
TABEL 2. 24	NILAI INVESTASI DAN JUMLAH PROYEK PENANAMAN MODAL ASING DAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2023	80
TABEL 2. 25	LUAS LAHAN SAWAH DAN JENIS PENGAIRAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024	90
TABEL 2. 26	LUAS PANEN, PROVITAS, DAN PRODUKSI PADI SAWAH, PADI LADANG, JAGUNG, DAN UBI KAYU TAHUN 2024.....	91
TABEL 2. 27	LUAS PANEN, PROVITAS, DAN PRODUKSI UBI JALAR, KACANG HIJAU, KACANG KEDELAI, KACANG TANAH TAHUN 2024	92
TABEL 2. 28	LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN (HA) DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023 - 2024	99
TABEL 2. 29	PRODUKSI PERKEBUNAN (TON) MENURUT TANAMAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023 - 2024	99
TABEL 2. 30	POPULASI TERNAK DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 S.D 2023	100
TABEL 2. 31	CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023	101
TABEL 2. 32	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 - 2024	104
TABEL 2. 33	RATA – RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 – 2024.....	106
TABEL 2. 34	RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 - 2024.....	111
TABEL 2. 35	PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 S.D 2030.....	118
TABEL 2. 36	PERSANDINGAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	161
TABEL 3. 1	PENJABARAN VISI.....	166
TABEL 3. 2	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	173
TABEL 3. 3	KESELARASAN MISI RPJPD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2045 DENGAN MISI RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029	180

TABEL 3. 4	KESELARASAN ANTARA MISI RPJMN (ASTA CITA) DENGAN RPJMD PROV. NTT, DAN RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	183
TABEL 3. 5	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	189
TABEL 3. 6	TEMA RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025 – 2030.....	194
TABEL 3. 7	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2030	195
TABEL 4. 1	INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2026 – 2030..	204
TABEL 4. 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2030..	235

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1	KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN LAINNYA.....	7
GAMBAR 2. 1	POSISI GEOSTRATEGIS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	10
GAMBAR 2. 2	PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	12
GAMBAR 2. 3	PETA KETINGGIAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	13
GAMBAR 2. 4	PETA GEOLOGI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	15
GAMBAR 2. 5	PETA BATAS DAS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	17
GAMBAR 2. 6	PETA KAWASAN HUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	22
GAMBAR 2. 7	PETA DAYA TAMPUNG JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH	25
GAMBAR 2. 8	RASIO ELEKTRIFIKASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024	27
GAMBAR 2. 9	SKOR POLA PANGAN HARAPAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024.....	28
GAMBAR 2. 10	PETA DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA AIR DAN BANJIR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	29
GAMBAR 2. 11	PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	33
GAMBAR 2. 12	INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 2018 - 2024	35
GAMBAR 2. 13	PETA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	35
GAMBAR 2. 14	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2020 S.D 2024	41
GAMBAR 2. 15	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK TAHUN 2020 - 2024	42
GAMBAR 2. 16	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2021 - 2024	43
GAMBAR 2. 17	KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	45
GAMBAR 2. 18	PETA DAYA TAMPUNG JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA.....	47

GAMBAR 2. 19	INDEKS RESIKO BENCANA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2015 S.D 2024.....	48
GAMBAR 2. 20	JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PER KECAMATAN.....	49
GAMBAR 2. 21	PIRAMIDA PENDUDUK KAB. SUMBA BARAT DAYA.....	49
GAMBAR 2. 22	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 2020 – 2024.....	50
GAMBAR 2. 23	JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2023	51
GAMBAR 2. 24	NILAI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.....	51
GAMBAR 2. 25	PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 - 2024.....	52
GAMBAR 2. 26	IPM PROV. NUSA TENGGARA TIMUR DAN KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024.....	53
GAMBAR 2. 27	SEBARAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.....	54
GAMBAR 2. 28	TINGKAT SENSITIVITAS DAN RESILIENSI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024	55
GAMBAR 2. 29	USIA HARAPAN HIDUP IPM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024	56
GAMBAR 2. 30	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024	56
GAMBAR 2. 31	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024	57
GAMBAR 2. 32	KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024	58
GAMBAR 2. 33	RATA – RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024.....	59
GAMBAR 2. 34	ANGKA MELEK HURUF KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024.....	60
GAMBAR 2. 35	INDEKS KETIMPANGAN GENDER KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024.....	62
GAMBAR 2. 36	ANGKA KETERGANTUNGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2022	64
GAMBAR 2. 37	INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024 ...	64
GAMBAR 2. 38	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2023.....	65

GAMBAR 2. 39	PERKEMBANGAN PDRB ADHB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024.....	71
GAMBAR 2. 40	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 – 2024.....	72
GAMBAR 2. 41	INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 - 2024	73
GAMBAR 2. 42	PDRB ADHB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 – 2024.....	74
GAMBAR 2. 43	DATA SEKOLAH TK PAUD, SD, SMP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024.....	75
GAMBAR 2. 44	DATA JALAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2023	76
GAMBAR 2. 45	DATA FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 S.D 2023 DAN DATA TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023	77
GAMBAR 2. 46	DATA CAKUPAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI.....	77
GAMBAR 2. 47	TAX RATIO TERHADAP PDRB DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024.....	78
GAMBAR 2. 48	INDEKS SPBE KAB. SUMBA BARAT DAYA DAN PROV. NTT TAHUN 2018 S.D 2024	80
GAMBAR 2. 49	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024.....	81
GAMBAR 2. 50	INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 - 2023	82
GAMBAR 2. 51	RISIKO PENDUDUK TERJADI TINDAK PIDANA PER 100.000 TAHUN 2022 - 2024	82
GAMBAR 2. 52	INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 - 2024.....	83
GAMBAR 2. 53	JUMLAH TAMU ASING DAN DOMESTIK YANG MENGINAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 - 2024.....	89
GAMBAR 2. 54	TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY INDEX 2010 – 2019 (2010 = 1,0)	145
GAMBAR 2. 55	KONTRIBUSI MANUFAKTUR TERHADAP PDB (%PDB).....	146
GAMBAR 2. 56	PRODUKTIVITAS PERTANIAN (JUTA RUPIAH/PEKERJA	147
GAMBAR 2. 57	KONDISI HYPER REGULASI.....	150



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknnya **Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST** dan **Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP** pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2045 seperti yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025–2045. Visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya – upaya yang dijabarkan pada 7 (tujuh) misi, yaitu: 1) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; 2) Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; 3) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 4) Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat; 5) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur; 6) Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan 7) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Sumba Barat Daya selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda; dan
11. Penetapan Ranperda.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus memperhatikan pendekatan – pendekatan baik mengacu pada pasal 7 dan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan yang bersifat :

- a. **Teknokratik**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- b. **Partisipatif**, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. **Politis**, merumuskan dan menetapkan visi dan misi jangka panjang Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh setiap kepala daerah terpilih.
- d. **Atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah-atas (*Bottom-Up*)**, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat:

- a. **Holistik-tematik**, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. **Integratif**, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. **Spasial**, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kemudian, penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 memperhatikan:

- 1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJMN Tahun 2025-2029, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
- 2. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029.
- 3. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagai pedoman terutama pada arah kebijakan dan sasaran pokok di tahap 1 (satu) RPJPD Tahun 2025-2045.
- 4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 dan evaluasi RPD 2025-2026.
- 5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu – isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029.
- 6. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040 Tahun 2023-2043.

7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk percepatan pembangunan Pulau Sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana Induk lainnya.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 juga membutuhkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dapat menjadi dasar dan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan, agar terjadi harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mendefinisikan KLHS adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah gerakan untuk memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan. TPB merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang di Tetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
21. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 Nomor 002 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 002).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

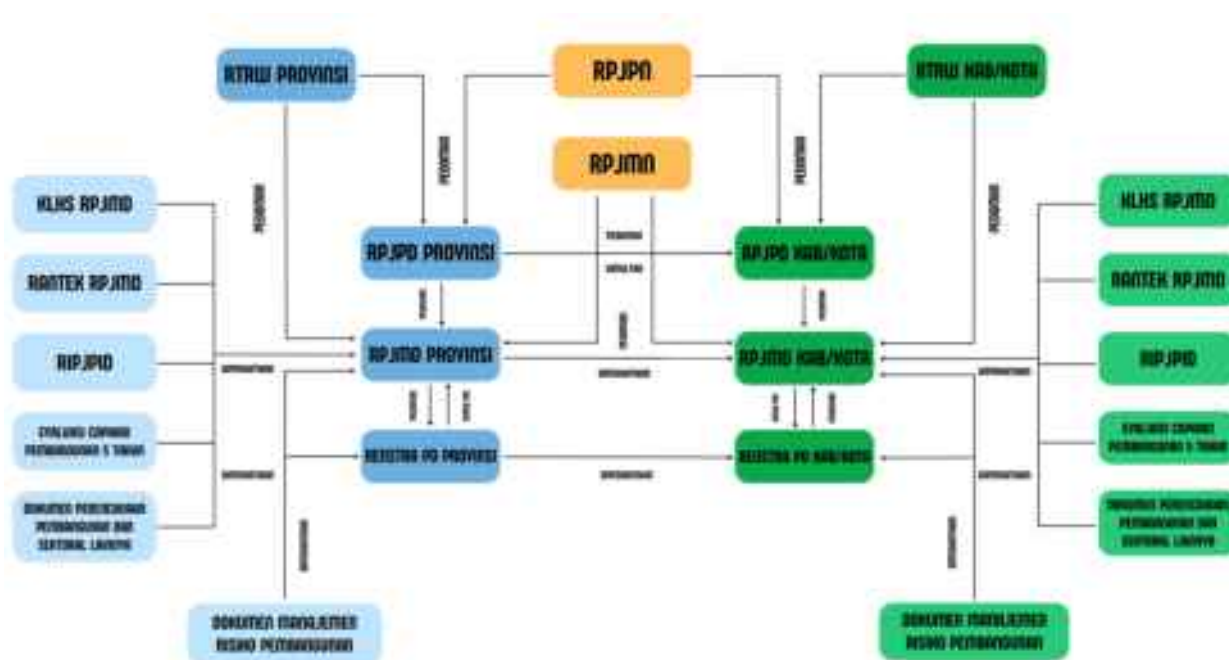
Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi

dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan :

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

GAMBAR 1. 1 KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN LAINNYA



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 MAKSUD

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberi arah pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mempedomani arah pembangunan jangka menengah Nasional;

2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka menengah yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Secara politik menjadi acuan bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menjalankan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.4.2 TUJUAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029;
2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah;
3. Menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029;
4. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun;
5. Sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan target dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
6. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya selama kurun waktu tahun 2025-2029;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Pusat;
8. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah yang dirumuskan beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan berdasarkan bidang urusan serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

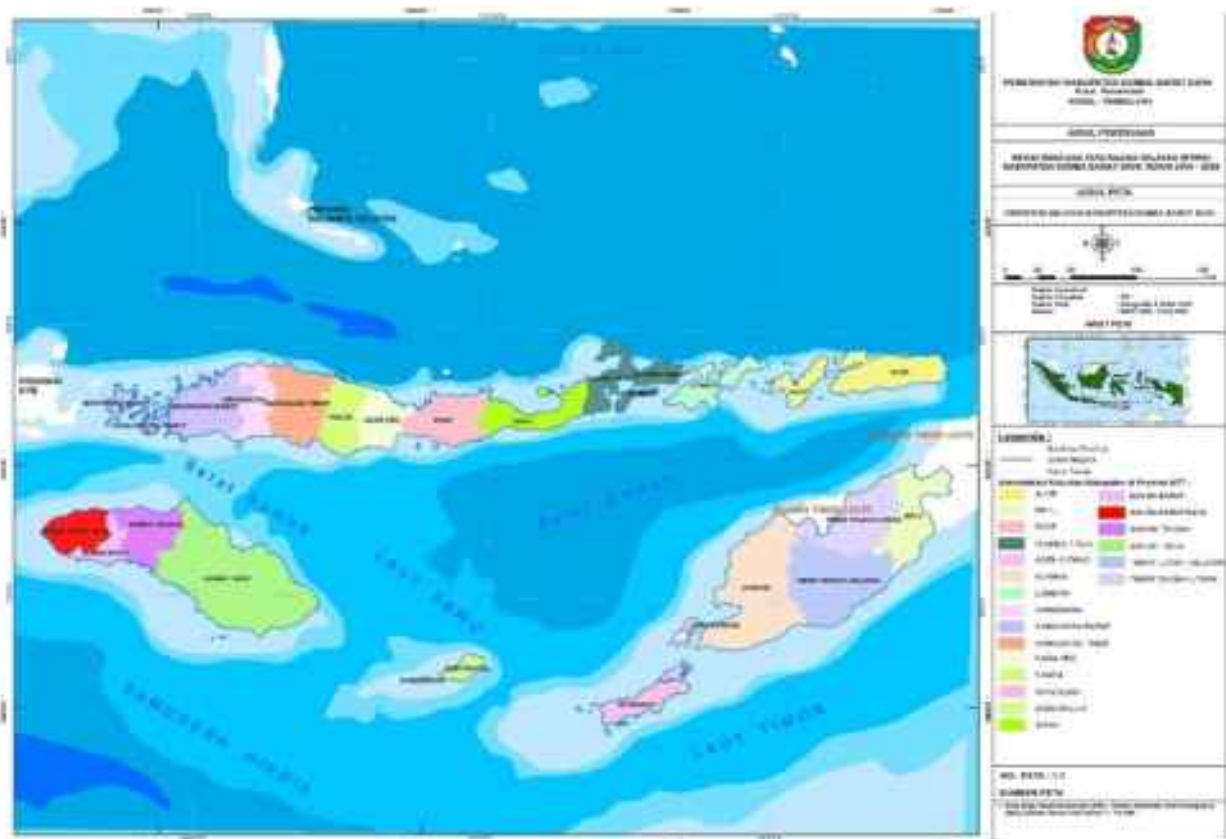
2.1.1 GEOGRAFI

Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di bagian ujung barat Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara astronomis terletak antara koordinat 9°,18'-10°, 20' LS (Lintang Selatan) dan 118°,55'-120°,23' BT (Bujur Timur). Secara geografis tepat berada diantara 9018'01" Lintang Selatan dan 1800 55'-1200 23 Bujur Timur. Secara geografis dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, letak kedudukan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Batas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya meliputi:

Sebelah Utara	: Selat Sumba
Sebelah Selatan	: Kabupaten Sumba Barat dan Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Kabupaten Sumba Barat
Sebelah Barat	: Samudera Hindia

GAMBAR 2. 1 POSISI GEOSTRATEGIS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



2.1.1.1 LUAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.382,84 km² yang secara administratif terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, yang di dalamnya terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) desa dan 2 (dua) kelurahan. Kesebelas kecamatan tersebut meliputi wilayah pesisir maupun dataran tinggi dengan karakteristik yang berbeda – beda. Kecamatan Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi, dan Kodi Utara merupakan wilayah yang berada di bagian barat daya dengan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut dan memiliki potensi sumber daya pesisir. Sementara itu, kecamatan Wewewa Utara, Wewewa Selatan, Wewewa Timur, Wewewa Barat, dan Wewewa Tengah mencakup wilayah pedalaman yang didominasi dengan topografi perbukitan. Sedangkan Kecamatan Loura serta Kota Tambolaka merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan, di mana Kota Tambolaka telah ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Sumba Barat Daya dan sekaligus sebagai pusat pelayanan publik. Rincian luas wilayah disetiap masing – masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini.

TABEL 2. 1 LUAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah		Luas Total Area (km ²)	Persentase Luas (%)
			Kelurahan	Desa		
1	Kodi	Bondo Kodi	-	19	74,956	5,42
2	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	-	14	58,124	4,21
3	Kodi Bangedo	Walla Ndimu	-	15	142,600	10,32
4	Kodi Utara	Kori	-	21	220,320	15,94
5	Kota Tambolaka	Tambolaka	2	8	102,424	7,41
6	Loura	Karuni	-	11	158,795	11,49
7	Wewewa Barat	Waimangura	-	20	156,439	11,32
8	Wewewa Selatan	Tena Teke	-	14	187,227	13,55
9	Wewewa Tengah	Ndapa Taka	-	20	133,158	9,64
10	Wewewa Timur	Elopada	-	19	43,374	3,14
11	Wewewa Utara	Palla	-	12	104,528	7,56
Jumlah			2	173	1.381,945	100

Sumber: Badan Informasi Geospasial Tahun 2024

Kecamatan Kodi Utara memiliki luas wilayah paling besar yakni 220,320 km² atau 15,94% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Wewewa Utara dengan luas wilayah 43,374 km² atau 3,14% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Peta administrasi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

GAMBAR 2. 2 PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



2.1.1.2 TOPOGRAFI DARATAN

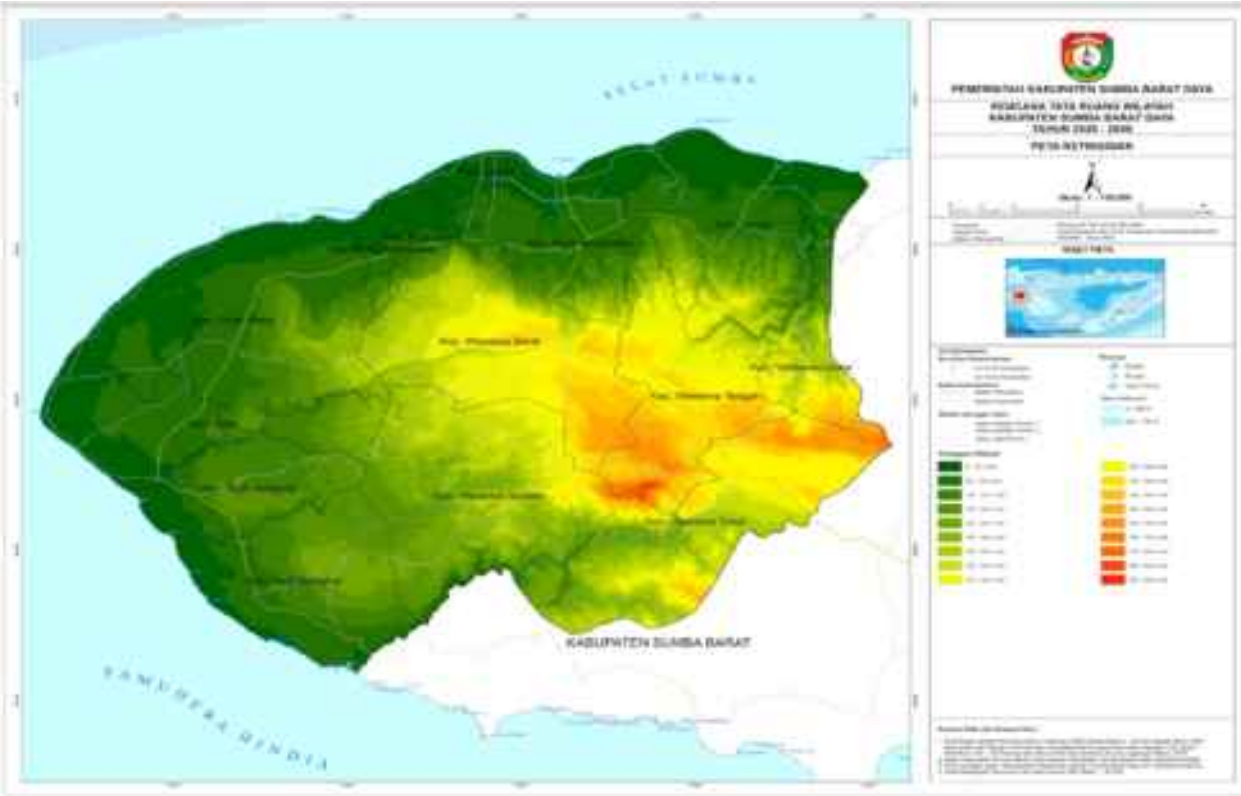
Meizer dan Pfeiffer (1964) membagi dataran Sumba dalam 7 (Tujuh) jenis topografi, karena pembagiannya sangat sulit diamati maka untuk mempermudah pengamatan pembagian wilayah topografi dibuat dalam 5 (Lima) kelompok sebagai berikut:

- (1) Wilayah gunung ditandai dengan kemiringan yang tinggi, wilayah ini meliputi Gunung Tanadaro
- (2) Wilayah perbukitan ditandai dengan kemiringan yang lebih rendah dari wilayah gunung
- (3) Wilayah undukan dekat laut ditandai undukan dan jurang yang curam sepanjang pantai selatan
- (4) Wilayah datar yang cukup luas dan dikelilingi bukit seperti dataran Anakalang
- (5) Wilayah dataran aluvial ditandai oleh dataran yang agak sempit sekitar sungai

Ketinggian wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berkisar antara 0 - 850 meter di atas permukaan laut. Luasan wilayah dengan ketinggian 0 - 300 meter sebesar 842,66 km² atau 58,30%, yang tersebar pada Kecamatan Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Kodi, Kodi Utara, Loura dan Kota Tambolaka serta sebagian Kecamatan Wewewa Utara, sedangkan luasan wilayah dengan ketinggian 300 - 850 meter sebesar 602,66 km² atau 41,70%, yang tersebar pada Kecamatan Wewewa Selatan, Wewewa Barat, Wewewa Timur dan Wewewa Tengah serta sebagian Kecamatan

Wewewa Utara. Gambaran tinggi wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) menurut kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya diuraikan pada Gambar dan Tabel - tabel di bawah ini :

GAMBAR 2. 3 PETA KETINGGIAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



TABEL 2. 2 GAMBARAN TINGGI WILAYAH DIATAS PERMUKAAN LAUT (DPL) DAN JARAK KE IBU KOTA MENURUT KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)	Jarak Ke Ibu Kota (km)
1	Kodi	0 - 300	32,1
2	Kodi Balaghar	0 - 300	50,2
3	Kodi Bangedo	0 - 300	40,8
4	Kodi Utara	0 - 300	28,0
5	Kota Tambolaka	0 - 300	-
6	Loura	0 - 300	14,1
7	Wewewa Barat	300 - 750	13,9
8	Wewewa Selatan	300 - 500	30,9
9	Wewewa Tengah	300 - 850	20,1
10	Wewewa Timur	300 - 850	31,6
11	Wewewa Utara	100 - 600	37,7

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2025

2.1.1.3 GEOLOGI

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau yang terletak di wilayah Timur Indonesia. Pulau Sumba memiliki posisi yang khas terkait dengan busur Sunda - Banda yang merepresentasikan sebuah potongan dari kerak benua terhadap busur kepulauan vulkanik aktif (Sumbawa, Flores) dalam cekungan muka busur, terletak di bagian utara pada transisi antara Palung Jawa (bidang subduksi) dengan Timor Trough (bidang kolisi). Pulau Sumba merupakan progadasi batuan sedimen klastika laut dalam yang mengandung karbonat dari busur gunung api yang diduga berada di Selatan Pulau Sumba. Pulau Sumba tersusun dari sedimen tidak termetamorfosis hingga sedikit termetamorfosis berumur Mesozoikum, secara tidak selaras dilapisi oleh endapan berumur tersier dan kuartar yang sedikit sekali terdeformasi; ketebalan total mencapai lebih dari 1000 m (van Bemmelen, 1949). Teras-teras terumbu karang yang menutupi tepi bagian yang mengarah ke laut dari Formasi Sumba berumur Neogen, hampir secara kontinu tersingkap ke permukaan di sepanjang pantai barat, pantai utara dan pantai timur Sumba (Hamilton, 1979).

Pulau Sumba berbentuk agak lonjong dengan sumbu panjangnya sebagian berarah barat, timur dan kemudian membelok ke arah barat laut-tenggara. Sungai di wilayah ini umumnya memiliki pola mendaun (dendritik) dan hanya berair pada waktu tertentu. Sungai yang mengalir di Pulau Sumba seluruhnya bermuara langsung ke laut, yang mengalir ke timur bermuara ke Laut Sawu dan yang mengalir ke selatan dan barat bermuara ke Samudera Hindia. Lembah di daerah ini menunjukkan tingkat morfologi menjelang dewasa.

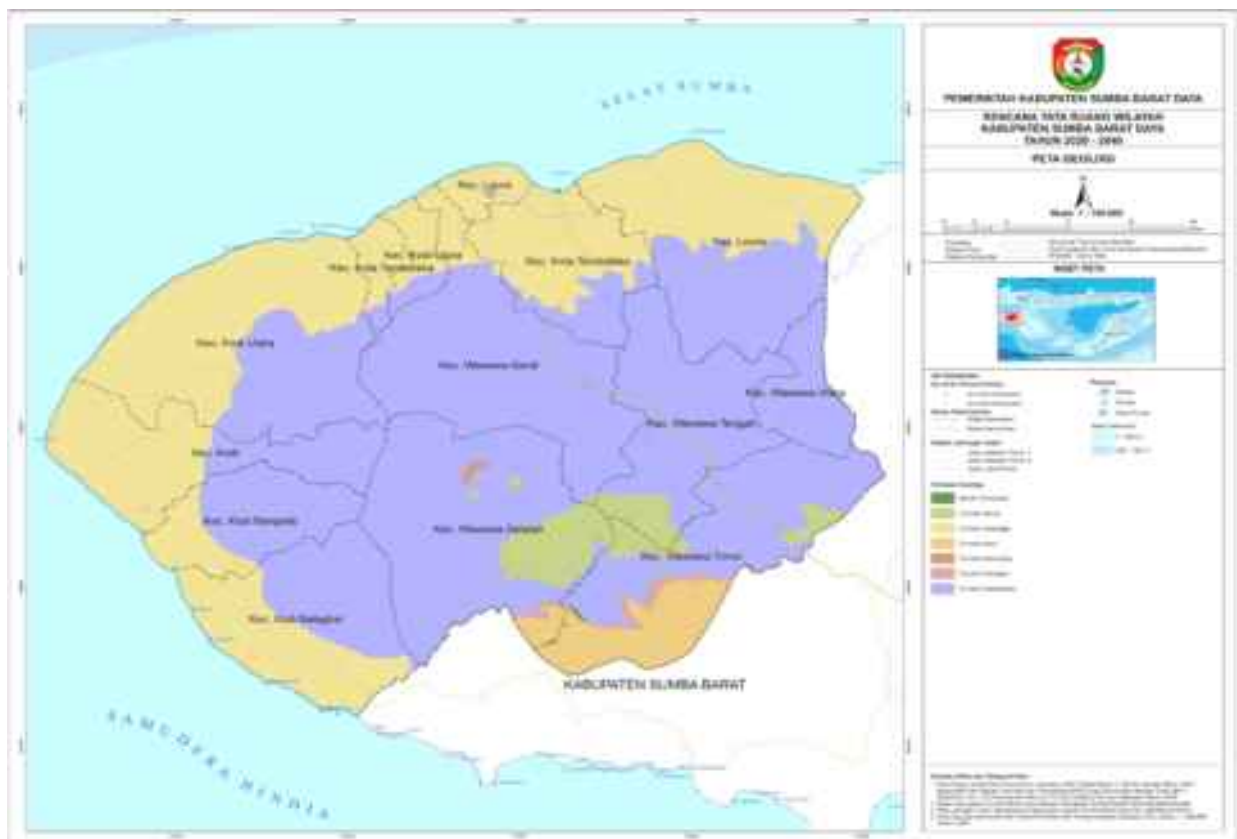
Menurut Van Bemmelen (1949), morfologi di daerah Sumba terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pesisir Berundak, dicirikan oleh sejumlah undak dengan beda ketinggian antar undak berkisar antara 1 - 6 m dan jumlahnya dapat mencapai 10 - 14 undak, sebaran ke arah darat antara 25 - 30 km. Batuan penyusun yang membentuk morfologi ini adalah batu gamping koral. Penyebaran daerah pesisir membentang mulai dari bagian barat daya yaitu daerah Loka Polapare hingga ke bagian barat di daerah Waitabula dan terus bersambung sepanjang pesisir utara hingga daerah Boing di bagian tenggara pulau;
- 2) Daerah Perbukitan, dicirikan oleh sebaran bukit - bukit yang bentuknya bergelombang dengan ketinggian yang nampak sama, kemiringan lereng landai, lembah - lembahnya tidak dalam, dan sungai yang mengalir membentuk pola mendaun. Batuan penyusun morfologi ini terdiri dari perselingan napal, napal pasiran, napal tufan, dan batu pasir tufan. Sebarannya di sekitar Danau Rinding sampai ke daerah Waingapu;
- 3) Daerah Karst, ketinggian antara 450 - 750 mdpl, di beberapa tempat dijumpai adanya sungai bawah tanah, dolina, dan gua - gua. Sungai yang mengalir membentuk pola hampir sejajar dengan struktur geologi yang ada. Batuan pembentuknya adalah batu gamping dari Formasi Waikabubak. Morfologi ini tersebar di bagian tengah barat pulau sekitar daerah Lewa, Anakalang dan Waikabubak.

Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 140 – 400. Topografi yang berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Kabupaten Sumba Barat Daya sering disebut sebagai sebuah kawasan karst yang terdiri batuan gamping dengan sangat gersang.

Ciri-ciri daerah karst ini terdapat adanya bukit-bukit kecil, terdapat aliran sungai di bawah tanah, juga terdapat gua-gua di sekitarnya, serta terdapat banyak cekungan di sekitarnya. Kawasan yang tampak gersang dan tandus itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai daerah penyimpan air bersih. Air bersih inilah yang akan mencukupi kebutuhan manusia di daerah tersebut. Selain menyediakan air bersih, karst juga menjadi sumber bahan tambang, yaitu batuan gamping. Karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terbentuk dari batuan gamping koral yang relatif masih muda, hal ini terlihat dari kecenderungan tanah yang bervariasi yakni campuran antara batu gamping, batu gamping lempungan, sisipan nepal pasir dan nepal tufan sehingga karakteristik tanah tersebut cenderung asam, netral, dan basa. Sementara pada kawasan pantai didominasi oleh farmasi kaliangga yang terbentuk struktur lapisan batu gamping trumbu.

GAMBAR 2. 4 PETA GEOLOGI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



2.1.1.4 HIDROLOGI

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah (CAT), Pulau Sumba terdiri dari 2 (dua) CAT yaitu CAT Waikabubak dan CAT Ngalu. Potensi air tanah di Sumba bagian barat terdiri dari air tanah celah yang mendominasi bagian selatan, air tanah Karst yang berada di bagian tengah Sumba Barat (Formasi Waikabubak), dan air tanah bebas yang berada di bagian utara Sumba Barat. Air tanah yang dapat dimanfaatkan di Sumba Timur adalah di bagian utara, yaitu pada litologi batu gamping terumbu, namun sulit untuk mencari lokasi yang potensial karena adanya pengaruh tektonik dan saluran akibat pelarutan (solution channel) yang mengontrol penyebaran air tanah. Produktivitas akuifer di Pulau Sumba menurut Peta Hidrogeologi yang disusun oleh Meiser, dkk (1965) menunjukkan bahwa umumnya wilayah ini didominasi oleh akuifer berproduktivitas sangat rendah dengan debit sekitar 0.1 L/det. Di beberapa tempat yang terdapat sungai bawah tanah atau mata air Karst mempunyai debit sekitar 5 L/det. Berdasarkan hasil inventarisasi sumber daya air, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki sumber daya air permukaan yang sangat potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Terdapat sungai, waduk dan danau. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

a. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A Tahun 2006 dalam Dokumen Profil Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, diketahui Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 6 (enam) Wilayah Sungai (WS), dimana Kabupaten SBD masuk dalam WS Sumba memiliki 13 DAS (Gambar 3.7), yakni DAS Waikeroko Waikadoki, DAS Waitungga Kodi, Weekambang, Waikataku, Pandawa Waikelo, Tuba, Mangamba Katewel, Manangaoro, Bondo Kodi, Belagor, Karakat Letekombo, Lebukapuke Ngedo dan DAS Polapare. Secara khusus, DAS Polapare memiliki 6 (enam) aliran sungai yang masing-masing tersebar pada beberapa kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2. 3 NAMA DAN PANJANG SUNGAI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	Kodi Balaghar	Pola Pare Waiha	18 9
2	Loura	Loko Kalada	16
3	Wewewa Selatan	Wee Wagha Wee Lamboro	10 10
4	Wewewa Timur	Wee Kalowo	7

Sumber : Laporan Akhir Reviu RISPAM Kab. Sumba Barat Daya 2022

Karakteristik aliran sungai seperti debit dan durasi banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrometeorologi, tata guna lahan, kondisi geologi pada daerah aliran sungai (DAS), dan morfologi sungai. Berdasarkan peta dasar skala 1 : 25.000 beberapa daerah aliran sungai di Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan morfologi sungai secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

kelompok besar bentuk DAS (Gambar 2.4) yaitu: 1). Daerah aliran sungai bentuk bulu (pohon); 2) Daerah aliran sungai bentuk kipas; dan 3) Daerah aliran sungai bentuk sejajar.

GAMBAR 2. 5 PETA BATAS DAS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



b. Mata Air

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki cukup banyak mata air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah Kecamatan Wewewa Barat memiliki sumber mata air terbanyak yaitu mencapai 78 mata air, sedangkan Kecamatan Kota Tambolaka hanya memiliki 6 sumber mata air, Hampir sebagian besar elevasi sumber mata air berada jauh di bawah dan aliran mata air menyatu dengan aliran permukaan sungai. Kondisi daerah aliran sungai (DAS) dengan vegetasi yang baik dan masih berfungsi sebagai daerah resapan maka aliran yang terjadi adalah aliran kontinu pada sungai. Aliran mata air pada musim kemarau pada kondisi ini sebagai aliran dasar (*base flow*).

TABEL 2. 4 JUMLAH MATA AIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1.	Kodi Bangedo	25
2.	Kodi Balaghar	21
3.	Kodi	17
4.	Kodi Utara	27
5.	Wewewa Selatan	25
6.	Wewewa Barat	78
7.	Wewewa Timur	23
8.	Wewewa Tengah	9

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air
9.	Wewewa Utara	23
10.	Loura	26
11.	Kota Tambolaka	6

Sumber : KLHS RPJPD 2025 – 2045, 2024

c. Waduk

Waikelo Sawah terletak di Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibangun pada tahun 1976, Waikelo Sawah ini dirancang untuk tujuan irigasi dan pembangkit listrik. Pengadaan pembangkit listrik itupun menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pertama di Sumba ketika itu. Waikelo Sawah ini sekilas berbentuk mirip dengan gua alami selebar 4 m dengan ketinggian sekitar 3 m, yang dimulut guanya membentuk sebuah kolam dengan air yang sangat jernih. Selain itu, debit air yang mengalir dari bendungan Waikelo Sawah ini cukuplah deras yaitu diperkirakan mencapai 1000 liter/detiknya (berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya). Berlimpahnya aliran air di Waikelo Sawah ternyata sangat berguna bagi penduduk desa setempat. Aliran air dari Waikelo Sawah ini mampu mengairi persawahan untuk beberapa desa diantaranya Desa Tema Tana, Kalembo Ndara Mane, Mareda Kalada, Pada Eweta, Wee Rame, Dikira dan Desa Tanggaba. Apabila dicermati lagi, ternyata di dalam bendungan dan gua di Waikelo Sawah ini terdapat air terjun yang menjadi sumber aliran airnya. Aliran air terjun tersebut mengalir ke kolam di mulut gua, kemudian membendung dan pada akhirnya berguna untuk kebutuhan irigasi dan PLTA. Selain Waikelo Sawah juga terdapat Bendung DI Kodi yang dibangun untuk irigasi lahan pertanian di wilayah Kodi dan DI Mata Liku yang juga digunakan untuk irigasi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Loura.

Pembangunan Bendung DI Kodi merupakan respon pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen SDA Kementerian PUPR atas permintaan Pemerintah Daerah SBD saat itu untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian di daerah Kodi. Sebab 85% masyarakat di daerah Kodi menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan mengandalkan produksi padi dari hasil penggarapan lahan kering dan sawah tadah hujan. Sebenarnya bukan karena di Kodi tidak ada sumber – sumber air sama sekali namun berdasarkan pendataan sumber air yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2023 terdapat sumber – sumber air potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terdapat sumber air potensial di wilayah Kodi, yaitu Sungai Kodi. Sungai ini memiliki ketersediaan air yang cukup besar dan kebutuhan debit air untuk DI Kodi sebesar 3,44 M³/detik. Menurut masyarakat setempat, air di sungai tersebut tidak pernah kekeringan sepanjang tahun. Namun, air dari Sungai Kodi tersebut tidak bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan irigasi, karena kondisi topografis di wilayah itu berbukit-bukit. Dengan pembangunan Bendung DI Kodi diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan air dalam mengelola lahan tidur menjadi lahan pertanian yang beririgasi

d. Danau

Terdapat dua danau di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Danau Wee Wini di Desa Kalaki Kambe, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang airnya tawar dan digunakan masyarakat sekitar untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan Danau Weekuri di Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Danau Weekuri yang berwarna hijau kebiru-biruan ini merupakan danau yang sangatlah unik jika dibandingkan dengan danau-danau pada umumnya di Indonesia karena kandungan airnya yang asin dan payau. sebenarnya danau ini adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di kisaran danau. Air tersebut masuk dari celah-celah bebatuan yang berada di gugusan karang sekitaran danau. Selain sifat air payau yang dibawa dari laut, uniknya lagi di danau ini terdapat beberapa titik sumber mata air yang membuat gradasi warna air di danau ini bervariasi, yaitu ada yang berwarna biru cerah, biru sedikit kehijau-hijauan bahkan ada yang rasanya hangat dan ada yang dingin. Keunikannya sangat jarang ditemukan pada danau-danau lainnya di Indonesia. Danau Weekuri memiliki air yang sangatlah jernih dengan kedalaman air yang tak cukup dalam, sehingga sangat cocok digunakan oleh pengunjung untuk sekedar bermain air dan berenang. Tersembunyi di balik pepohonan rimbun dan semak belukar serta jauh dari keramaian kota, suasana di sekitar danau terasa masih sangat asri. Gambaran geologi Kabupaten Sumba Barat Daya di sajikan pada gambar di bawah ini

2.1.1.5 KLIMATOLOGI

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, pada tahun 2024 temperatur udara terendah adalah 16,2° C yang terjadi pada bulan agustus sedangkan temperature tertinggi adalah 36,8°C yang terjadi pada bulan Februari, Curah hujan tertinggi yang terjadi pada tahun 2024 adalah 349,8 mm pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 22 hari. data pengamatan unsur iklim di Kabupaten Sumba Barat Ddemografiaya di sajikan pada tabel 2.5

TABEL 2. 5 PENGAMATAN UNSUR IKLIM MENURUT BULAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, TAHUN 2024

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,0	28,7	34,6	46	79	98
Februari	23,6	27,9	36,8	61	84	98
Maret	28,8	27,7	33,2	57	85	98
April	22,8	27,3	33,8	53	85	98
Mei	20,0	26,3	33,0	45	82	96
Juni	18,0	25,5	33,8	38	80	96
Juli	15,4	34,8	32,4	34	77	96
Agustus	16,2	24,9	33,8	36	77	96

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
September	19,0	26,7	34,8	41	75	93
Oktober	20,0	28,4	35,8	39	72	97
November	25,0	29,0	34,4	45	73	94
Desember	23,4	27,7	34,0	56	84	99

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mbar)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	5	8	16	1.005,9	1.008,8	1.012,4
Februari	4	7	15	1.008,0	1.010,2	1.011,6
Maret	4	6	19	1.006,0	1.009,3	1.012,2
April	4	6	16	1.007,0	1.009,0	1.011,0
Mei	5	7	17	1.008,9	1.010,5	1.014,8
Juni	5	6	16	1.010,7	1.012,3	1.014,8
Juli	4	7	20	1.010,6	1.012,3	1.014,3
Agustus	5	7	18	1.011,4	1.012,7	1.013,2
September	5	7	20	1.008,8	1.011,3	1.013,1
Oktober	6	8	17	1.009,7	1.011,1	1.013,1
November	5	7	16	1.006,7	1.009,0	1.011,6
Desember	4	6	15	1.004,5	1.007,3	1.010,1

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	195,3	12	82
Februari	349,8	22	80
Maret	334,1	20	72
April	126,1	16	81
Mei	31,8	4	96
Juni	19,0	16	94
Juli	4,0	5	94
Agustus	TTU	2	98
September	1,0	3	96
Oktober	37,69	5	95
November	23,0	8	89
Desember	22,3	26	65

Catatan : *TTU / Tidak Terukur

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2024

2.1.1.6 KEHUTANAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki kawasan hutan seluas 19.543.947 Ha yang dibagi dua berdasarkan fungsinya, yaitu kawasan hutan lindung seluas 11.046.845 Ha dan kawasan hutan produksi seluas 8.497.102 Ha.

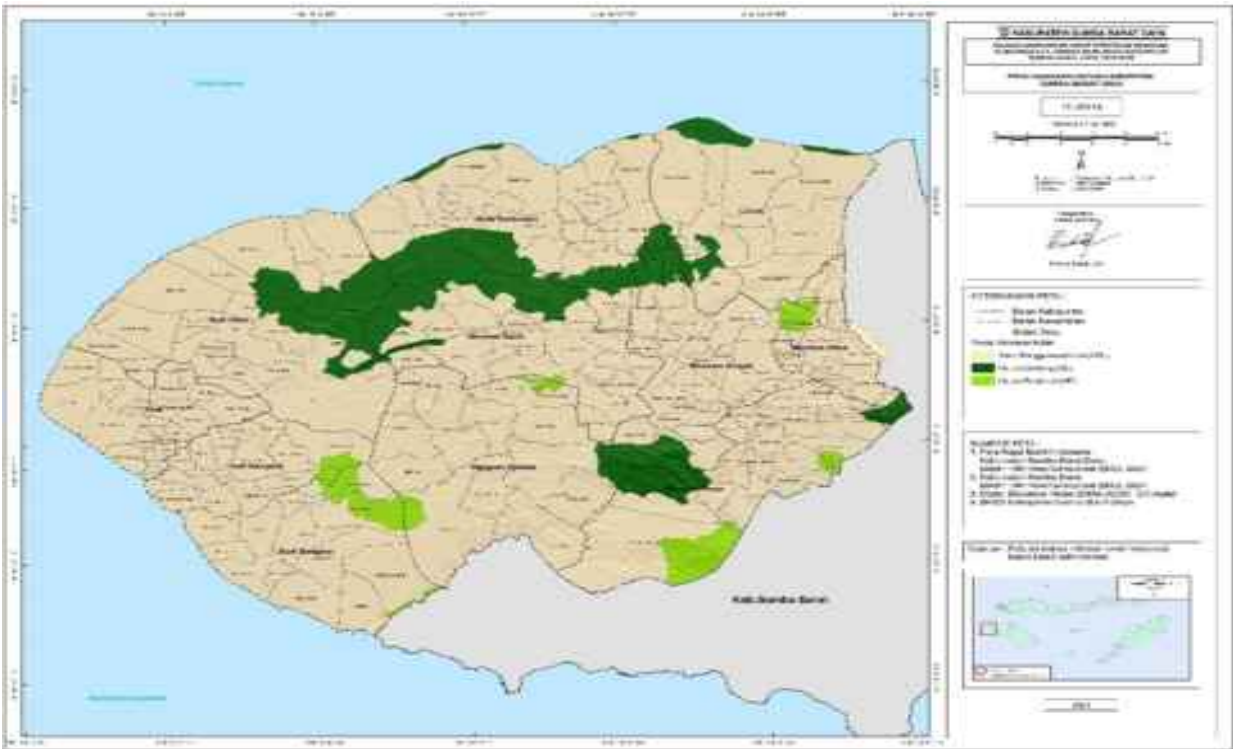
TABEL 2. 6 LUAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No	Nama Kawasan Hutan	Fungsi/RTK	Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsi		Total Luas Kawasan Hutan (Ha)
			HL (Ha)	HP (Ha)	
1	Bakau A (Kalaki Kambe)	HL	150.016		150.016
2	Bakau B (Oro)	HL	23.363		23.363
3	Bakau C (Mananga Aba)	HL	573.914		573.914
4	Bakau D (Kaghona)	HL	120.352		120.352
5	Porunombu	HL/4	371.652		371.652
6	Rokoraka – Matalombu	HL/HP/45	7.427.107	4.375.967	11.803.074
7	Yawila	HL/2	2.380.441		2.380.441
8	Cambaka	HP/64		216.106	216.106
9	Lamboya	HP		1.389.005	1.389.005
10	Malimada	HP/66		462.170	462.170
11	Matakapore	HP/63		1.718.208	1.718.208
12	Plapare Cako	HP/27		114.190	114.190
13	Watumbolo	HP/65		221.456	221.456
Jumlah			11.046.845	8.497.102	19.543.947

Sumber : UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2023

Berdasarkan data tersebut diatas maka didapat rasio hutan lindung seluas 0,56 Ha dari total luas kawasan hutan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada tahun 2022 UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan rehabilitasi Kawasan hutan yang rusak seluas 400 Ha atau 2,046% dari total luas kawasan hutan dengan lokasi tersebar.

GAMBAR 2. 6 PETA KAWASAN HUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



TABEL 2. 7 LUAS HUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA BERDASARKAN FUNGSI DAN STATUS

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	8.787,06
2.	Hutan Lindung	11.413,92
3.	Taman Nasional	-
4.	Taman Wisata Alam	-
5.	Taman Baru	-
6.	Cagar Alam	-
7.	Suaka Margasatwa	-
8.	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	19.543,947
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3.	Hutan Kota	-
4.	Taman Hutan Raya	-
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Nusa Tenggara Timur, 2024 (diolah)

Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda karena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komunitas. Dengan kata lain, keragaman sepsies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem. Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 menyajikan keragaman jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai Tanaman Obat dari Kawasan Hutan Lindung Rokoraka dan jenis tumbuhan paku yang ditemukan di Hutan Watumbolo.

TABEL 2. 8 JENIS TUMBUHAN YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI TANAMAN OBAT DARI KAWASAN HUTAN LINDUNG ROKORAKA

No	Nama	Nama Jenis	Bagian yang diambil	Cara pengambilan	Manfaat Obat
1	Alang-alang	<i>Imperata cylindrical</i> L.	Akar	Dicabut dan diambil akarnya	Obat kencing dara, mengatasi sakit ginjal, mimisan dan panas dalam
2	Asam jawa	<i>Tamarindus indica</i>	Kulit batang	Dikupas bagian kulit batang	Sebagai obat sariawan dan sesak nafas
3	Alpukat	<i>Persea Americana</i>	Daun	Diambil bagian daun	Penambah darah
4	Jambu Biji	<i>Psidium guajava</i> L.	Daun	Langsung diambil bagian pucuk	Obat sakit perut
6	Johar	<i>Senna siamea</i>	Kulit	Dikupas bagian kulit batang	mengobati cacingan
7	Jarak	<i>Ricinus communi</i> L.	Daun dan Getah	Diambil bagian daun dan getah	Sebagai obat batuk, sariawan, dan obat sakit gigi
8	Kerinyu	<i>Chromolaena odorata</i> L.	Daun	Diambil bagian biji yang sudah tua	Obat Malaria, Sebagai pelancar peredaran darah dan sebagai antibiotic bagi luka
9	Kesambi	<i>Schleichera oleosa</i>	Kulit batang	Dikupas bagian kulit batang	Sebagai obat Menceret
10	Lamtoro	<i>Leucaena leucocephala</i>	Daun	Langsung diambil bagian daun	Penambah nafsu makan
11	Landep	<i>Barleria prionitis</i> L.	Akar	Dicabut dan diambil akarnya	Sebagai pembersih gigi
12	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	Biji dan kulit	Diambil bagian biji dan dikupas bagian kulit	Sebagai obat malaria
13	Nitas	<i>Sterculia foetida</i>	Kulit	Diambil bagian kulitnya	Mengobati luka-luka dalam
14	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Daun dan buah	Bagian buah dan diambil bagian daun	Obat pusing dan mengurangi darah putih
15	Papaya	<i>Carica papaya</i>	Daun	Langsung diambil bagian daun yang tua	Obat malaria, penurun demam
16	Sirih	<i>Piper bettle</i> L.	Daun dan buah	Dipetik buah dan daun	Mengurangi keputihan, menguatkan gigi
17	Sembung legi	<i>Blumea balsamifera</i>	Daun	Diambil bagian daun	Membantu proses persalinan dan sebagai obat menceret
18	Tempuk wiyang	<i>Emilia sonchifolia</i>	Daun	Diambil bagian daun	Membersihkan darah kotor

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 – 2025, 2024

TABEL 2. 9 JENIS TUMBUHAN PAKU YANG DITEMUKAN DI HUTAN WATUMBOLO, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kelas	Famili	Jenis	Habitat
Pteridopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium nidus</i>	E
	Gleicheniaceae	<i>Gleichenia linearis</i>	T
	Blechnaceae	<i>Blechnum orientale</i>	T
	Davalliaceae	<i>Davallia denticulate</i>	E/T
	Dryopteridaceae	<i>Nephrolepis biserrata</i>	T
	Polypodiaceae	<i>Drynaria quercifolia</i>	E
	Polypodiaceae	<i>Drymoglossum piloselloides</i>	E
	Polypodiaceae	<i>Drynaria parishii</i>	E/T
	Polypodiaceae	<i>Nephrolepis hirsutula</i>	T
	Marattiaceae	<i>Angiopteris evecta</i>	T
	Thelypteridaceae	<i>Cyclosorus interruptus</i>	T
	Thelypteridaceae	<i>Christella subpubescens</i>	T
	Lygodiaceae	<i>Lygodium microphyllum</i>	E
	Lygodiaceae	<i>Lygodium palmatum</i>	T
	Schizaeaceae	<i>Schizaea digitata</i>	T
Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Schizaea digitata</i>	T
	Lycopodiaceae	<i>Lycopodium cernuum</i>	T
Psilotopsida	Psilotaceae	<i>Psilotum nudum</i>	T

Keterangan: E = Epifit dan T = Terrestrial

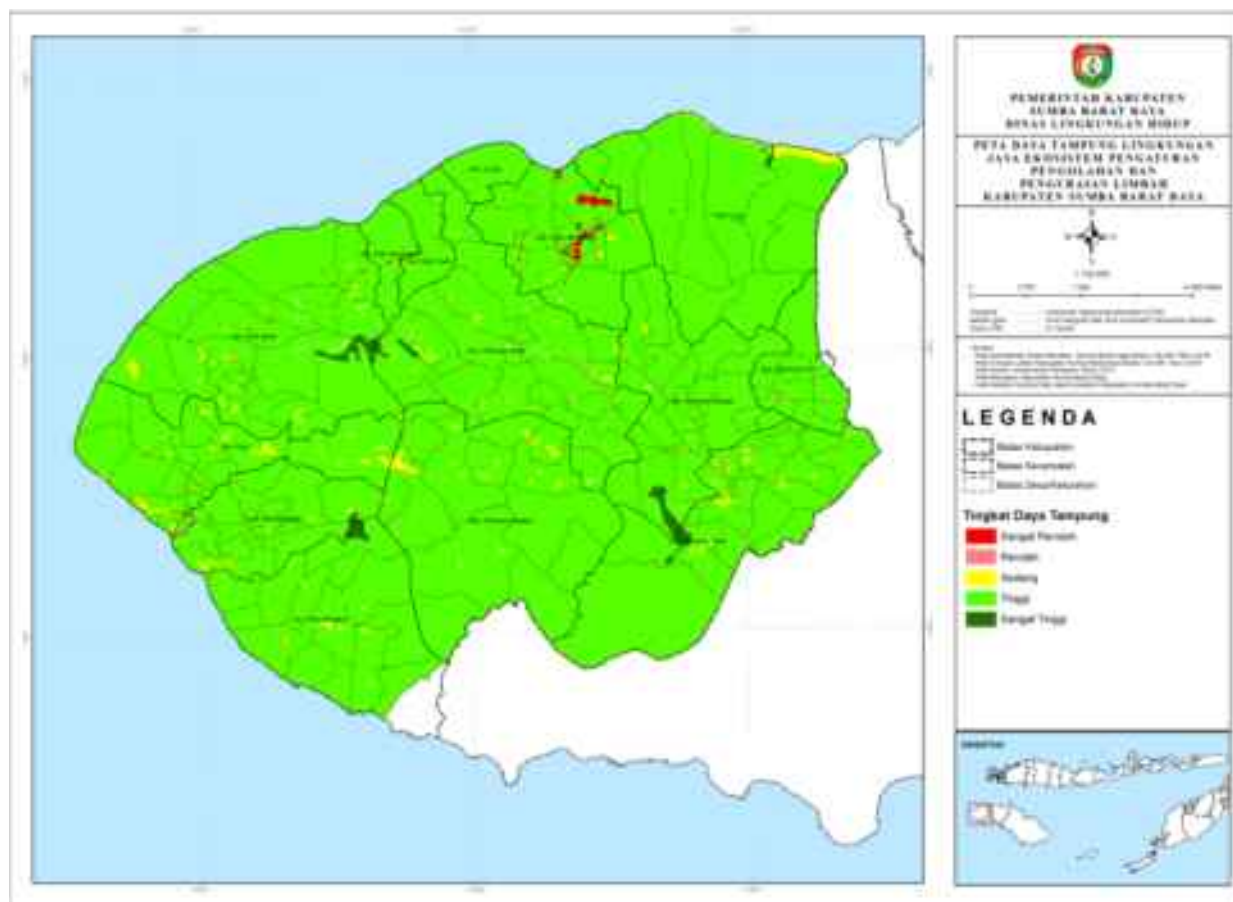
Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 – 2025, 2024.

Jenis burung kharismatik dan Endemik sebagai penjaga hutan Sumba antara lain: Julang sumba (*Rhyticeros everetti*) yang hanya terdapat di Pulau Sumba (International Union for Conservation of Nature [IUCN]).

2.1.1.7 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah lebih banyak mengacu pada konsep daya tampung lingkungan. Jasa pengolahan dan penguraian limbah adalah kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah, Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah antara lain adalah bakteri, jamur, protozoa dan ganggang, Distribusi jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah ditunjukkan pada Gambar berikut.

GAMBAR 2. 7 PETA DAYA TAMPUNG JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH



Jasa ekosistem pengaturan untuk pengolahan dan penguraian limbah sangat bergantung pada kapasitas atau kemampuan lingkungan dalam melakukan asimilasi atau pemulihan diri (*self purification*) terhadap beban pencemaran yang masuk atau dimasukkan ke dalam tiga medium lingkungan, yaitu air, udara, dan tanah. Semakin sehat suatu ekosistem maka semakin besar pula jasa ekosistem tersebut untuk pengaturan dan penguraian limbah. Dalam analisis, kemampuan ekosistem dalam menetralsir, mengurai dan penyerap limbah dikategorikan ke dalam lima kelas jasa ekosistem kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi seperti dalam tabel berikut:

TABEL 2. 10 DISTRIBUSI LUAS BERDASARKAN KECAMATAN KAB. SUMBA BARAT DAYA

Ekoregion	Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah									
	Kelas									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Organik (Koral)	507,76	0,34	26,28	0,02	1.097,66	0,74	53.333,80	35,94	38,89	0,03
Pegunungan Struktural	0	0	48,63	0,03	43,64	0,03	31.277,79	21,08	0	0

Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah										
Ekoregion	Kelas									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Perbukitan Karst	0	0	176,92	0,12	1.076,07	0,73	59.183,27	39,88	958,81	0,65
Perbukitan Struktural	0	0	0	0	0	0	634,44	0,43	0	0
Total	507,76	0,34	251,8282	0,17	2.217,37	1,49	144.429,20	97,32	997,67	0,67

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029

Secara umum, ekosistem di Kabupaten Sumba Barat Daya mampu memberikan jasa pengaturan pengolahan limbah dan penguraian limbah. Peran ekoregion terhadap jasa ekosistem pengaturan tersebut dominannya adalah berkategori tinggi. Ekoregion yang memiliki peran penting terhadap jasa pengaturan pengolahan limbah dan penguraian limbah berkategori tinggi dan sangat tinggi adalah adalah Perbukitan Karst dan Dataran Organik, dengan total uasan masing-masing sekitar 60.142 Ha atau 40,53 persen dan 53.372 Ha atau 35,97 persen. Peran jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah berdasarkan distribusinya pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 2. 11 DISTRIBUSI LUAS BERDASARKAN KECAMATAN KAB. SUMBA BARAT DAYA

Distribusi Luas Kecamatan terhadap KJE Pengolahan dan Penguraian Limbah										
Kecamatan	Kelas									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Kodi	12,10	0,01	0	0	72,6	0,05	26.996,6	18,2	0	0
Kodi Balaghar	0	0	26,01	0,02	489,4	0,33	62.307,5	42	40,1	0,03
Kodi Bangedo	121,9	0,08	0	0	80,7	0,05	18.303,6	12,3	38,9	0,03
Kodi Utara	0	0	165,1	0,11	42,4	0,03	8.094,4	5,5	0	0
Kota Tambolaka	372,9	0,25	26,28	0,2	86,8	0,06	10.580,1	7,1	906,8	0,61
Loura	0,85	0	25,76	0,02	890,6	0,60	16.516,9	11,1	0	0
Wewewa Barat	0	0	3,90	0	536,9	0,36	53,6	0,04	11,9	0,01
Wewewa Selatan	0	0	0	0	0	0	418,3	0,3	0	0
Wewewa Tengah	0	0	0	0	0	0	786,6	0,53	0	0
Wewewa Timur	0	0	3,93	0	15,8	0,01	129,9	0,1	0	0
Wewewa Utara	0	0	0,81	0	2,3	0	242	0,2	0	0
Total	507,7	0,34	251,8	0,2	2.217,4	1,49	144.429,3	97,3	997,7	0,67

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2029

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa peran ekosistem terhadap jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah mayoritas berkategori tinggi. Kecamatan-kecamatan yang memberikan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah berkategori tinggi dengan persentase luasan lebih dari 10 persen adalah Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, dan Kecamatan Loura. Sementara, kecamatan yang memberikan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dengan luasan tertinggi untuk kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi secara berturut – turut adalah Kecamatan Kota Tambolaka sebesar 0,25 persen, Kecamatan Kodi Utara sebesar 0,11 persen, Kecamatan Loura 0,60 persen, Kecamatan Kodi Balaghar 41,99 persen dan Kecamatan Kota Tambolaka 0,61 persen.

2.1.1.8 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN PANGAN

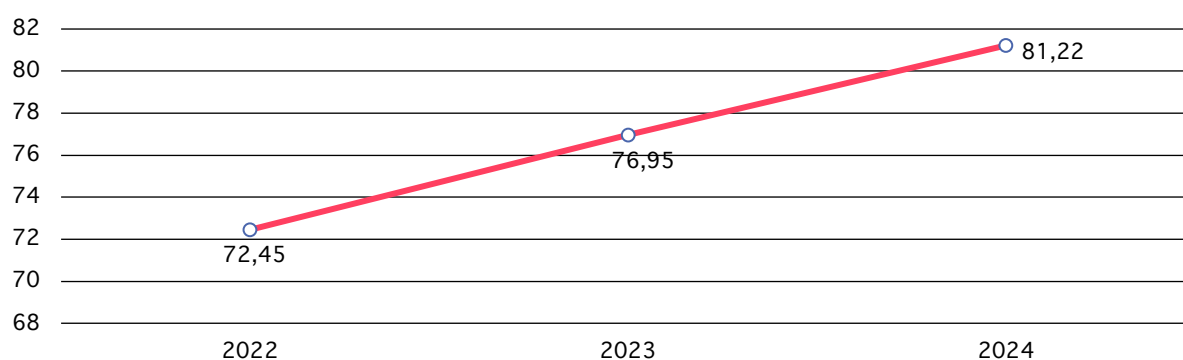
1. RASIO ELEKTRIFIKASI

Capaian rasio elektrifikasi di Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Tepatnya dimulai pada tahun 2022, dimana rasio elektrifikasi tercatat sebesar 72,45 persen, yang sekaligus menandakan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau layanan listrik secara optimal.

Sehingga, seiring dengan berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan perluasan jaringan listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, maka capaian rasio elektrifikasi mengalami peningkatan signifikan menjadi 76,95 persen pada tahun 2023. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana rasio elektrifikasi mencapai 81,22 persen.

Kenaikan ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mempercepat pemerataan akses listrik, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Peningkatan rasio elektrifikasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan, dan layanan publik yang lebih baik.

GAMBAR 2. 8 RASIO ELEKTRIFIKASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024

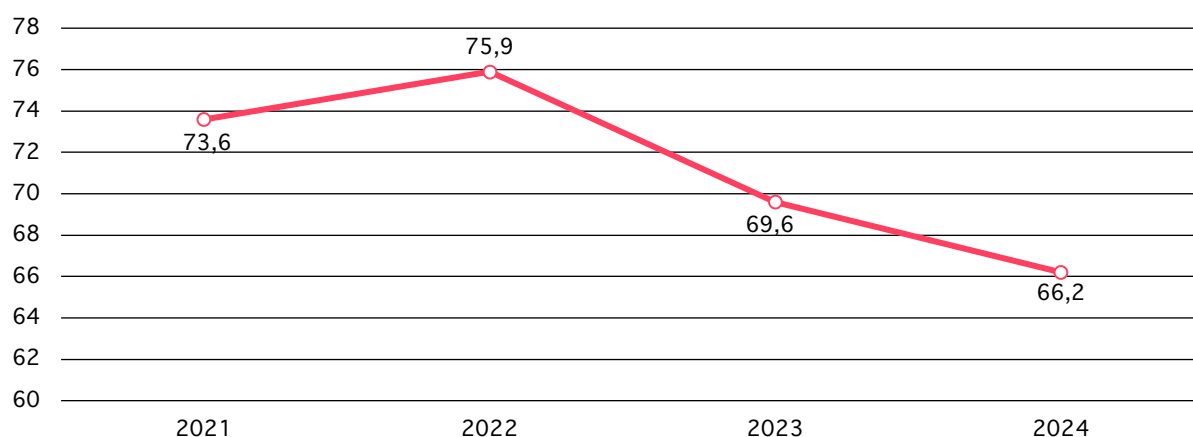


Sumber : Dinas ESDM Prov. NTT Tahun 2025.

2. POLA PANGAN HARAPAN

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada periode tahun 2021 – 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun di dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, skor Pola Pangan Harapan berada di angka 73,6 poin dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,9 poin, yang mencerminkan perbaikan dalam keberagaman dan kualitas konsumsi pangan ditingkat masyarakat. Namun, capaian tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2023 skor mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 69,6 poin, bahkan terus menurun hingga 66,2 poin pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang, baik akibat faktor produksi, distribusi, maupun daya beli masyarakat. Kondisi tersebut seharusnya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, mengingat skor Pola Pangan Harapan yang semakin menjauh dari target ideal dapat berdampak buruk pada ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Fluktuasi terkait data skor pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

GAMBAR 2. 9 SKOR POLA PANGAN HARAPAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024



Sumber : Bapanas Tahun 2025

3. DAYA DUKUNG AIR

Berdasarkan peta daya tampung, fungsi pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagian besar masih dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, sebagian kecil wilayah yang masuk kategori sedang, rendah dan sangat rendah. hal ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Sumba Barat Daya belum banyak terganggu. Berdasarkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, fungsi tata air dan banjir diklasifikasikan dalam kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi.

GAMBAR 2. 10 PETA DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA AIR DAN BANJIR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



Fungsi tata air dan banjir berkategori sangat tinggi terdistribusi pada satuan ekoregion pegunungan struktural seluas 31.370,06 ha atau 21,14% dari total luas Kabupaten Sumba Barat Daya, satuan ekoregion perbukitan Karst seluas 16.399,07 ha atau 11,05% dari total luas Kabupaten Sumba Barat Daya. Lahan dengan kategori tinggi dalam fungsi tata air dan banjir terdistribusi pada satuan ekoregion dataran organik koral seluas 54.356,94 ha atau 36,63% dari total luas Kabupaten Sumba Barat Daya dan pada satuan ekoregion perbukitan karst dengan luas 44.995,99 ha atau 30,32% dari total luas Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari data ini, menunjukkan bahwa ekoregion di Kabupaten Sumba Barat Daya masih memiliki fungsi yang baik terhadap pengaturan tata air dan banjir.

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan (SA) dan kebutuhan air (DA). Jika nilai $SA > DA$ maka daya dukung air dinyatakan surplus, sebaliknya jika nilai $SA < DA$ maka daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampau.

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Ketersediaan (supply) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional berikut ini. $SA = 10 \times C \times R \times A$

Dengan:

- SA = ketersediaan air (m³/tahun);
- C = koefisien limpasan tertimbang = $\sum(C_i \times A_i) / \sum A_i$;
- R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun);
- A = luas wilayah (Ha);
- A_i = luas penggunaan lahan (Ha);
- C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan;
- R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i;
- 10 = faktor konversi dari mm/ha menjadi m³.

Nilai R dihitung dari data curah hujan tahunan di Kabupaten Sumba Barat Daya selama tahun 2018-2023, yaitu 1382,15 mm per tahun. Sementara, persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air (DA) adalah: $DA = N \times KHLA$ Dengan:

- DA = total kebutuhan air (m³/tahun);
- N = jumlah penduduk (orang);
- KHLA = kebutuhan air untuk hidup layak
= 1.600 m³/kapita/tahun = 2 x 800 m³/kapita/tahun.

Dimana 800 m³ air/kapita/tahun adalah kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan, sedangkan 2 adalah faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik, dan lainnya.

TABEL 2. 12 KOEFISIEN LIMPASAN TUTUPAN LAHAN DI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

Tutupan Lahan	Luas (A) (Ha)	Koefisien (C)	Koefisien x Luas
Badan air	127,59	0,15	19,1385
Bandara/ Pelabuhan	115,70	0,80	92,56
Belukar	5.1732,53	0,2	10.346,50527
Belukar rawa	37,28	0,07	2,609301249
Hutan Lahan Kering Primer	3.070,75	0,18	552,7350704
Hutan Lahan Kering Sekunder	5.804,94	0,18	1.044,888827
Hutan Mangrove Primer	2,66	0,18	0,47818081
Hutan Mangrove Sekunder	36,25	0,18	6,52507077
Kebun campuran	7.985,02	0,40	3.194,009185

Tutupan Lahan	Luas (A) (Ha)	Koefisien (C)	Koefisien x Luas
Pemukiman	575,69	0,70	402,983382
Pertanian Lahan Kering	95,33	0,30	28,59856808
Pertanian Lahan Kering Campur	1.502,57	0,30	450,7707028
Savana/padang rumput	40.531,98	0,35	14.186,19475
Sawah	4.470,68	0,50	2.235,341485
Tanah Terbuka	456,18	0,20	91,23652566
Tegalan/Ladang	21.786,08	0,40	8.714,432
Total	138.331,23	0,2991	41.369,00

Sumber: KLHS RPJPD SBD Tahun 2025 – 2045, 2024

$$\begin{aligned}
 SA &= 10 \times C \times R \times A \\
 &= 10 \times 0,2991 \times 1382,15 \times 138.331,23 \\
 &= 571.782.476,35 \text{ m}^3/\text{tahun} \\
 DA &= N \times KHLA \\
 &= 322.073 \text{ Jiwa} \times 2 \times 800 \text{ m}^3/\text{jiwa}/\text{tahun} \\
 &= 515.316.800 \text{ m}^3/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Ketersediaan air (SA) di Sumba Barat Daya tahun 2023 571.782.476,35 m³/tahun, sementara kebutuhan air (DA) adalah 515.316.800 m³/tahun, maka daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk Sumba Barat Daya adalah 1,11 atau mengalami “surplus”. Proyeksi daya dukung air tahun 2025 - 2029 menggunakan asumsi ketersediaan air permukaan tetap dan terjadi peningkatan kebutuhan air karena pertumbuhan penduduk. Hasil proyeksi daya dukung air Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 – 2029 dirinci tiap kecamatan tersaji pada tabel berikut ini :

TABEL 2. 13 PROYEKSI DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025-2029

Kecamatan	Tahun 2023			Proyeksi									
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
	Ketersediaan $S_A(m^3/thn)$	Kebutuhan $D_A(m^3/thn)$	Status DDA	Kebutuhan $D_A(m^3/thn)$	Status DDA	Kebutuhan $D_A(m^3/thn)$	Status DDA	Kebutuhan $D_A(m^3/thn)$	Status DDA	Kebutuhan $D_A(m^3/thn)$	Status DDA	Kebutuhan $D_A(m^3/thn)$	Status DDA
Kodi Bangedo	26.273.825,55	28.537.600	Defisit	29.278.619	Defisit	29.656.313	Defisit	30.038.880	Defisit	30.426.381	Defisit	30.818.882	Defisit
Kodi Balaghar	49.087.269,97	29.798.400	Surplus	30.572.157	Surplus	30.966.538	Surplus	31.366.007	Surplus	31.770.628	Surplus	32.180.469	Surplus
Kodi	30.415.685,06	49.744.000	Defisit	51.035.673	Defisit	51.694.033	Defisit	52.360.886	Defisit	53.036.342	Defisit	53.720.511	Defisit
Kodi Utara	84.706.971,75	81.881.600	Surplus	84.689.238	Surplus	86.128.955	Defisit	87.593.147	Defisit	89.082.231	Defisit	90.596.629	Defisit
Wewewa Selatan	7.376.970,51	38.339.200	Defisit	39.755.254	Defisit	40.482.775	Defisit	41.223.610	Defisit	41.978.002	Defisit	42.746.200	Defisit
Wewewa Barat	64.875.819,08	73.627.200	Defisit	78.323.582	Defisit	80.782.942	Defisit	83.319.526	Defisit	85.935.760	Defisit	88.634.142	Defisit
Wewewa Timur	57.195.544,55	44.201.600	Surplus	45.672.287	Surplus	46.425.879	Surplus	47.191.906	Surplus	47.970.573	Surplus	48.762.087	Surplus
Wewewa Tengah	42.054.202,19	53.072.000	Defisit	55.541.387	Defisit	56.818.839	Defisit	58.125.672	Defisit	59.462.563	Defisit	60.830.202	Defisit
Wewewa Utara	16.090.534,98	21.449.600	Defisit	22.394.996	Defisit	22.883.207	Defisit	23.382.061	Defisit	23.891.790	Defisit	24.412.631	Defisit
Loura	63.361.276,22	35.347.200	Surplus	40.159.467	Surplus	42.805.976	Surplus	45.626.890	Surplus	48.633.702	Surplus	51.838.663	Surplus
Kota Tambolaka	77.731.243,06	59.318.400	Surplus	60.834.655	Surplus	61.607.255	Surplus	62.389.667	Surplus	63.182.016	Surplus	63.984.427	Surplus
Sumba Barat Daya	519.169.342,92	515.316.800	Surplus	538.257.315	Defisit	550.252.712	Defisit	562.618.252	Defisit	575.369.988	Defisit	588.524.843	Defisit

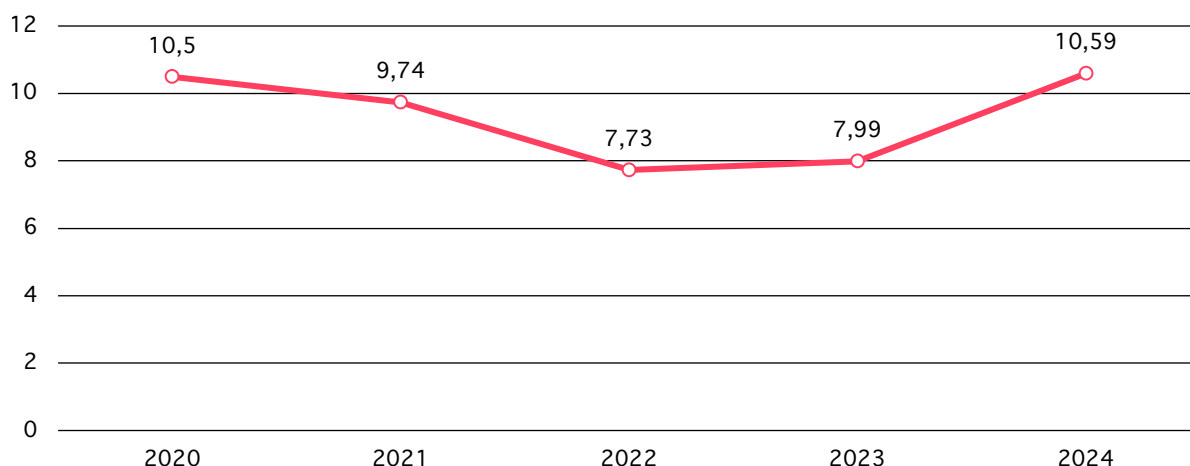
Keterangan: DDA = Daya Dukung Air

SA = Ketersediaan Air (m³/tahun)DA = Kebutuhan Air (m³/tahun)

4. PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam periode 2020 – 2024 telah menunjukkan pola fluktuatif yang sekaligus mencerminkan kerentanan terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 10,50% dan menurun menjadi 9,74% pada tahun 2021, lalu mencapai titik terendah hingga 7,73% pada tahun 2022 sebagai indikasi adanya perbaikan akses dan ketersediaan pangan. Namun, tren positif ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2023 kembali naik menjadi 7,99% dan melonjak tajam pada tahun 2024 hingga 10,59%, bahkan lebih tinggi dibandingkan awal periode. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya tantangan serius seperti ketidakstabilan produksi akibat faktor iklim, tekanan ekonomi masyarakat yang menurunkan daya beli, serta keterbatasan efektivitas program pangan dan gizi. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat rapuh dan membutuhkan strategi adaptif, termasuk penguatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, peningkatan akses pangan bergizi, serta sistem mitigasi risiko dan evaluasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial – ekonomi dan lingkungan. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

GAMBAR 2. 11 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S/D 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2025

5. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), yang di antaranya adalah tanpa kemiskinan (target nomor 1) dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan (target nomor 2). Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,

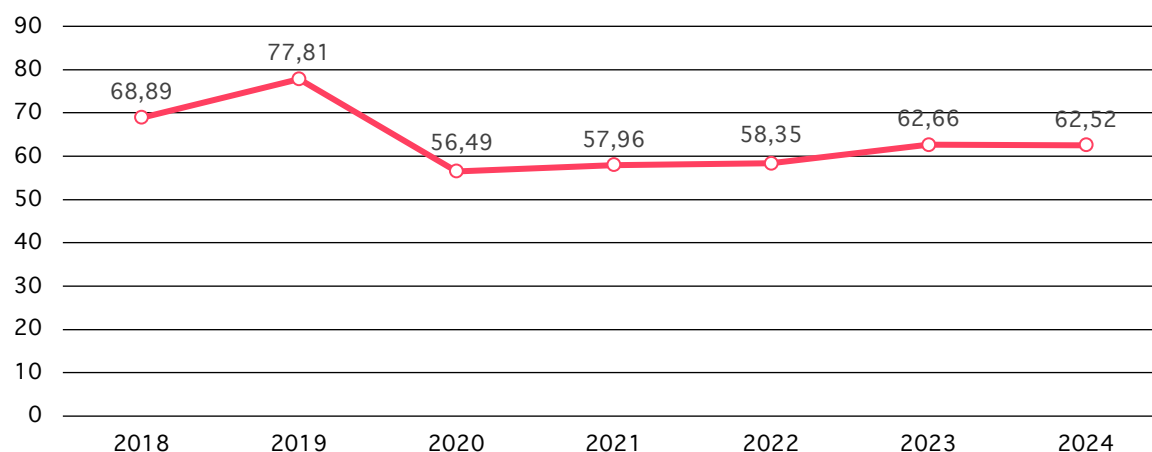
bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Selama periode tahun 2018 hingga 2024, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan pola yang fluktuatif dengan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhinya. Pada tahun 2018, nilai IKP di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 68,89 yang menempatkannya dalam kategori "tahan" terhadap kerentanan pangan. Kinerja ini meningkat secara signifikan pada tahun 2019, dengan capaian indeks sebesar 77,81 sehingga masuk dalam kategori "sangat tahan". Peningkatan ini mencerminkan membaiknya aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan pada saat itu.

Namun demikian, tren positif tersebut mengalami perubahan drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IKP mengalami penurunan yang sangat tajam dengan masing-masing menjadi 56,49 dan 57,96 serta menempatkan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kategori "agak rentan". Penurunan tajam ini sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang membatasi berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Gangguan terhadap rantai pasok pangan, penurunan pendapatan masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar juga turut memperburuk kondisi ketahanan pangan di masa tersebut. Sedangkan pada tahun 2022, tren pemulihan mulai terlihat dan berlanjut hingga tahun 2023, di mana nilai IKP meningkat menjadi 62,66 serta masuk dalam kategori "agak tahan". Capaian ini menunjukkan adanya pemulihan pasca-pandemi, seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi, pemulihan daya beli, serta perbaikan dalam distribusi pangan di tingkat lokal. Namun demikian, pada tahun 2024, IKP Kabupaten Sumba Barat Daya kembali mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,14 poin menjadi 62,52. Meskipun demikian, secara kategori, nilai ini masih tetap berada dalam klasifikasi "agak tahan", yang berarti Kabupaten Sumba Barat Daya masih memiliki ketahanan yang cukup terhadap risiko kerentanan pangan, namun tetap memerlukan perhatian dan penguatan pada aspek-aspek tertentu.

Fluktuasi ini mencerminkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih rentan terhadap guncangan eksternal, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan, seperti pengembangan sistem pangan lokal yang tangguh, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan, diversifikasi sumber pangan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

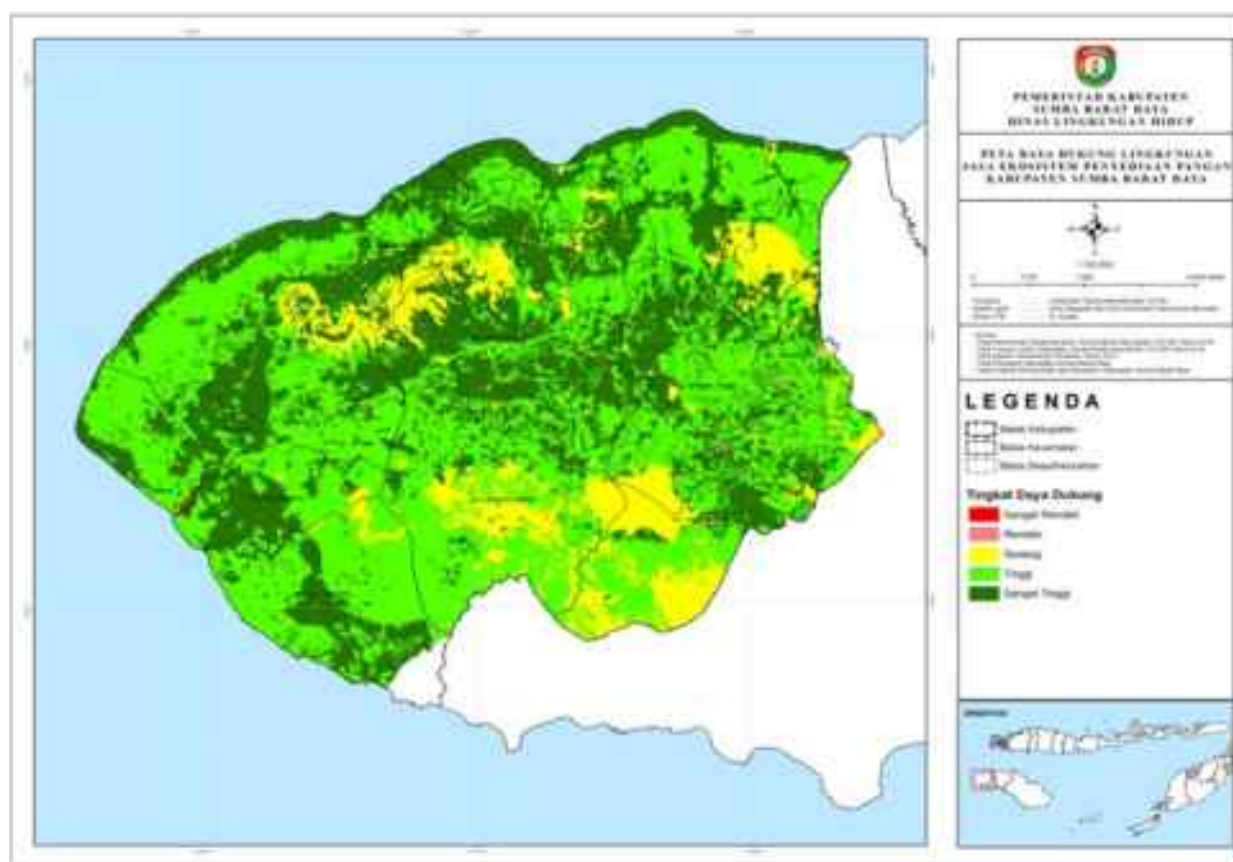
GAMBAR 2. 12 INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 2018 - 2024



Sumber : Indeks Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional, 2024

Hasil analisis daya dukung lingkungan jasa ekosistem terhadap jasa penyediaan pangan, tersaji pada gambar 2.13 yang menyajikan Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

GAMBAR 2. 13 PETA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



Berdasarkan Peta Daya Dukung Jasa ekosistem Penyediaan Pangan di atas terlihat bahwa kurang lebih 88% wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki Daya Dukung yang tinggi – sangat tinggi terhadap jasa ekosistem Penyediaan pangan, hal ini ditunjukkan oleh warna hijau muda – hijau tua pada peta, Pada Peta juga terlihat warna kuning yang menempati kurang lebih 11% wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Warna kuning ini mengindikasikan daerah-daerah dengan tingkat Daya Dukung berkategori sedang dalam memberikan daya dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan.

Penentuan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Hasil perhitungan daya dukung pangan tiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya tersaji pada tabel berikut:

TABEL 2. 14 KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan (Kg Setara Beras)	Kebutuhan Pangan. (Kg Setara Beras)	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1	Kodi Balaghar	18624	22231444,79	2325392,64	9,56	Aman
2	Kodi Bangedo	17836	6311777,96	2227002,96	2,83	Aman
3	Kodi	31090	14202234,12	3881897,4	3,66	Aman
4	Kodi Utara	51176	30098725,07	6389835,36	4,71	Aman
5	Kota Tambolaka	37074	5466513,09	4629059,64	1,18	Aman Bersyarat
6	Loura	22092	14084943,07	2758407,12	5,11	Aman
7	Wewewa Barat	46017	11946530,35	5745682,62	2,08	Aman
8	Wewewa Selatan	23962	10211070,53	2991895,32	3,41	Aman
9	Wewewa Tengah	33170	10588860,28	4141606,2	2,56	Aman
10	Wewewa Timur	27626	16330854,76	3449382,36	4,73	Aman
11	Wewewa Utara	13406	2253765,77	1673873,16	1,35	Aman Bersyarat
Sumba Barat Daya		322,073	143726719,8	40214034,78	3,57	Aman

Sumber : KLHS RPJMD Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029

Hasil perhitungan DDLH tersebut menunjukkan status DDLH indikatif. Jika nilai DDLH penyedia pangan (σ) nilainya ≥ 2 , maka DDLH masih mampu mendukung kebutuhan pangan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Bila $1 \leq \sigma \leq 2$, maka daya dukung pangan dalam kondisi aman bersyarat (conditional sustain), selanjutnya jika $\sigma < 1$ maka daya dukung pangan sudah terlampaui/tidak aman. Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan, yang pada tahun 2023 nilainya 1,68 atau dalam kategori aman bersyarat.

Terdapat sembilan wilayah kecamatan di Sumba Barat Daya yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/ berkelanjutan (Tabel 2.11), sementara dua wilayah kecamatan yaitu Wewewa Utara dan Kota Tambolaka, kinerja daya dukung pangan masuk dalam kategori aman bersyarat. Untuk menjaga DDLH penyediaan pangan tidak terlampaui dapat dilakukan dengan dua skenario, yaitu: (1) Berupaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan teknologi yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam dan (2) Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Skenario proyeksi yang dibangun dalam daya dukung pangan selain penetapan LP2B juga adanya inovasi teknologi pertanian sehingga produktivitas pangan meningkat 0,10 ton - 0,20 ton per tahun dan peningkatan teknologi pascapanen yang lebih efisien dan adanya tren penurunan konsumsi beras per orang per tahun akibat meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan tercapainya diversifikasi pangan di Sumba Barat Daya.

TABEL 2. 15 PROYEKSI KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029

No.	Kecamatan	Tahun 2025					Tahun 2026				
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Daya Dukung Pangan	Indikatif	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1.	Kodi Bagedo	18.299	6.869,14	2.284,81	3,01	Aman	18.535	7.137,82	2.314,28	3,08	Aman
2.	Kodi Balaghar	19.108	23.087,36	2.385,82	9,68	Aman	19.354	23.576,78	2.416,54	9,76	Aman
3.	Kodi	31.897	14.952,24	3.982,66	3,75	Aman	32.309	15.301,01	4.034,10	3,79	Aman
4.	Kodi Utara	52.931	32.025,10	6.608,96	4,85	Aman	53.831	32.983,33	6.721,34	4,91	Aman
5.	Wewewa Selatan	24.847	11.027,02	3.102,40	3,55	Aman	25.302	11.355,41	3.159,21	3,59	Aman
6.	Wewewa Barat	48.952	12.737,25	6.112,15	2,08	Aman	50.489	13.131,11	6.304,06	2,08	Aman
7.	Wewewa Timur	28.545	17.161,06	3.564,13	4,81	Aman	29.016	17.934,90	3.622,94	4,95	Aman
8.	Wewewa Tengah	34.713	11.201,35	4.334,27	2,58	Aman	35.512	11.450,98	4.434,03	2,58	Aman
9.	Wewewa Utara	13.997	2.415,17	1.747,67	1,38	Aman Bersyarat	14.302	2.199,47	1.785,75	1,23	Aman Bersyarat
10	Loura	25.100	14.491,47	3.133,99	4,62	Aman	26.754	14.671,78	3.340,50	4,39	Aman
11.	Kota Tambolaka	38.022	5.818,62	4.747,43	1,23	Aman Bersyarat	38.505	5.993,91	4.807,73	1,25	Aman Bersyarat
	Sumba Barat Daya	336.411	151.785,78	42.004,29	3,61	Aman	343.909	155.736,50	42.940,48	3,63	Aman

Keterangan : Ketersediaan Pangan Setara Beras dinyatakan dalam ton/tahun
Kebutuhan Pangan Setara Beras dinyatakan dalam ton/tahun

TABEL 2. 16 LANJUTAN PROYEKSI KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029

No.	Kecamatan	Tahun 2027					Tahun 2028				
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Daya Dukung Pangan	Indikatif	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1.	Kodi Bagedo	18.774	7.405,87	2.344,12	3,16	Aman	19.016	7.674,19	2.374,34	3,23	Aman
2.	Kodi Balaghar	19.604	23.937,77	2.447,76	9,78	Aman	19.857	24.363,47	2.479,35	9,83	Aman
3.	Kodi	32.726	15.669,24	4.086,17	3,83	Aman	33.148	16.035,99	4.138,86	3,87	Aman
4.	Kodi Utara	54.746	33.946,62	6.835,59	4,97	Aman	55.676	34.907,91	6.951,71	5,02	Aman
5.	Wewewa Selatan	25.765	11.716,88	3.217,02	3,64	Aman	26.236	12.061,71	3.275,83	3,68	Aman
6.	Wewewa Barat	52.075	13.483,43	6.502,08	2,07	Aman	53.710	13.856,26	6.706,23	2,07	Aman
7.	Wewewa Timur	29.495	17.768,86	3.682,75	4,82	Aman	29.982	18.218,02	3.743,55	4,87	Aman
8.	Wewewa Tengah	36.329	11.750,35	4.536,04	2,59	Aman	37.164	12.144,33	4.640,30	2,62	Aman
9.	Wewewa Utara	14.614	2.574,04	1.824,70	1,41	Aman Bersyarat	14.932	2.652,46	1.864,41	1,42	Aman Bersyarat
10	Loura	28.517	14.852,03	3.560,63	4,17	Aman	30.396	15.032,51	3.795,24	3,96	Aman
11.	Kota Tambolaka	38.994	6.169,07	4.868,79	1,27	Aman Bersyarat	39.489	6.344,35	4.930,60	1,29	Aman Bersyarat
	Sumba Barat Daya	351.639	159.274,16	43.905,65	3,63	Aman	359.606	163.291,20	44.900,42	3,64	Aman

Keterangan : Ketersediaan Pangan Setara Beras dinyatakan dalam ton/tahun
Kebutuhan Pangan Setara Beras dinyatakan dalam ton/tahun

TABEL 2. 17 LANJUTAN PROYEKSI KINERJA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA PANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029

No.	Kecamatan	Tahun 2029				Indikatif
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Daya Dukung Pangan	
1.	Kodi Bagedo	19.262	7.984,50	2.405,05	3,32	Aman
2.	Kodi Balaghar	20.113	24.799,23	2.511,31	9,88	Aman
3.	Kodi	33.575	16.404,11	4.192,17	3,91	Aman
4.	Kodi Utara	56.623	35.874,61	7.069,95	5,07	Aman
5.	Wewewa Selatan	26.716	12.658,73	3.335,76	3,79	Aman
6.	Wewewa Barat	55.396	14.319,72	6.916,74	2,07	Aman
7.	Wewewa Timur	30.476	18.822,67	3.805,23	4,95	Aman
8.	Wewewa Tengah	38.019	12.426,25	4.747,05	2,62	Aman
9.	Wewewa Utara	15.258	2.738,14	1.905,11	1,44	Aman Bersyarat
10	Loura	32.399	15.304,80	4.045,34	3,78	Aman
11.	Kota Tambolaka	39.990	6.523,22	4.993,15	1,31	Aman Bersyarat
	Sumba Barat Daya	367.827	167.855,98	45.926,86	3,65	Aman

Keterangan : Ketersediaan Pangan Setara Beras dinyatakan dalam ton/tahun
Kebutuhan Pangan Setara Beras dinyatakan dalam ton/tahun

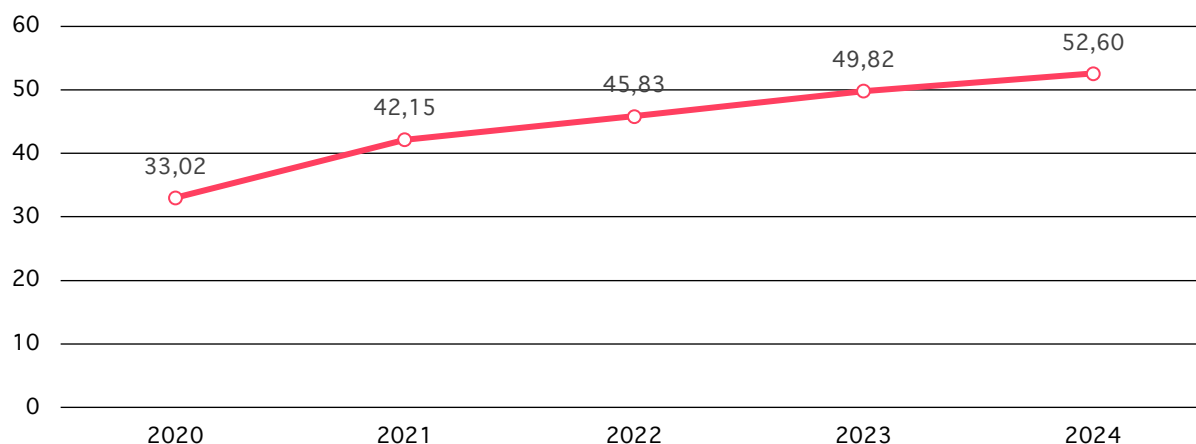
2.1.1.9 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

1. SANITASI

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Sumba Barat Daya, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian akses sanitasi layak berada di angka 33,02%. Setahun kemudian, terjadi kenaikan menjadi 42,15%, disusul dengan peningkatan pada 2022 yang mencapai 45,83%. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan capaian 49,52%, hingga akhirnya di tahun 2024 persentasenya mencapai 52,60%.

Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan yang nyata dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sanitasi layak. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya edukasi, pendampingan, dan penyediaan sarana sanitasi yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya, telah membuahkan hasil. Masyarakat semakin menyadari bahwa sanitasi layak tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mencegah penyakit dan menjaga kesehatan lingkungan. Dengan tren ini, diharapkan ke depan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat mencapai cakupan sanitasi layak yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup masyarakat pun terus meningkat.

GAMBAR 2. 14 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2020 S.D 2024



Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

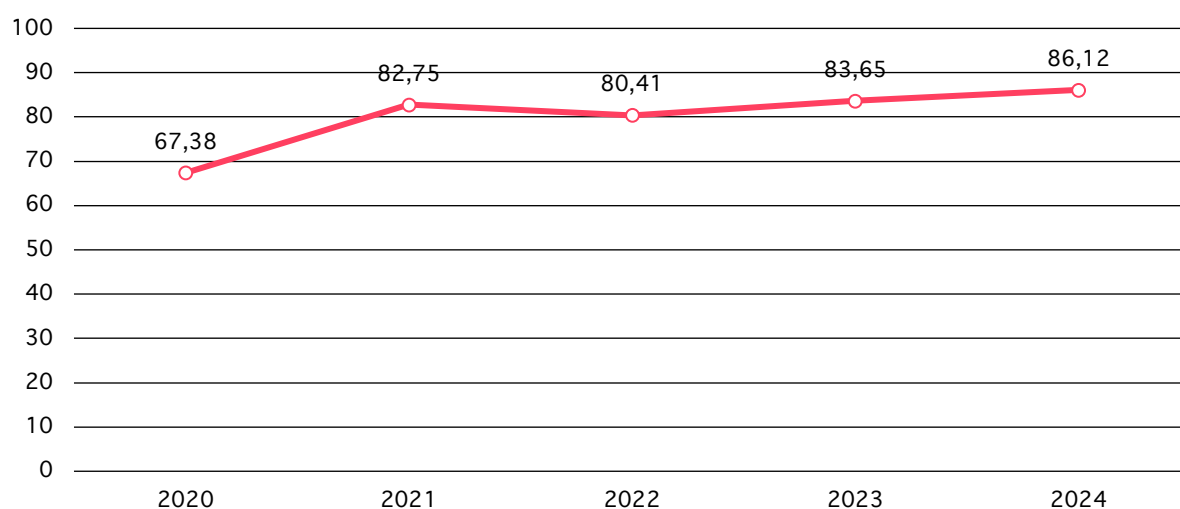
2. AIR MINUM

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sumba Barat Daya, terlihat tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, akses air minum layak tercatat sebesar 67,38%, kemudian melonjak signifikan menjadi 82,75% pada tahun 2021. Meski pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 80,41%, capaian ini kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 83,65%, dan terus membaik hingga mencapai 86,12% pada tahun 2024.

Pergerakan positif ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memastikan ketersediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakatnya. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana air bersih, penguatan manajemen pengelolaan air, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Capaian ini bukan hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan risiko penyakit berbasis air, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan dan lingkungan. Dengan tren yang positif ini, Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan pemerataan layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

**GAMBAR 2. 15 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
TAHUN 2020 - 2024**

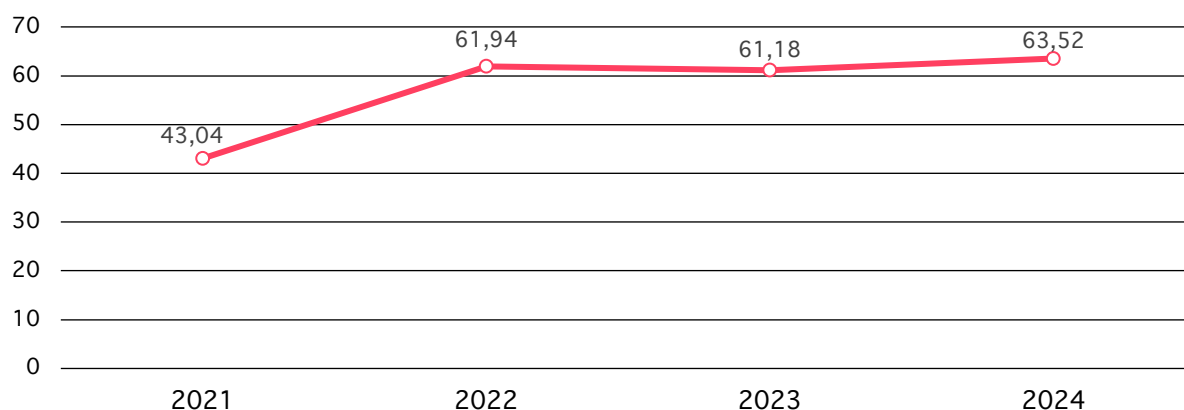


Sumber : BPS Prov. Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

3. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposisi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kurun waktu sejak 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2021 nilai IKLH senilai 43,04 yang naik menjadi 63,52 pada Tahun 2024, Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

GAMBAR 2. 16 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2021 - 2024



Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK RI 2025

4. PERSAMPAHAN

Sampah telah menjadi isu utama lingkungan hidup khususnya di perkotaan karena pertumbuhan jumlah timbulan sampah masih belum dapat dikendalikan. Tekanan persampahan di tahun mendatang sangat bergantung pada pola produksi dan konsumsi serta tingkat daur ulang yang dilakukan. Sampah juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya CO₂ dan CH₄, karena proses pembakaran sampah atau penimbunan sampah di rumah tangga maupun di tempat pemroses akhir (TPA) dapat mengemisikan kedua gas tersebut. Tekanan persampahan paling utama berasal dari peningkatan jumlah penduduk. Besarnya timbulan sampah di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat diperkirakan berdasarkan besar timbulan sampah per orang per hari menurut SNI 19-3964-1994, yaitu untuk kategori sampah kota besar adalah 2,0 - 2,5 liter/orang/hari atau 0,4 - 0,5 kg/orang/hari dan timbulan sampah untuk kota sedang/kecil adalah 1,5 - 2,0 liter/orang/hari atau 0,3 - 0,4 kg/orang/hari. Prakiraan besaran timbulan sampah di Sumba Barat Daya berdasarkan jumlah penduduk menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

**TABEL 2. 18 PERKIRAAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER HARI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2022 DAN 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Timbulan Sampah (Ton)		Timbulan Sampah (m ³)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Kodi Bagedo	17.239	17.836	2.516,89	2.604,06	12.584,47	13.020,28
2	Kodi Balaghar	18.000	18.624	2.628,00	2.719,10	13.140,00	13.595,52
3	Kodi	30.061	31.090	4.388,91	4.539,14	1.944,53	22.695,70
4	Kodi Utara	49.006	51.176	7.154,88	7.471,70	35.774,38	37.358,48
5	Wewewa Selatan	22.919	23.962	3.346,17	3.498,45	16.730,87	17.492,26
6	Wewewa Barat	43.501	46.017	6.351,15	6.718,48	31.755,73	33.592,41
7	Wewewa Timur	26.465	27.626	3.863,89	4.033,40	19.319,45	20.166,98
8	Wewewa Tengah	31.593	33.170	4.612,58	4.842,82	23.062,89	24.214,10
9	Wewewa Utara	12.782	13.406	1.866,17	1.957,28	9.330,86	9.786,38
10	Loura	19.613	22.092	2.863,50	3.225,43	14.317,49	16.127,16
11	Kota Tambolaka	36.927	37.074	5.391,34	5.412,80	26.956,71	27.064,02
Sumba Barat Daya		308.106	322.073	44.983,48	47.022,66	224.917,38	235.113,29

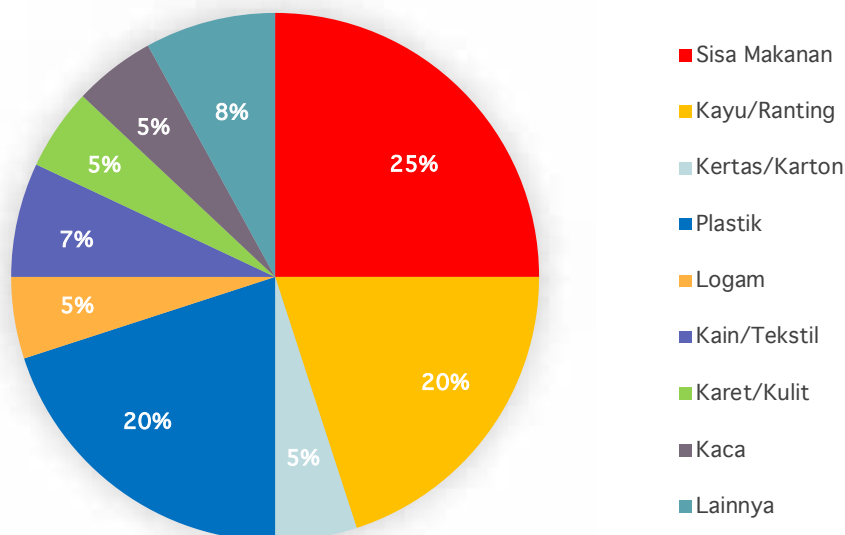
Sumber : KLHS RPJMD Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029

Berdasarkan data di atas, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023 mencapai 47.022,66 ton/tahun atau 235.113,29 m³/tahun yang meningkat sebesar 2.039,18 ton dibandingkan timbulan sampah tahun 2022 sebesar 44.983,48 ton, akibat peningkatan jumlah penduduk dari 308.106 jiwa (tahun 2022) menjadi 322.073 jiwa di tahun 2023. Kecamatan Kodi Utara dan Wewewa Barat tercatat sebagai wilayah yang paling banyak menghasilkan sampah per tahun, sedangkan Kecamatan Wewewa Utara dan Kodi Bagedo merupakan wilayah yang paling sedikit timbulan sampahnya karena jumlah penduduknya paling sedikit.

Tekanan terhadap persampahan di Kabupaten Sumba Barat Daya juga bertambah akibat pembangunan ekonomi dan ketidakpedulian Masyarakat terhadap lingkungan. Akumulasi dampak yang ditimbulkan akibat masyarakat yang cenderung membuang sampah di sembarang tempat adalah sampah berserakan dan menciptakan media bagi berkembangbiaknya aneka vector pembawa penyakit. Secara umum, sampah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (biodegradable) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memiliki sifat lebih sulit diurai seperti sampah plastik, logam, kaca, kaleng, dan styrofoam. Berdasarkan volumenya, komposisi sampah di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih banyak didominasi oleh sampah organik berupa sisa makanan yang jumlahnya mencapai

25 persen dan kayu/ranting sebesar 20 persen, serta sampah anorganik berupa plastik yang mencapai 20 persen.

GAMBAR 2. 17 KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Barat Daya, 2024

Pemerintah Sumba Barat Daya telah memiliki tempat pemrosesan akhir Sampah (TPA), yaitu TPA Ramadana seluas 5,5 ha dengan kapasitas pengolahan 105.000 m³/tahun. Saat ini, TPA tersebut mengalami kendala dalam pengelolaan sampah karena TPA Ramadana sedang tidak beroperasi, sehingga pengolahan sampah belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memperkuat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, secara intensif dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R. Khusus pada sekolah-sekolah dilakukan sosialisasi/penyuluhan/kampanye pengelolaan sampah agar dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini diharapkan dapat melakukan pemilahan sampah dari tingkat sumbernya, sehingga dapat menekan jumlah sampah yang tidak terkelola. Hal ini juga mengingat wilayah layanan persampahan yang cukup luas menjadi cukup sulit untuk dapat dijangkau semuanya, sehingga peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mereduksi jumlah sampah tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh sampah. Pada tahun 2023, dibangun 2 (dua) unit TPS 3R yang berlokasi di Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka dan Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka.

Pada Juni 2024, TPS 3R di Desa Radamata sudah beroperasi khususnya dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos.

2.1.1.10 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

1. INDEKS RISIKO BENCANA

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilewati oleh patahan sesar *Flores Back Arc Thrust*, sesar *Bondowatu Fault*, sesar *Sumba Strike-slip Fault*, sesar *Sumba Ridge Thrust*, sesar *Savu Thrust*, sesar *Semau Fault* dan sesar *Sape Strike-slip Fault* (PusGen, 2017). Dalam perspektif klimatologi, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di Provinsi Nusa Tenggara Timur kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah (BPS NTT 2022). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Sejak tahun 2015, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 138,00, yang dikategorikan sebagai risiko sedang. Indeks ini menunjukkan tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis bencana alam maupun non-alam yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selama kurun waktu 2015 hingga 2022, nilai indeks tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dan cenderung konstan di angka yang sama. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan indeks sebesar 1,47 poin menjadi 136,53 yang mencerminkan adanya upaya mitigasi yang mulai menunjukkan hasil, meskipun belum terlalu signifikan. Namun, pada tahun 2024, indeks kembali mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,44 poin menjadi 136,96, namun tetap berada dalam kategori risiko sedang.

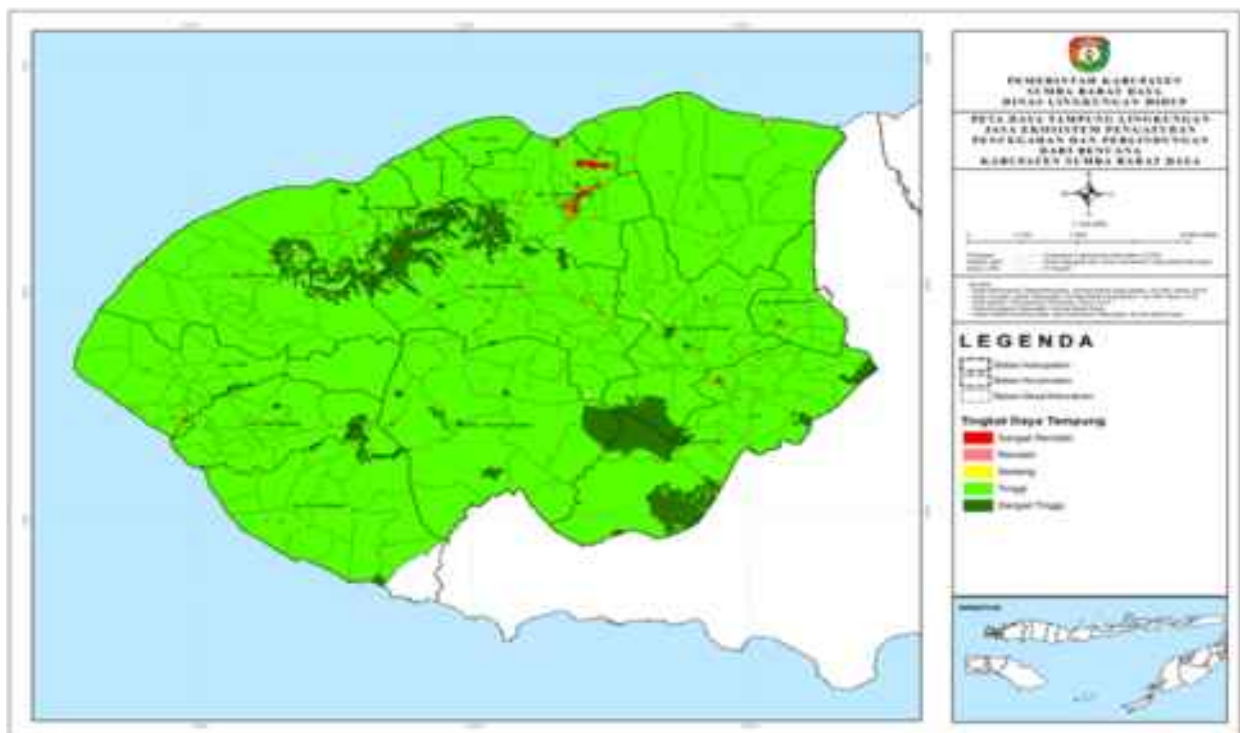
Kenaikan ini mengindikasikan bahwa potensi risiko bencana di Kabupaten Sumba Barat Daya masih cukup tinggi, terutama karena kerentanan terhadap berbagai jenis bencana belum tertangani secara optimal. Kabupaten Sumba Barat Daya menghadapi beragam ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, antara lain:

- Gempa bumi, karena wilayah ini berada dalam zona seismik aktif;
- Kekeringan, terutama saat musim kemarau panjang yang berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih;
- Cuaca ekstrem, yang sering kali mengganggu aktivitas ekonomi dan mengancam keselamatan masyarakat;
- Tsunami, sebagai dampak sekunder dari gempa bumi yang berpusat di laut;

- Banjir, yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi dan belum optimalnya sistem drainase;
- Tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dengan kemiringan lahan yang curam dan kerusakan vegetasi; dan
- Gelombang ekstrem dan abrasi pantai, yang mengancam wilayah pesisir serta infrastruktur pesisir;
- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang rawan terjadi saat musim kemarau dan berdampak pada kerusakan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dalam pengurangan risiko bencana melalui pendekatan mitigasi struktural (seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana) dan non-struktural (seperti edukasi masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana). Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menyusun rencana kontinjensi dan penguatan sistem tata kelola risiko bencana yang berbasis data serta kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan mitra pembangunan. Hal ini menjadi penting untuk membangun ketangguhan daerah (*resilience*) dalam menghadapi ancaman bencana, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015-2024 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

GAMBAR 2. 18 PETA DAYA TAMPUNG JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA



Sumber : KLHS RPJPD Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2024 – 2025, 2024

GAMBAR 2. 19 INDEKS RESIKO BENCANA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2015 S.D 2024



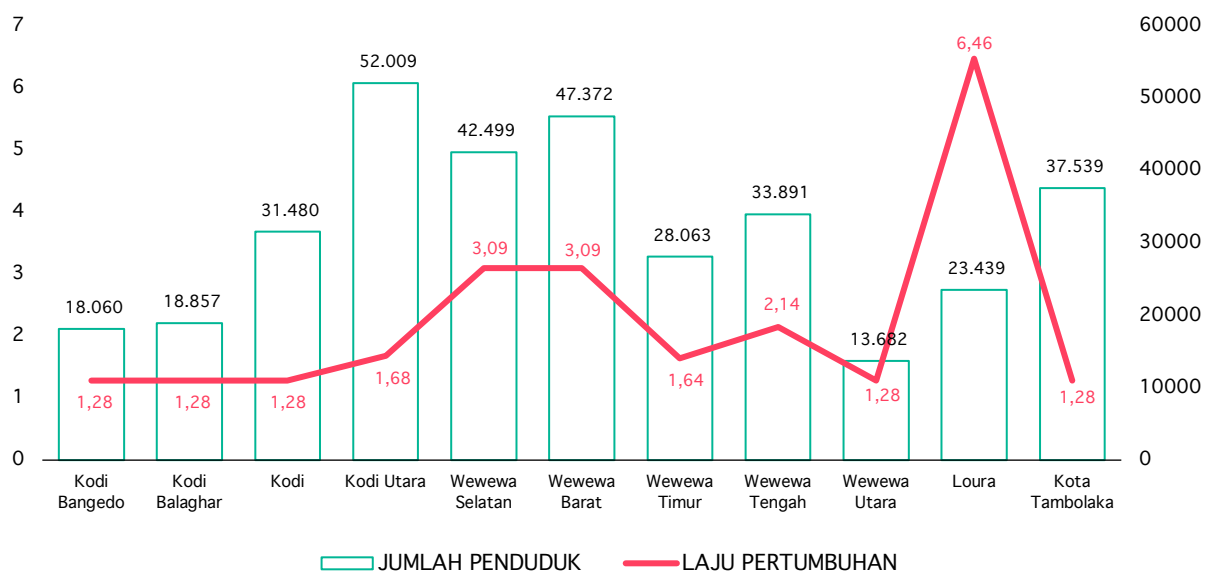
Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia, IRBI, 2024, BNPB

Berdasarkan Peta Daya Tampung Jasa ekosistem Pengaturan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana di atas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki Daya Dukung yang tinggi – sangat tinggi terhadap jasa ekosistem Pengaturan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana, hal ini ditunjukkan oleh warna hijau muda – hijau tua pada peta. Pada Peta juga terlihat sebagian kecil berwarna merah yang menempati kurang lebih 0,49% wilayah Kabupaten sumba Barat Daya.

2.1.2 DEMOGRAFI

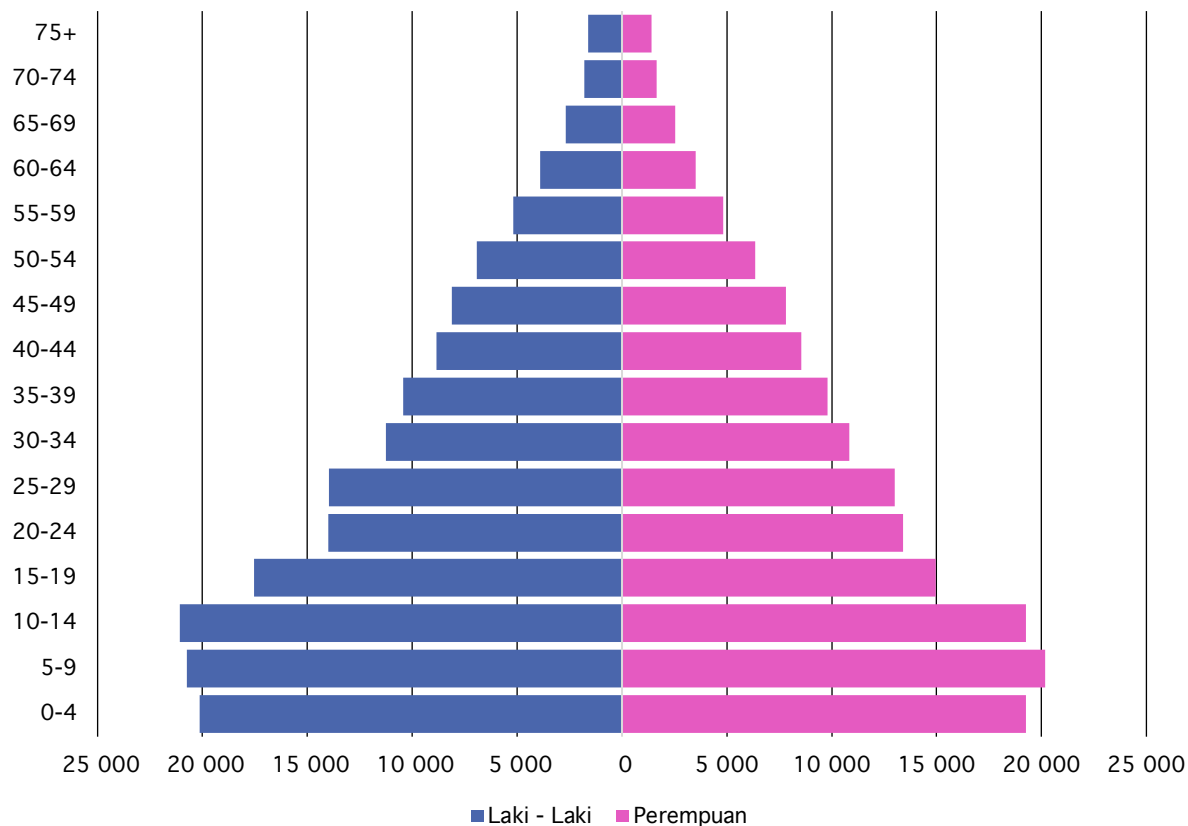
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebanyak 328.771 jiwa. Dari jumlah tersebut, 168.155 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sedangkan 160.616 jiwa merupakan penduduk perempuan. Kabupaten ini juga mencatatkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,14% pada tahun 2024. Dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Kodi Utara menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 52.009 jiwa dan jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya didominasi oleh kelompok usia 10–14 tahun, yang mencerminkan karakteristik demografis dengan struktur penduduk muda. Hal ini memberikan potensi besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa depan, sekaligus menjadi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja di tahun-tahun mendatang.

GAMBAR 2. 20 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PER KECAMATAN



Sumber : Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

GAMBAR 2. 21 PIRAMIDA PENDUDUK KAB. SUMBA BARAT DAYA



Sumber : Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

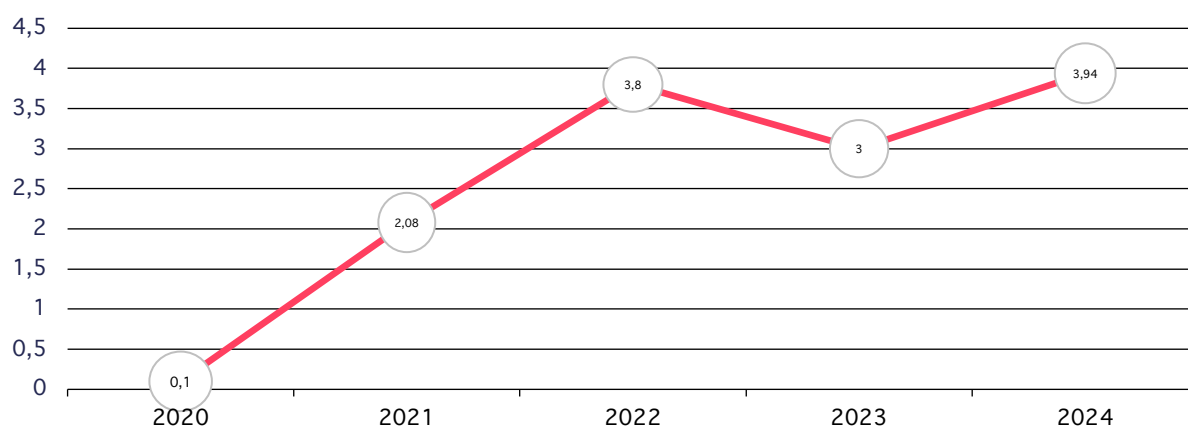
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kenaikan mencapai 3,8% pada periode 2022 kemudian melambat mencapai 3,0% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 3,94%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya selalu mengalami fluktuasi.

GAMBAR 2. 22 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 2020 – 2024

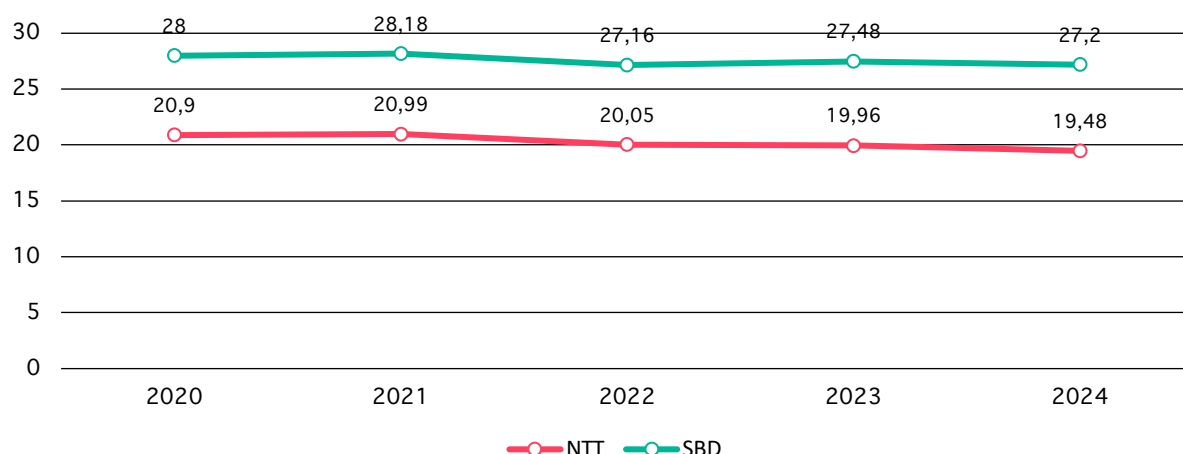


Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

2. ANGKA KEMISKINAN

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 27,20% serta menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata – rata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di angka 19,48%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih menjadi tantangan serius, dengan selisih hampir 8 poin persentase di atas rata – rata provinsi. Data ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut guna menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara singkat, tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya (27,20%) dibandingkan rata – rata Provinsi NTT (19,48%) menunjukkan bahwa kabupaten ini menghadapi tantangan yang lebih berat dalam hal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Faktor penyebabnya bisa meliputi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta rendahnya kesempatan kerja. Selisih yang cukup besar ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pusat. Gambaran perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dalam disajikan dalam Grafik 2.14.

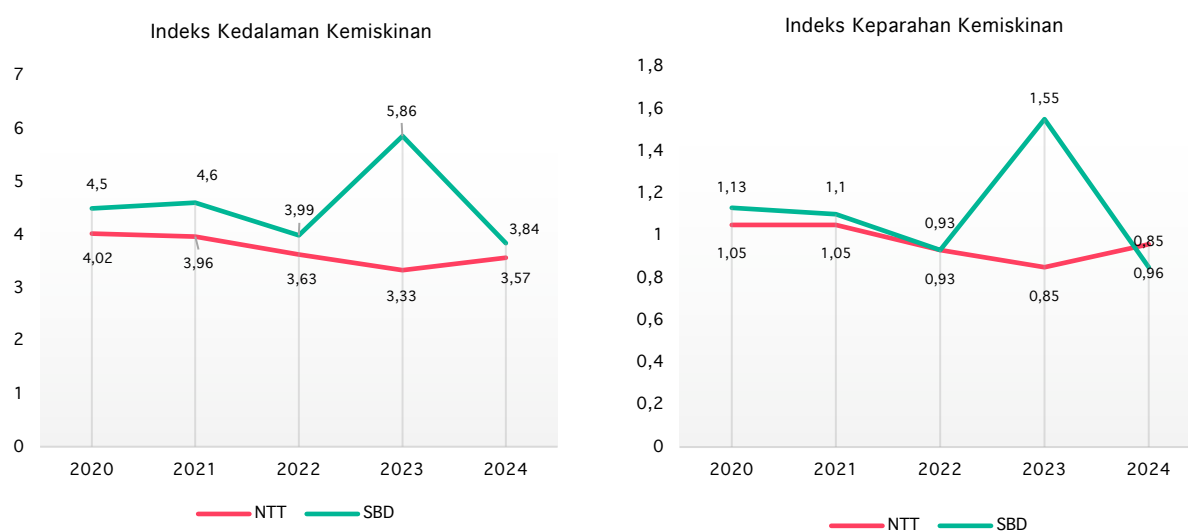
GAMBAR 2. 23 JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2023



Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2025 dan Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2025.

Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 3,84 poin, sedikit lebih tinggi dari rata – rata Provinsi NTT yang berada pada 3,57 poin. Namun, indeks keparahan kemiskinan di kabupaten ini lebih rendah, yaitu 0,85 poin, dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang mencapai 0,96 poin. Data ini menunjukkan bahwa meskipun rata – rata jarak pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih dalam (lebih miskin secara relatif), tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi NTT. Artinya, kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya cenderung lebih merata dan tidak terlalu timpang antarpenduduk miskin, meskipun tingkat kedalaman kemiskinannya masih perlu mendapat perhatian.

GAMBAR 2. 24 NILAI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024



Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2025 dan Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2025

3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 2,64%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,08%. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih berada di bawah rata – rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 3,02%. Peningkatan TPT ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika dalam sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Sumba Barat Daya, daya serap pasar kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

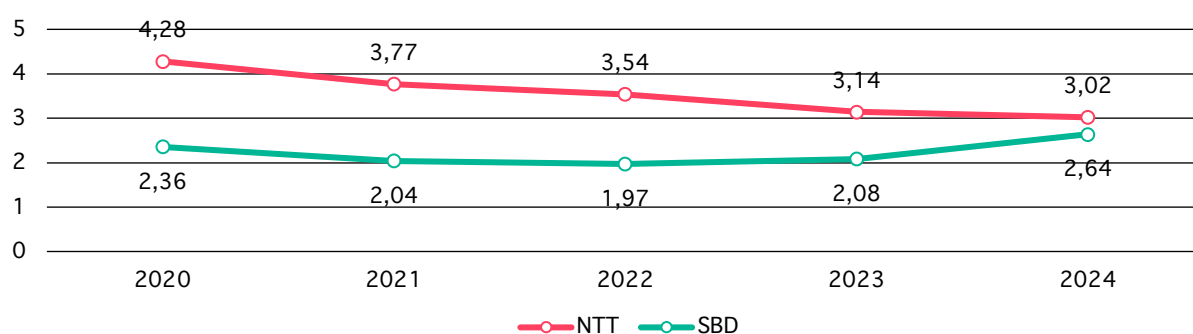
1. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan penambahan lapangan kerja secara proporsional;
2. Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri lokal, sehingga menyebabkan *mismatch* antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia; dan
3. Perubahan pola kerja atau industri pasca pandemi dan pergeseran teknologi yang menuntut adaptasi lebih cepat.

Namun, jika dibandingkan dengan rata – rata Provinsi NTT, angka TPT di Kabupaten Sumba Barat Daya masih tergolong relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki kemampuan relatif lebih baik dalam mengelola isu ketenagakerjaan atau bisa jadi karena struktur ekonomi lokal yang lebih padat karya seperti sektor pertanian, peternakan, atau perikanan, yang cenderung lebih menyerap tenaga kerja meskipun dalam bentuk informal. Untuk menekan angka pengangguran terbuka di masa mendatang, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan beberapa strategi seperti:

1. Meningkatkan pelatihan vokasional dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal;
2. Mendorong investasi sektor produktif yang menyerap tenaga kerja;
3. Mengembangkan program inkubasi usaha kecil dan menengah (UKM);
4. Memperkuat akses terhadap informasi pasar kerja, khususnya bagi generasi muda.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya angka pengangguran dapat ditekan, tetapi kualitas tenaga kerja lokal juga semakin meningkat dan kompetitif.

GAMBAR 2. 25 PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 - 2024

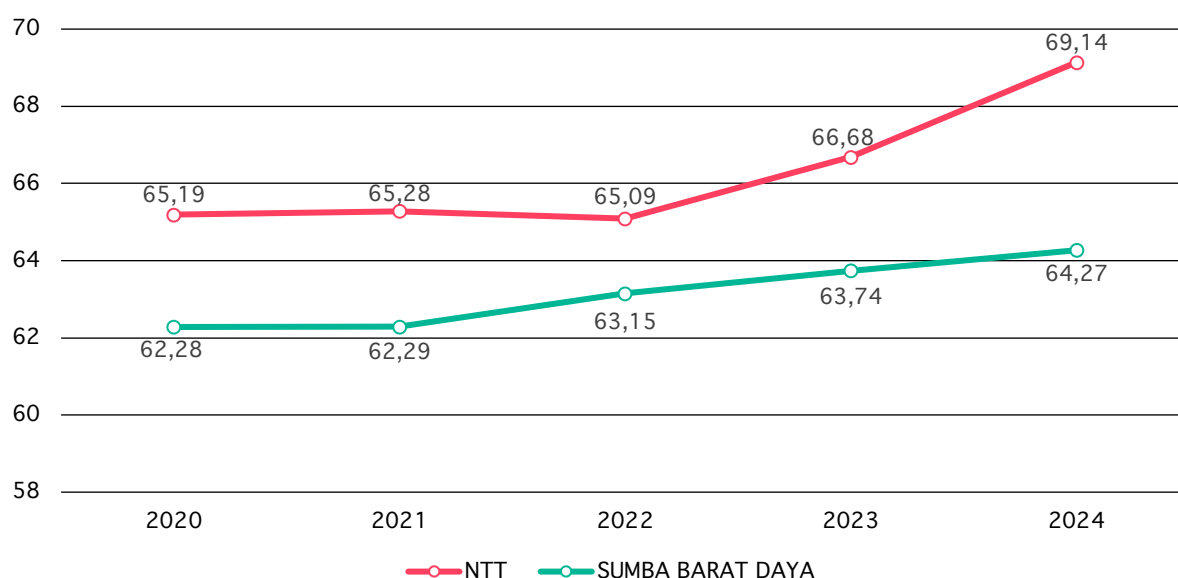


Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2025

4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini adalah indikator positif dari perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Secara kumulatif IPM Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kenaikan sebesar 1,99 poin, dari 62,28 pada tahun 2020 menjadi 64,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini meskipun terlihat bertahap namun mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan komponen – komponen utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan IPM yang stabil dari 62,28 menjadi 64,27 adalah pencapaian yang signifikan bagi Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat telah berhasil meningkatkan kualitas hidup secara holistik. Demi kepentingan masa depan, diharapkan untuk terus mengidentifikasi dan memperkuat program – program yang telah berhasil, serta mengatasi tantangan yang mungkin menghambat pertumbuhan IPM di sektor – sektor tertentu.

GAMBAR 2. 26 IPM PROV. NUSA TENGGARA TIMUR DAN KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024

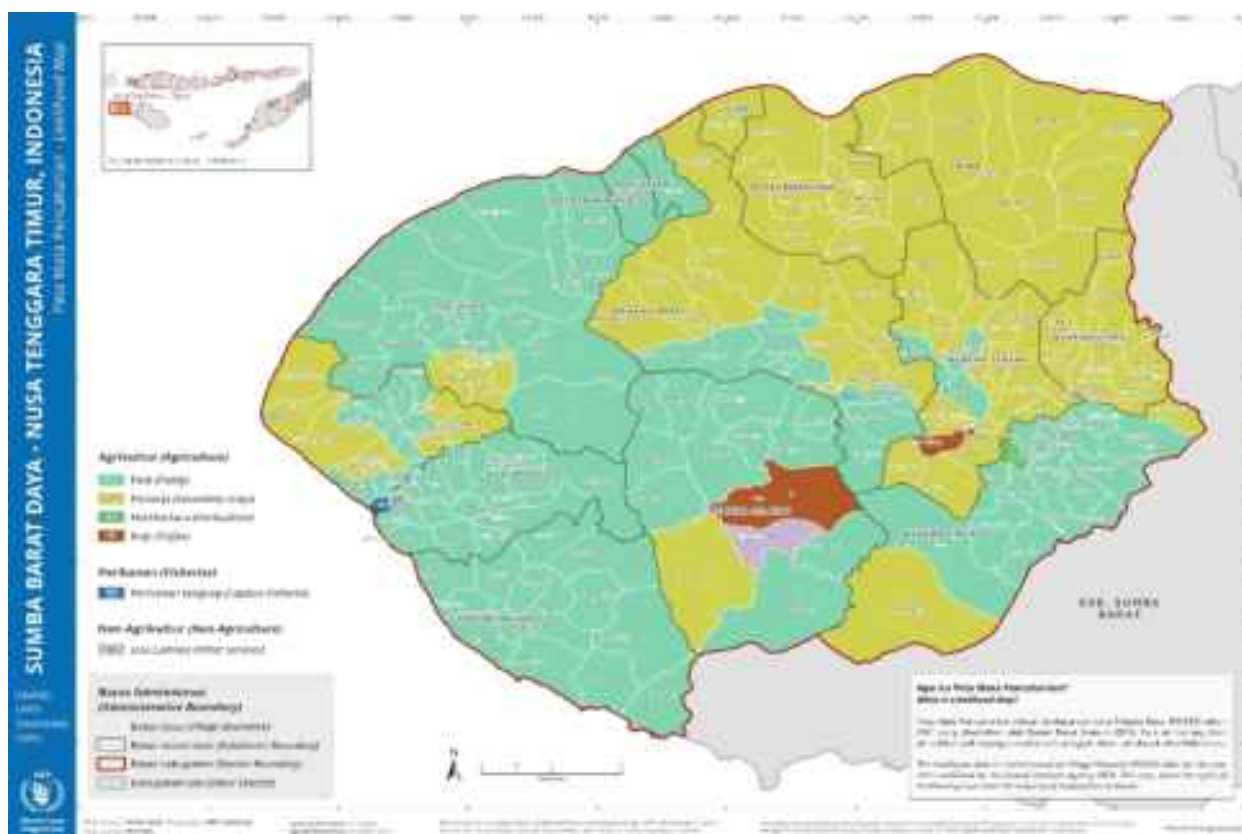


Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

5. MATA PENCAHARIAN, SENSITIVITAS DAN RESILIENSI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan melalui pendekatan mata pencaharian yang responsif terhadap perubahan iklim, dapat digambarkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki keragaman mata pencaharian yang tergolong sedikit, dari keseluruhan mata pencaharian yang berjumlah 22 mata pencaharian, 6 diantaranya dijalankan oleh penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Padi dan Palawija merupakan mata pencaharian yang paling dominan. Rincian selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini :

GAMBAR 2. 27 SEBARAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

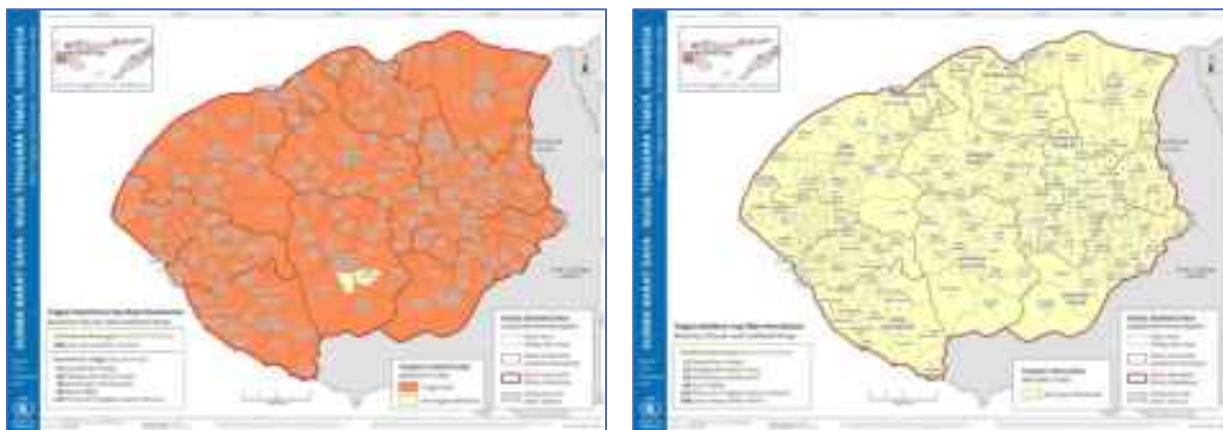


Sumber: WFP Indonesia, 2024

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan melalui pendekatan mata pencaharian yang responsif terhadap perubahan iklim, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 2 mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Tinggi (*High Sensitivity*) yang meliputi (1) Sawah, dan (2) Palawija, (3) Hortikultura, (6) Kopi, dan (14) Perikanan tangkap. Selain itu, di Kabupaten Sumba Barat Daya juga memiliki serta 1 mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Menengah (*Moderate Sensitivity*) yaitu (36) jasa lainnya. Rincian dan sebaran tingkat sensitivitas dan resiliensi mata

pencaharian penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2. 28 TINGKAT SENSITIVITAS DAN RESILIENSI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024



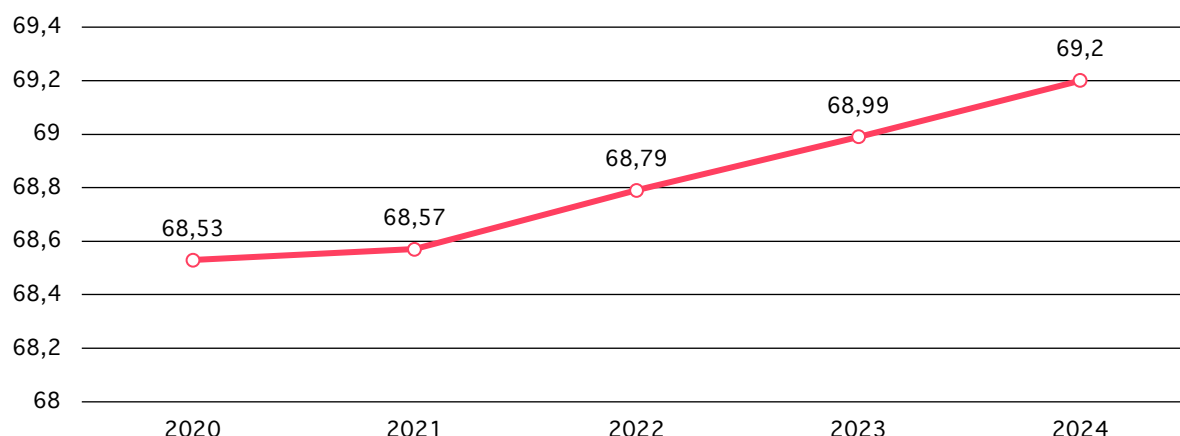
Sumber: WFP Indonesia, 2024

2.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

1. USIA HARAPAN HIDUP

Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 68,53 tahun, dan mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2021 menjadi 68,57 tahun, kemudian meningkat lagi pada 2022 menjadi 68,79 tahun, dan 68,99 tahun pada tahun 2023. Hingga akhirnya, pada tahun 2024, angka usia harapan hidup mencapai 69,20 tahun. Data ini mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum terus membaik, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Peningkatan usia harapan hidup yang terjadi secara berkelanjutan ini menjadi indikator penting dalam pembangunan manusia, serta menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

GAMBAR 2. 29 USIA HARAPAN HIDUP IPM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024

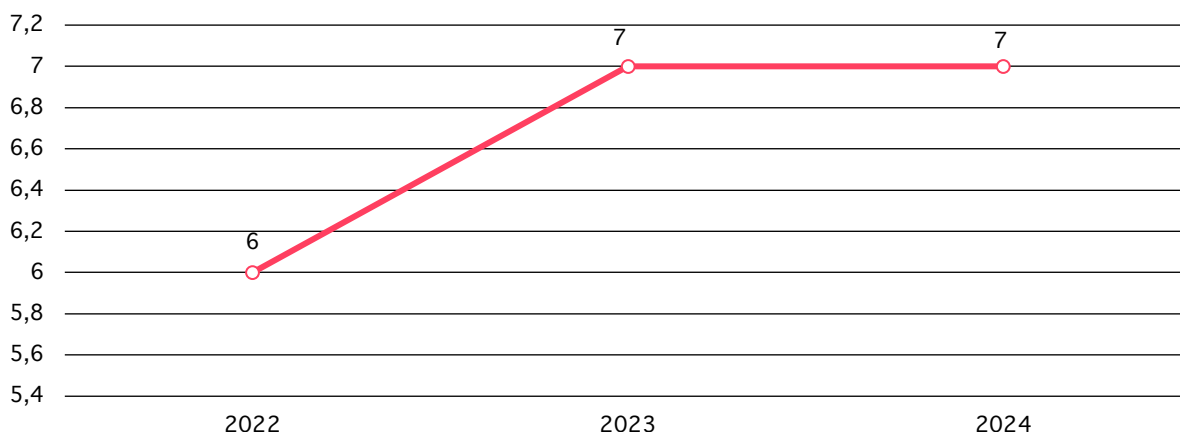


Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

2. ANGKA KEMATIAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami sedikit peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 6 kasus kematian ibu, kemudian mengalami kenaikan menjadi 7 kasus pada tahun 2023, dan tetap berada pada angka yang sama di tahun 2024, yaitu 7 kasus. Meskipun kenaikannya tergolong kecil secara angka absolut, hal ini tetap menjadi perhatian serius, mengingat setiap kasus kematian ibu merupakan kejadian yang berdampak besar terhadap keluarga dan masyarakat. Peningkatan ini menandakan masih adanya tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan ibu, terutama pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Upaya penurunan AKI memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan profesional, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin.

GAMBAR 2. 30 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024



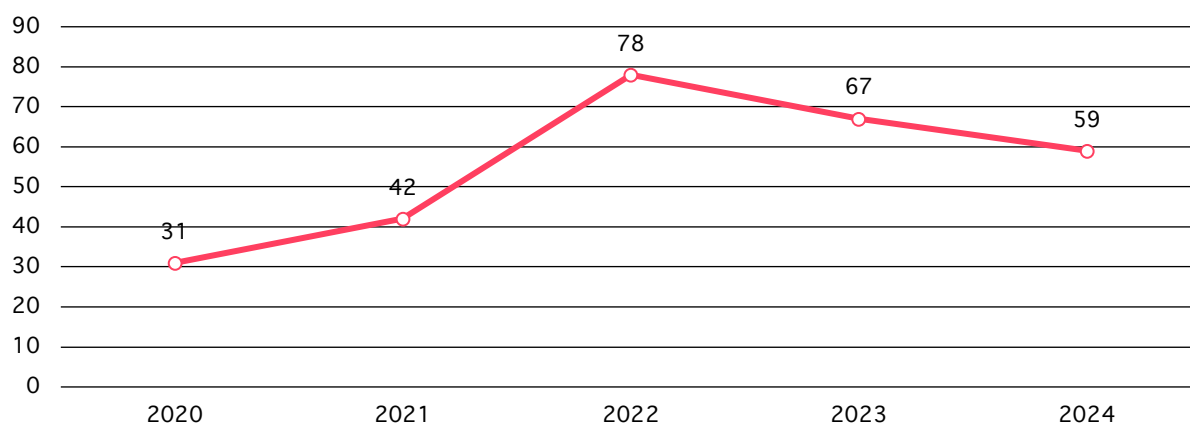
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

3. ANGKA KEMATIAN BAYI

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 31 kasus kematian bayi. Angka ini meningkat menjadi 42 kasus pada tahun 2021, dan melonjak signifikan pada tahun 2022 dengan jumlah 78 kasus dan menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, setelah lonjakan tersebut, tren mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 67 kasus, dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi 59 kasus.

Meskipun terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir, jumlah kematian bayi masih tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian bersama. Fluktuasi angka ini mencerminkan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan kualitas persalinan, perawatan neonatal, gizi, serta pemantauan tumbuh kembang bayi sejak dini. Penurunan angka kematian bayi dalam dua tahun terakhir merupakan langkah positif, namun upaya berkelanjutan tetap diperlukan agar angka ini terus menurun secara signifikan di masa mendatang.

GAMBAR 2. 31 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024.

2.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

1. LITERASI DAN NUMERASI JENJANG SD

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), capaian literasi menunjukkan data yang fluktuasi. Pada tahun 2022, tingkat literasi siswa SD adalah 34,02. Angka ini sedikit meningkat menjadi 34,34 pada tahun 2023, namun kembali mengalami penurunan ke angka 33,39 pada tahun 2024. Penurunan di tahun terakhir ini menjadi perhatian penting yang perlu dengan segera ditindaklanjuti.

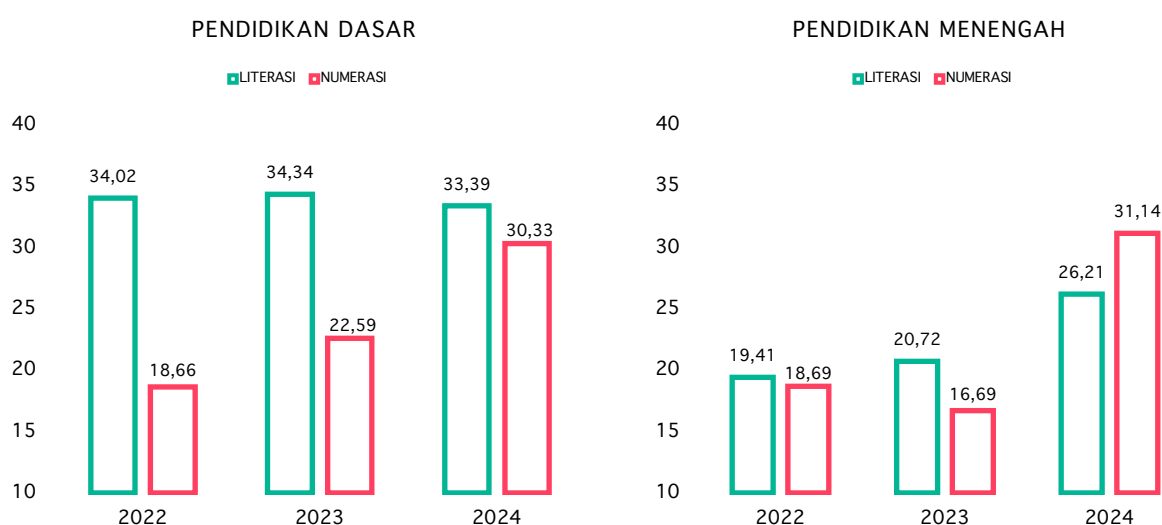
Di sisi lain, kemampuan numerasi siswa SD menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Dimulai dari 18,66 pada tahun 2022, angka numerasi melonjak menjadi 22,59 pada

tahun 2023, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 30,33 pada tahun 2024. Kondisi ini merupakan bentuk perkembangan yang positif dan menandakan adanya perbaikan dalam pemahaman konsep matematika dasar di kalangan siswa SD.

2. LITERASI DAN NUMERASI JENJANG SMP

Situasi serupa, namun dengan pola yang sedikit berbeda, terlihat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemampuan literasi siswa SMP menunjukkan perbaikan yang stabil. Dari 19,41 pada tahun 2022, angka ini naik menjadi 20,70 pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan cukup drastis ke angka 26,21 pada tahun 2024. Peningkatan ini patut diapresiasi dan menunjukkan upaya peningkatan pemahaman teks dan informasi di jenjang SMP. Namun, untuk kemampuan numerasi siswa SMP terjadi dinamika yang menarik. Pada tahun 2022, numerasi berada di angka 18,69 dan angka ini justru menurun ke 16,69 pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan di tahun tersebut. Tetapi di tahun 2024 terjadi lonjakan yang luar biasa hingga mencapai 31,14. Kenaikan drastis di tahun terakhir ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor pendorongnya, tetapi ini adalah indikasi positif bahwa upaya peningkatan numerasi mulai membuahkan hasil signifikan. Secara keseluruhan, data ini menyajikan gambaran bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas literasi dan numerasi di dunia pendidikan. Meskipun ada tren positif pada numerasi SD dan literasi serta numerasi SMP di tahun terakhir, penurunan literasi SD di tahun 2024 memerlukan perhatian khusus. Pencapaian numerasi dan literasi di Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

GAMBAR 2. 32 KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2025

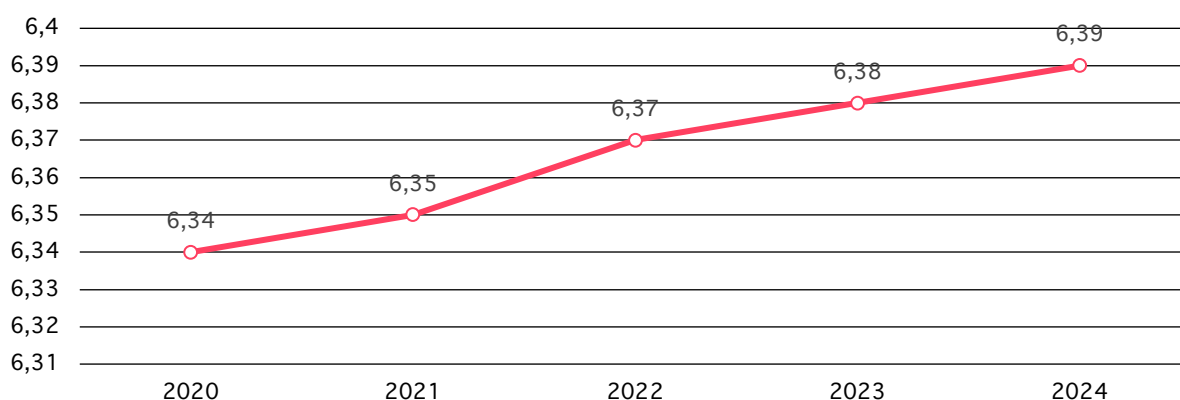
3. RATA – RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, meskipun masih tergolong lambat. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 6,34 tahun, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,35 tahun pada tahun 2021.

Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 menjadi 6,37 tahun, lalu naik kembali menjadi 6,38 tahun pada 2023, dan mencapai 6,39 tahun pada tahun 2024. Data ini mencerminkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan secara bertahap mengalami perbaikan, meskipun rata-rata lama sekolah masih berada di bawah jenjang pendidikan dasar sembilan tahun. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Peningkatan RLS yang stabil ini merupakan sinyal positif, namun perlu ditopang dengan upaya strategis yang lebih agresif agar target pendidikan dasar dan menengah dapat dicapai secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

GAMBAR 2. 33 RATA – RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024

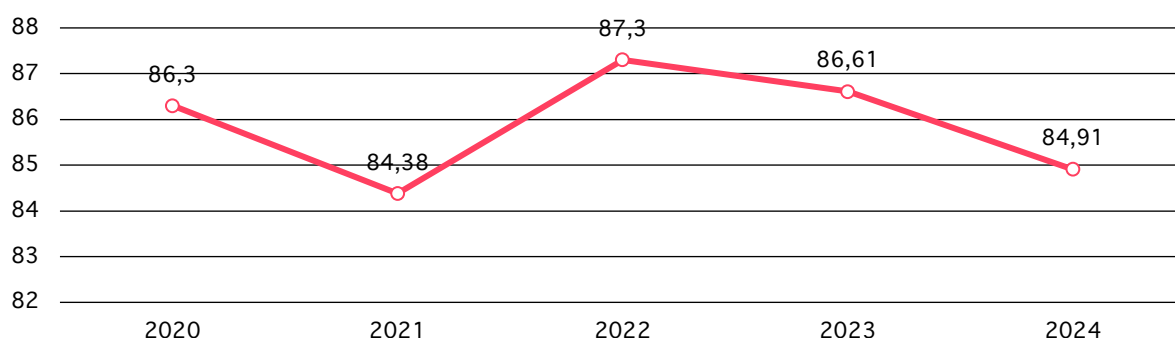


Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

4. ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator krusial yang mencerminkan sejauh mana penduduk suatu daerah memiliki akses dan keterbukaan terhadap pengetahuan. Di Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat tren penurunan Angka Melek Huruf yang patut menjadi perhatian serius. Dari 87,30% pada tahun 2022, Angka Melek Huruf mengalami fluktuasi dan penurunan menjadi 84,91% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam upaya peningkatan literasi di wilayah tersebut. sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 2. 34 ANGKA MELEK HURUF KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024



Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

2.2.4 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

1. SITUS KAMPUNG ADAT

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya resmi menetapkan 14 kampung adat sebagai situs kampung adat yang dilindungi dan dilestarikan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen serius Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjaga kekayaan budaya dan adat istiadat masyarakat asli Kabupaten Sumba Barat Daya yang unik dan sarat nilai-nilai luhur. Penetapan situs kampung adat ini bertujuan utama untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang, seperti gaya arsitektur rumah adat yang khas dengan menara tinggi dan atap menjulang, syair-syair adat yang sarat makna di setiap perhelatan budaya, serta ritual-ritual masyarakat seperti Pasola dan Nyale yang telah menjadi ikon budaya dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap tantangan modernisasi yang berpotensi mengikis identitas budaya masyarakat.

Dengan terjaganya keaslian budaya di 14 kampung adat ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya tidak hanya memiliki kebanggaan akan identitas leluhur mereka, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan sektor pariwisata budaya. Setiap kampung adat menjadi representasi hidup dari nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kini, Kabupaten Sumba Barat Daya telah menjadi sorotan, baik di masyarakat nasional maupun internasional, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menggabungkan keindahan alam yang memukau dengan kekayaan budaya yang otentik. Potensi ini menjadikan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai magnet bagi wisatawan yang haus akan pengalaman budaya yang mendalam dan otentik. Penetapan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun masa depan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan berakar pada jati diri

masyarakat Sumba Barat Daya. Berikut adalah 14 situs kampung adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai situs resmi pelestarian budaya adalah:

TABEL 2. 19 SITUS KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

No.	Nama Situs	Desa	Kecamatan
1	Wee Lewo	Mareda Kalada	Wewewa Timur
2	Manola	Tena Teke	Wewewa Selatan
3	Umbu Koba	Delo	Wewewa Selatan
4	Wanno Maneka	Tena Teke	Wewewa Selatan
5	Bondo Kapumbu	Karuni	Loura
6	Totok Kalada	Totok	Loura
7	Tosi	Wura Homba	Kodi
8	Mbuku Bani	Ate Dalo	Kodi
9	Bongu	Bondo Kodi	Kodi
10	Toda	Wura Homba	Kodi
11	Wainyapu	Wainyapu	Kodi Balaghar
12	Ratenggaro	Umbu Ngedo	Kodi Bangedo
13	Waindimu	Lete loko	Kodi Bangedo
14	Parona Baroro	Lete Loko	Kodi Bangedo

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

2.2.5 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN MASYARAKAT INKLUSIF

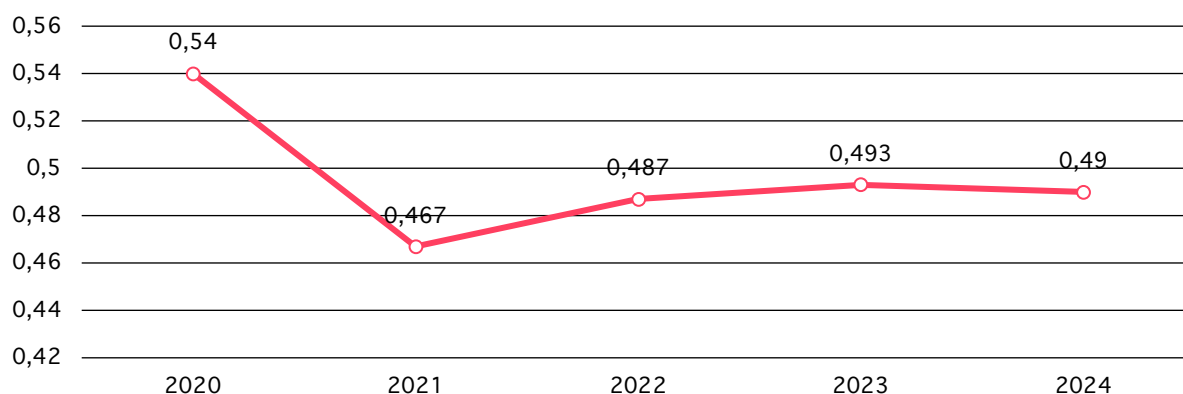
1. INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan fluktuasi capaian selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,540 poin dan mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi. Namun, pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 telah terjadi penurunan secara signifikan menjadi 0,467 poin yang berarti telah ada perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Meski demikian, tren penurunan tersebut tidak berlanjut secara konsisten. Tepatnya pada tahun 2022, IKG kembali mengalami peningkatan menjadi 0,487 poin, lalu sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,493 poin pada tahun 2023 dan pada tahun 2024, nilai IKG sedikit mengalami penurunan menjadi 0,490 poin yang berarti masih menunjukkan ketimpangan gender yang relatif tinggi meskipun ada sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Sumba Barat Daya, namun masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mempercepat pencapaian kesetaraan gender secara berkelanjutan.

Fluktuasi IKG ini juga menandakan bahwa perlunya intervensi kebijakan yang lebih konsisten dan terfokus dalam mendorong partisipasi dan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan di semua sektor.

GAMBAR 2. 35 INDEKS KETIMPANGAN GENDER KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024



Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

2.2.6 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

1. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi ini disebabkan oleh proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala setiap bulannya dengan menggunakan pendekatan *by name by address*. Langkah ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa seluruh bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran serta menyasar individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Sosial berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, dengan tujuan utamanya adalah sebagai berikut :

- Mengurangi angka kemiskinan dan kerentanan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan;
- Memberikan perlindungan sosial yang adil dan menyeluruh, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita, serta korban bencana atau krisis;
- Membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang berbasis pada data yang akurat dan pemantauan rutin.

Beberapa jenis bantuan yang diterima oleh PMKS selama periode ini yaitu :

- Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Penerima Bantuan BNPT/Sembako;
- Penerima Bantuan Iuran PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional);
- Penerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat.

Berikut adalah tabel persentase PMKS dari masing bantuan yang diberikan sepanjang tahun 2021 hingga 2024.

TABEL 2. 20 PERSENTASE PMKS YANG MENERIMA BANTUAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang menerima bantuan (%)				
a. Penerima bantuan PKH (%)	35,49	24,40	27,34	33,53
b. Penerima bantuan BPNT/Sembako (%)	43,84	47,89	68,37	68,72
c. Penerima bantuan Iuran PBI JKN (%)	68,41	91,68	91,36	91,63
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2024 dan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

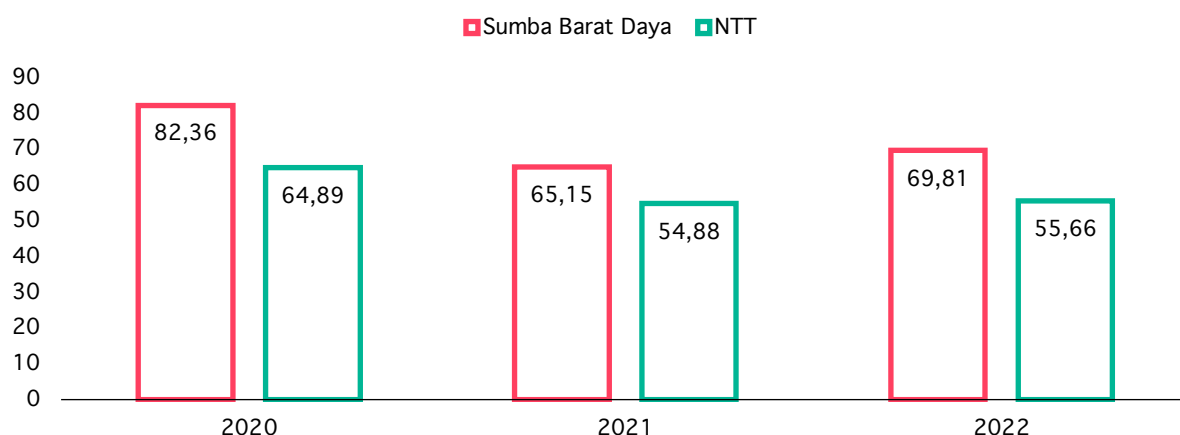
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

1. ANGKA KETERGANTUNGAN

Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Tahun 2020 Angka ketergantungan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 82,36% berada jauh lebih tinggi dibanding Angka ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 64,89%, Angka ketergantungan Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,81%, sementara itu Angka ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami penurunan menjadi sebesar 55,66%

GAMBAR 2. 36 ANGKA KETERGANTUNGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2022



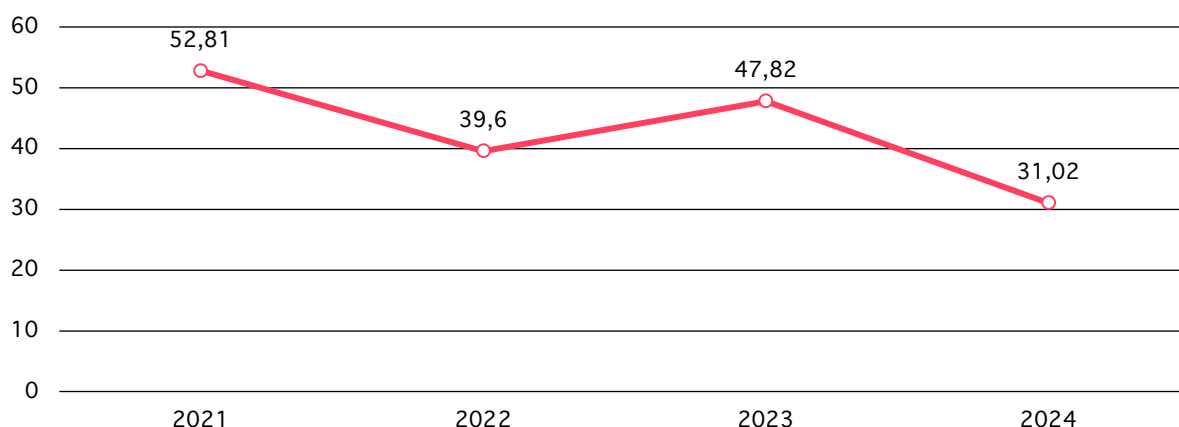
Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

2.3.2 IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

1. INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah tolok ukur penting untuk menilai seberapa inovatif suatu daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Data IID Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan tren umum yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 52,81 poin. Angka ini kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 39,60 poin. Meskipun terjadi sedikit kenaikan di tahun 2023 menjadi 47,82 poin, tren positif ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2024, IID kembali merosot tajam ke angka 31,02 poin yang akhirnya menempatkan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kategori "Kurang Inovatif".

GAMBAR 2. 37 INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024

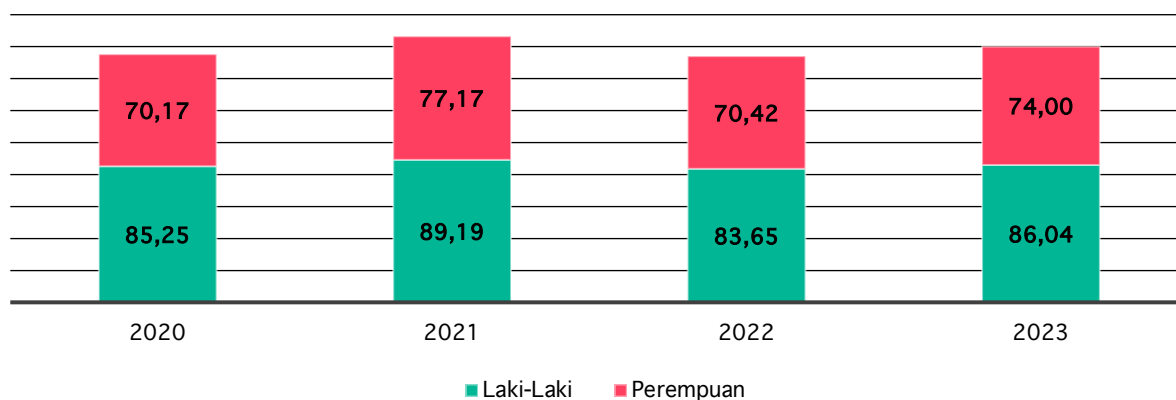


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

2. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (BERUMUR 15 TAHUN KEATAS)

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023 sebesar 86,04 untuk laki-laki dan 74,00 untuk perempuan berdasarkan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas. Gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 2. 38 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KAB. SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2023



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2024

3. PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang ditampilkan dalam kinerja ekonomi suatu wilayah menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri. Semakin besar nilai setiap kategori yang ada menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan pengertian PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan (ADHK) seutuhnya digunakan untuk menunjukkan laju/trend pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap kategori dari tahun ke tahun dalam wilayah tersebut.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha akan membentuk struktur ekonomi yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi setiap lapangan usaha.

TABEL 2. 21 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA MENURUT LAPANGAN USAHA, 2020 S.D 2024

No.	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023	2024
		%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	38,21	39,18	39,93	39,85	38,98
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,99	0,97	0,95	0,95	0,92
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,77	0,75	0,77	0,81	0,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	-0	~0	~0	~0	-0
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,99	4,41	4,31	4,52	4,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13,72	14,17	14,17	14,72	15,07
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,96	1,75	2,49	2,9	3,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,89	9,07	8,93	8,67	8,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,13	2,23	2,26	2,17	2,09
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,55	0	1,5	1,54	1,59
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0	14,90	~0	~0	-0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	16,49	7,88	14,08	13,63	14,26
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,19	2,36	7,47	7,09	6,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,26	0,74	2,32	2,35	2,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,76	0,74	0,73	0,72	0,69
PDRB		100,0	100,0	100,0	100,0	100

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan kinerja yang cukup positif. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) (Tabel 2.20), nilai ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai Rp. 4,9 triliun, meningkat sebesar Rp. 400 miliar dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) (Tabel. 2.20) tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 2,6 triliun atau naik dari Rp. 2,5 triliun pada tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan, mencerminkan bahwa proses pemulihan ekonomi yang masih terus berlangsung setelah dampak pandemi Covid-19

menuju ke arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program dan intervensi pemerintah dalam pemulihan ekonomi, pengendalian pandemi, serta peningkatan aktivitas sosial-ekonomi mulai membuahkan hasil. Sampai dengan saat ini, Perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat bertumpu pada sektor – sektor tradisional dan pelayanan publik. Kontribusi masing – masing sektor terhadap pembentukan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2024 (Tabel 2.21 dan Tabel 2.22) menunjukkan pola yang konsisten dalam lima tahun terakhir (2020 – 2024), dengan urutan kontribusi sebagai berikut:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 38,98%;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,07%; dan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,26%.

Ketiga sektor ini memberikan kontribusi lebih dari dua pertiga terhadap total PDRB, sehingga menjadikannya sektor – sektor kunci dalam penggerak ekonomi daerah. Apabila dilakukan analisis secara mendalam, ketiga sektor tersebut tersebut memiliki daya dorong masing – masing yang dimungkinkan untuk dilakukan akselerasi agar lebih meningkat kontribusinya di tahun – tahun kedepan, berikut adalah hasil analisa ketiga sektor tersebut :

a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sumba Barat Daya dengan kontribusi hampir 39%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor primer. Namun, selama periode 2020 – 2022, sektor ini sempat mengalami pertumbuhan kontribusi yang positif, sebelum kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan kontribusi sektor pertanian dalam dua tahun terakhir sebagian besar disebabkan oleh fenomena cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan perubahan pola musim yang berdampak negatif pada hasil produksi tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat rentan terhadap gangguan iklim dan lingkungan dan oleh karena itu membutuhkan inovasi dan adaptasi dalam sistem produksi dan teknologi pertanian.

b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sebagai sektor terbesar kedua, perdagangan memberikan kontribusi sebesar 15,07% terhadap PDRB ADHB tahun 2024. Tingginya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jual beli dan jasa terus berkembang yang didukung oleh mulai membaiknya daya beli masyarakat, peningkatan mobilitas, dan pertumbuhan pusat – pusat ekonomi lokal. Kehadiran pasar – pasar rakyat, toko modern, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut memperkuat struktur ekonomi daerah di sektor ini. Perdagangan juga berperan penting dalam menjaga sirkulasi barang dan uang di wilayah pedesaan dan perkotaan.

c. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kontribusi sebesar 14,26% dari sektor ini mencerminkan bahwa peran belanja pemerintah dan layanan publik masih sangat besar dalam menopang ekonomi daerah. Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi penggerak perputaran uang di wilayah-wilayah yang belum banyak terjangkau oleh sektor swasta. Belanja operasional pemerintahan, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan pelayanan publik lainnya menjadi instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian di Kabupaten Sumba Barat Daya relatif stabil namun masih sangat terpusat pada sektor – sektor tradisional dan pemerintahan. Ketergantungan tinggi pada sektor primer seperti pertanian, serta sektor belanja publik telah mencerminkan perlunya diversifikasi ekonomi. Selain sektor utama yang disebutkan, sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan juga mulai menunjukkan kontribusi yang konsisten dan menandakan potensi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, kontribusi sektor industri pengolahan dan pariwisata masih relatif kecil, padahal sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

- Diversifikasi sektor ekonomi, dengan mendorong pertumbuhan sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa modern dan pariwisata);
- Peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi, perbaikan irigasi, dan perlindungan terhadap risiko iklim;
- Pemberdayaan UMKM dan koperasi, terutama di sektor perdagangan dan jasa;
- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk menghadapi tantangan pasar kerja masa depan;
- Digitalisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur komunikasi untuk mendukung ekonomi berbasis informasi.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang positif, dengan dominasi sektor pertanian, perdagangan, dan pemerintahan. Meskipun demikian, struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor – sektor tertentu menunjukkan perlunya transformasi ekonomi ke arah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Pemulihan pasca pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong reformasi struktural ekonomi daerah, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

TABEL 2. 22 PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020 - 2024 (MILIAR RUPIAH)

Bidang Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.440,16	38,21	1.523,38	39,18	1.667,90	39,93	1.794,86	39,79	1.921,44	38,98
Pertambangan dan Penggalian	37,39	0,99	37,55	0,97	39,79	0,95	42,71	0,95	45,13	0,92
Industri pengolahan	28,86	0,77	28,97	0,75	32,03	0,77	36,35	0,81	42,00	0,85
Pengadaan Listrik dan Gas	1,45	0,04	1,55	0,04	1,71	0,04	1,96	0,04	2,22	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,01	0,25	~0	0,26	~0	0,27	~0	0,30	-0
Konstruksi	150,51	3,99	171,37	4,41	180,07	4,31	203,47	4,52	217,70	4,42
Perdagangan Besar & Eceran;Reparasi Mobil & Sepeda Motor	517,28	13,72	550,98	14,17	591,87	14,17	663,47	14,73	742,98	15,07
Transportasi dan Pegudangan	73,76	1,96	68,22	1,75	103,97	2,49	130,67	2,9	163,19	3,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	0,03	1,20	0,03	1,49	0,04	1,70	0,04	2,15	0,04
Informasi dan Komunikasi	335,09	8,89	352,75	9,07	372,85	8,93	390,48	8,68	416,88	8,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	80,40	2,13	86,79	2,23	94,41	2,26	97,54	2,17	103,19	2,09
Real Estate	58,48	1,55	58,59	1,51	62,51	1,5	69,19	1,54	78,24	1,59
Jasa Perusahaan	0,16	0	0,15	~0	0,17	~0	0,18	~0	0,20	-0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	621,57	16,49	579,42	14,9	588	14,08	614,03	13,65	702,89	14,26
Jasa Pendidikan	308,57	8,19	306,45	7,88	312,10	7,47	319,20	7,09	339,52	6,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,35	2,26	91,65	2,36	97,07	2,32	105,94	2,35	117,82	2,39
R,S,T,U - Jasa lainnya	28,71	0,76	28,82	0,74	30,61	0,73	32,53	0,72	34,00	0,69
PDRB	3.769,10	100,00	3.888,12	100,00	4.176,82	100,00	4.929,85	99,99	4.929,85	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

TABEL 2. 23 PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020 - 2024 (MILIAR RUPIAH)

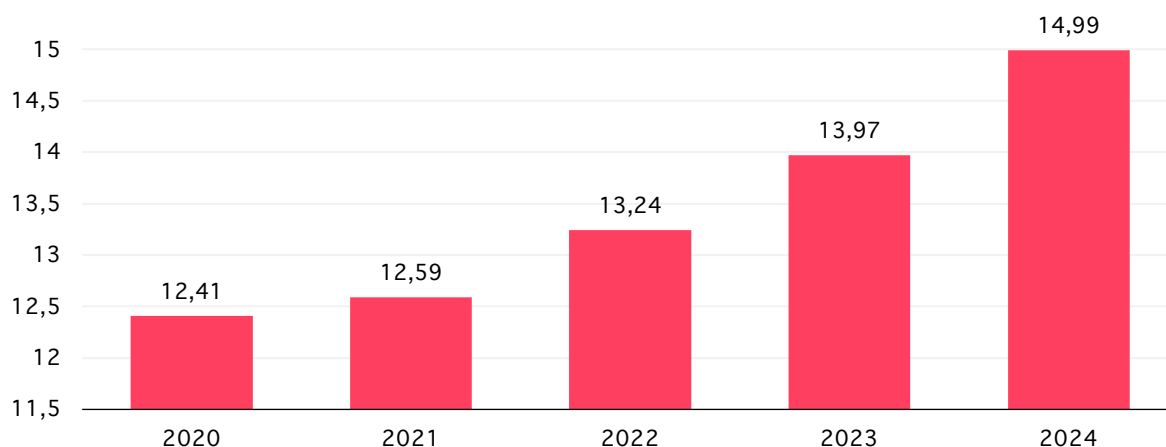
Bidang Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	924,52	38,21	970,41	39,18	1.016,80	39,93	1.040,99	39,85	1.045,14	38,98
Pertambangan dan Penggalian	21,93	0,99	21,93	0,97	22,53	0,95	23,43	0,95	24,83	0,92
Industri pengolahan	14,96	0,77	14,89	0,75	16,23	0,77	17,27	0,81	18,77	0,85
Pengadaan Listrik dan Gas	1,00	0,04	1,05	0,04	1,10	0,04	1,23	0,04	1,39	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,19	-0	0,19	-0	0,20	-0	0,21	-0	0,22	-0
Konstruksi	98,79	3,99	107,56	4,41	107,67	4,31	117,71	4,52	123,42	4,42
Perdagangan Besar & Eceran;Reparasi Mobil & Sepeda Motor	265,72	13,72	273,42	14,17	282,83	14,17	298,69	14,72	321,42	15,07
Transportasi dan Pegudangan	42,24	1,96	39,83	1,75	51,11	2,49	54,96	2,90	64,02	3,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,03	0,64	0,03	0,79	0,04	0,87	0,04	1,08	0,04
Informasi dan Komunikasi	288,04	8,89	301,27	9,07	317,10	8,93	329,87	8,67	344,32	8,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	50,73	2,13	52,31	2,23	52,43	2,26	53,08	2,17	55,07	2,09
Real Estate	45,66	1,55	46,06	-0	46,63	1,50	48,22	1,54	50,10	1,59
Jasa Perusahaan	0,11	-0	0,09	14,90	0,10	-0	0,11	-0	0,11	-0
Administrasi Pemerintahan Pertahanan & Jaminan Sosila Wajib	340,49	16,49	313,54	7,88	316,46	14,08	318,49	13,63	346,00	14,26
Jasa Pendidikan	151,31	8,19	148,56	2,36	148,23	7,47	147,22	7,09	152,07	6,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,27	2,26	47,96	0,74	49,60	2,32	51,66	2,35	54,76	2,39
R,S,T,U - Jasa lainnya	15,67	0,76	15,61	0,75	16,60	0,73	16,60	0,72	17,21	0,69
PDRB	2.307,21	100,00	2.355,32	100,00	2.520,61	100,00	2.520,61	100,00	2.619,83	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

4. PDRB PER KAPITA

Secara umum Produk Domestik Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan tren positif dalam kurun periode 2020 – 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 12,41 (juta rupiah). Angka ini kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 14,99 (juta rupiah) pada tahun 2024. Kenaikan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa rata – rata pendapatan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya secara nominal mengalami peningkatan. Sehingga secara keseluruhan, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sumba Barat Daya dari 12,41 (juta rupiah) pada tahun 2020 menjadi 14,99 (juta rupiah) pada tahun 2024 menjadi indikator yang kuat dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya dan potensi pembangunan yang terus berlanjut. Gambaran perkembangan PDRB ADHB per kapita di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2. 39 PERKEMBANGAN PDRB ADHB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2024



Sumber : Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

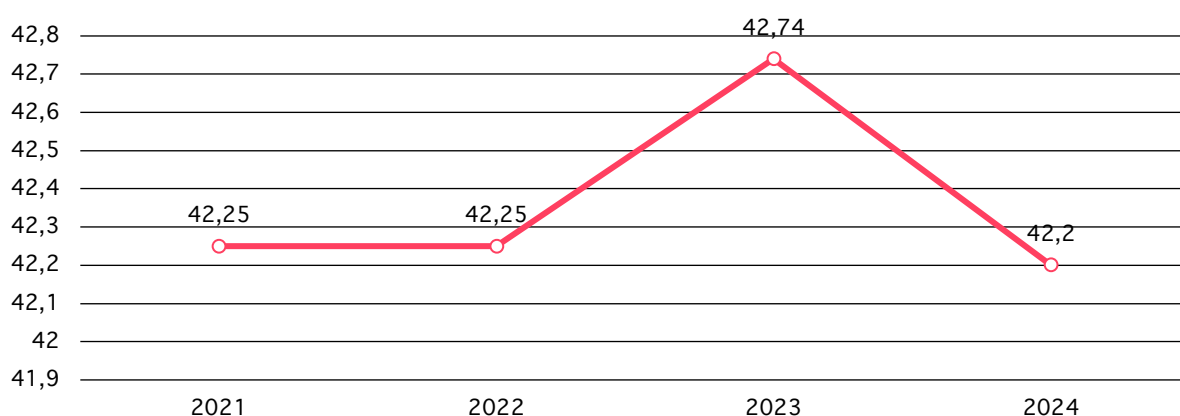
2.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

1. INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan dinamika yang relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai IKTL tercatat sebesar 42,25 poin, yang mencerminkan kondisi tutupan lahan yang tidak mengalami perubahan signifikan selama dua tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 42,74 poin, yang dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas tutupan lahan, seperti peningkatan vegetasi atau pengurangan lahan

terbuka. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama, hingga tepatnya pada tahun 2024 nilai IKTL justru mengalami penurunan menjadi 42,20 poin yang menandakan penurunan kualitas tutupan lahan yang perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, nilai IKTL di Kabupaten Sumba Barat Daya masih berada pada kisaran yang cukup rendah dan menunjukkan bahwa upaya pelestarian serta rehabilitasi lahan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar kualitas lingkungan dapat terjaga dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan ekosistem.

GAMBAR 2. 40 INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 – 2024



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup RI Tahun 2025

2.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

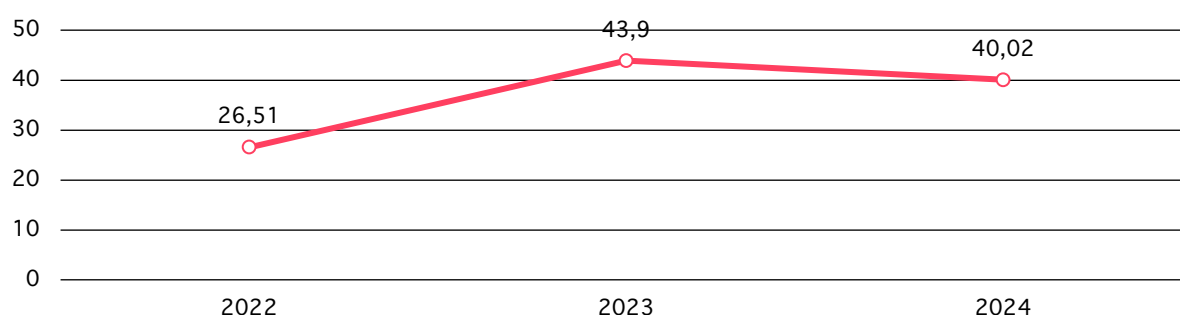
1. INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks ini tercatat sebesar 26,51 poin yang mencerminkan masih rendahnya tingkat literasi dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan masyarakat saat itu. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan yang cukup tajam menjadi 43,90 poin, sehingga menandakan adanya peningkatan akses, keterampilan digital, serta penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun pada tahun 2024 angka indeks ini sedikit menurun menjadi 40,02 poin, namun secara umum tingkat digitalisasi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya tetap berada pada kategori “cukup”. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital mulai merambah ke berbagai lini aktivitas masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, layanan publik, pertanian, perdagangan, hingga komunikasi sehari-hari.

Kenaikan signifikan pada tahun 2023 dapat diasosiasikan dengan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, program literasi digital, serta tumbuhnya pemanfaatan media sosial dan platform digital oleh pelaku UMKM dan generasi muda. Sementara penurunan di tahun 2024 menjadi sinyal perlunya peningkatan kesinambungan program digitalisasi, khususnya dalam

hal pemerataan akses internet di wilayah pedesaan serta pelatihan literasi digital yang lebih masif dan inklusif. Secara keseluruhan, capaian ini merupakan fondasi yang penting untuk mendorong pembangunan berbasis digital yang lebih kuat di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan dapat terus memperkuat ekosistem digital agar indeks ini tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

GAMBAR 2. 41 INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 - 2024



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI Tahun 2025

2.3.5 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

1. PDRB ADHB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

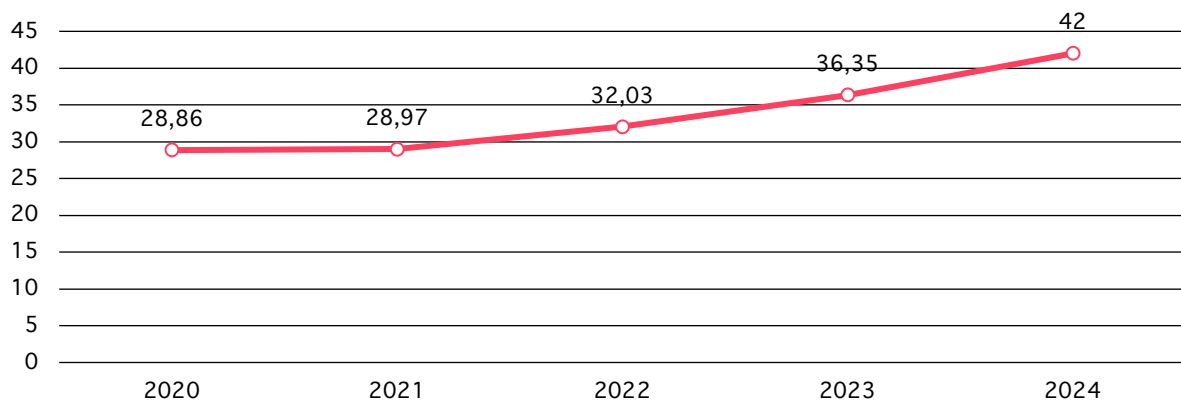
Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), sektor ini mengalami peningkatan nilai tambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB sektor industri pengolahan tercatat sebesar Rp. 28,86 miliar. Angka ini kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp. 28,97 miliar dan terus bertumbuh pada tahun 2022 hingga mencapai Rp. 32,03 miliar. Pertumbuhan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai mencapai Rp. 36,35 miliar dan pada tahun 2024 melonjak menjadi Rp. 42 miliar. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan struktur ekonomi daerah serta tumbuhnya aktivitas industri pengolahan, terutama yang berbasis pada potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Beberapa faktor yang turut mendorong pertumbuhan sektor ini antara lain:

- Pengembangan industri rumah tangga dan UMKM, khususnya pengolahan hasil pertanian seperti jagung, kopi, dan hasil ternak;
- Peningkatan akses infrastruktur yang menunjang distribusi dan konektivitas antarwilayah;
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui pelatihan, fasilitasi perizinan, serta pembukaan akses pasar;

- Masuknya investasi dan kerja sama dengan sektor swasta, yang memperkuat kapasitas produksi dan pengolahan lokal.

Secara umum, pertumbuhan sektor industri pengolahan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya mulai menapaki proses transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder yang lebih berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk lokal. Ke depannya, penguatan sektor ini menjadi krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

GAMBAR 2. 42 PDRB ADHB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

2.3.6 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

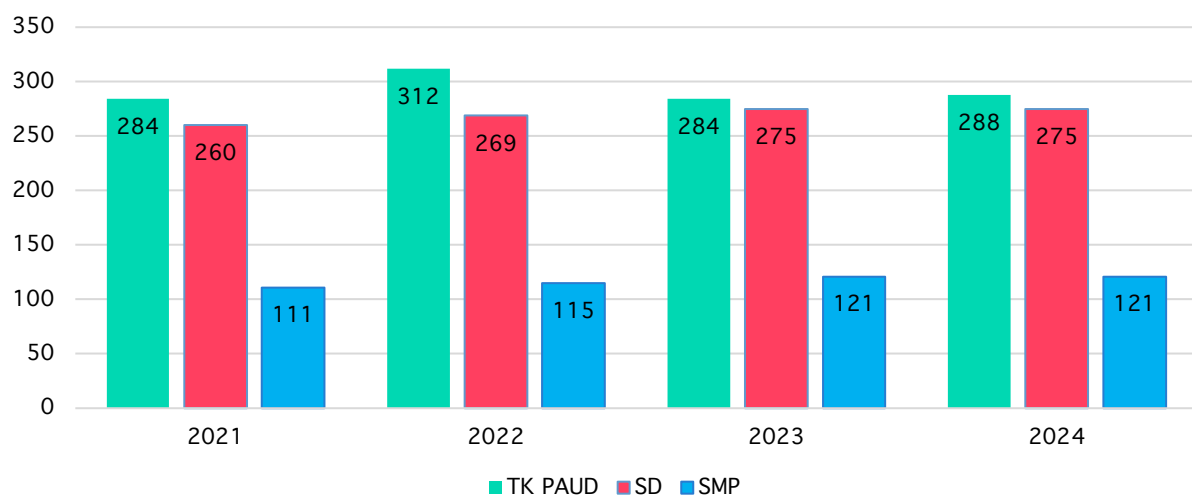
1. INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan tujuan utama untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan mendekatkan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Upaya ini terlihat dari dinamika jumlah sekolah yang beroperasi dari tahun 2021 hingga 2024.

Pada awal periode, yaitu tahun 2021 dan 2022, terlihat adanya peningkatan jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beroperasi. Tercatat 260 SD di tahun 2021 yang kemudian naik menjadi 269 SD di tahun 2022. Demikian pula dengan SMP, dari 111 sekolah di tahun 2021 meningkat menjadi 115 sekolah di tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pendidikan dasar dan menengah. Pembukaan sekolah baru atau peningkatan status sekolah di daerah terpencil menjadi salah satu faktor pendorongnya. Namun, momentum peningkatan ini tampaknya melambat pada tahun 2023 dan 2024. Data menunjukkan stagnasi jumlah SD dan SMP yang beroperasi pada periode tersebut bisa menjadi indikasi bahwa upaya ekspansi fisik sekolah mulai mencapai titik jenuh, atau mungkin ada pergeseran fokus pada peningkatan kualitas dan pemeliharaan fasilitas

yang sudah ada atau bukan lagi penambahan unit sekolah baru. Berbeda dengan SD dan SMP, jumlah Taman Kanak – kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beroperasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan patut diapresiasi terutama dengan adanya penambahan SD dan SMP. Namun, tantangan berupa stagnasi jumlah sekolah dasar dan menengah, serta fluktuasi pada TK/PAUD, menunjukkan bahwa pemenuhan akses dan kualitas pendidikan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan strategi adaptif. Detail data disajikan pada tabel di bawah ini. Detail data disajikan pada grafik di bawah ini.

GAMBAR 2. 43 DATA SEKOLAH TK PAUD, SD, SMP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumba Barat Daya, 2024

2. INFRASTRUKTUR JALAN

Berdasarkan data infrastruktur jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2021 hingga 2023, diketahui bahwa total panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya mencakup tiga jenis permukaan jalan, yaitu jalan beraspal, jalan berkerikil, dan jalan tanah. Selama periode tersebut, panjang jalan beraspal tercatat mencapai 802,54 km, jalan berkerikil sepanjang 248,3 km, dan jalan tanah sepanjang 85,46 km.

Meskipun secara fisik jaringan jalan menunjukkan panjang yang signifikan, tetapi kondisi jalan mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat mencapai 732,41 km. Namun, pada tahun 2022 turun menjadi 692,94 km dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 651,76 km.

Penurunan kualitas jalan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya, meskipun secara total jaringan

jalan telah terbangun cukup luas. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur guna menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Berikut adalah data terkait Panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 hingga 2023.

GAMBAR 2. 44 DATA JALAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020 S.D 2023



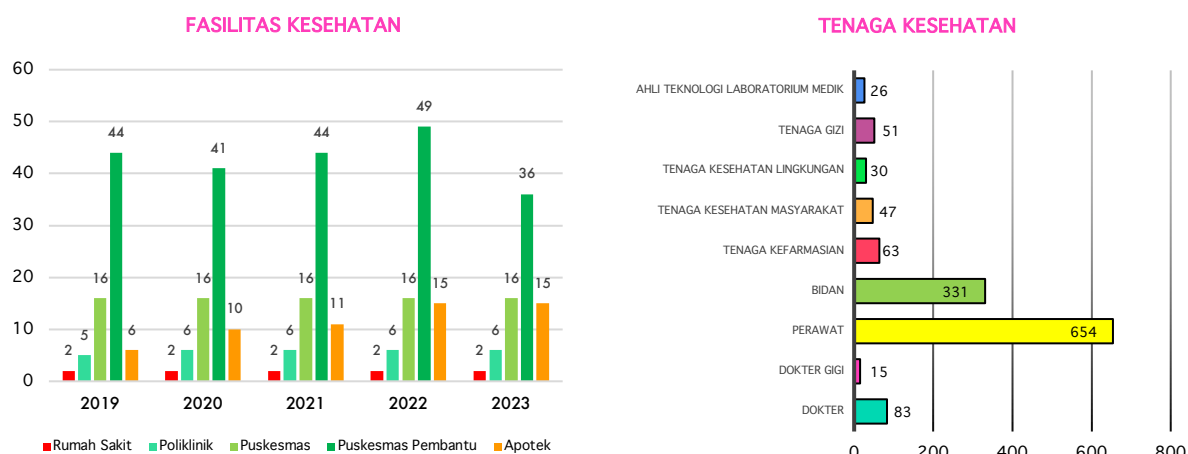
Sumber : Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025.

3. Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan wilayah secara keseluruhan. Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan posyandu, menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis. Hal ini sangat penting di daerah-daerah terpencil di Sumba Barat Daya, di mana akses ke layanan kesehatan sering kali terbatas. Pada tahun 2023 terdapat 16 Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan dan 1 Rumah Sakit di Kota Tambolaka. Selain itu, pemerintah juga berupaya

untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Rincian terkait fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

GAMBAR 2. 45 DATA FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 S.D 2023 DAN DATA TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

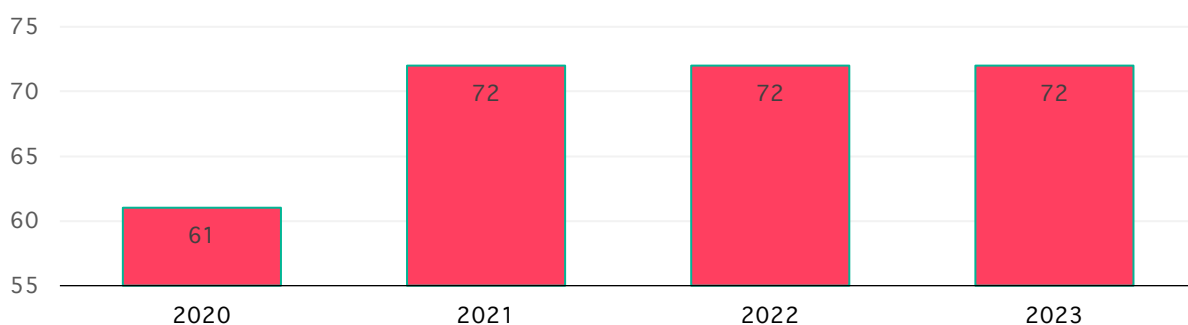


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

4. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

Laju perubahan akibat dari globalisasi tidak dapat dihindari, sehingga membuat semua sendi kehidupan untuk berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut untuk tetap terus bertahan. Infrastruktur komunikasi dan informasi menjadi sarana dan prasarana yang berkontribusi dalam perubahan dan perkembangan zaman. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2023, penetrasi layanan telekomunikasi di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami peningkatan pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 61% naik menjadi 72%, namun terjadi stagnasi layanan telekomunikasi dari tahun 2021 hingga 2023 yaitu dikisaran 72%. Cakupan layanan telekomunikasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi titik blind spot dan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal literasi digital.

GAMBAR 2. 46 DATA CAKUPAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

2.3.7 STABILITAS EKONOMI MAKRO

1. TAX RATIO TERHADAP PDRB

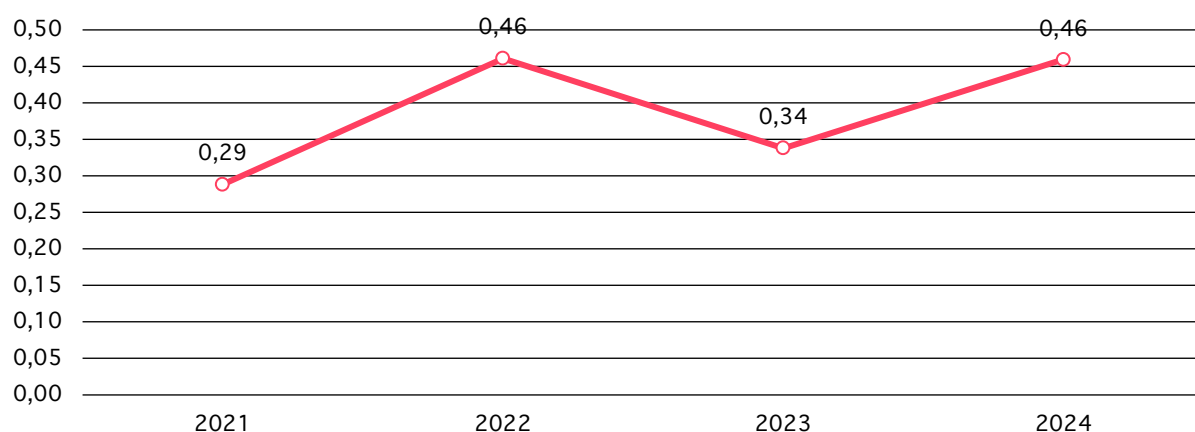
Perkembangan tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam periode tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup variatif. Pada tahun 2021, tax ratio tercatat sebesar 0,29 persen, yang mencerminkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB yang masih relatif rendah.

Sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan menunjukkan hasilnya pada tahun 2022, di mana tax ratio meningkat signifikan menjadi 0,46 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,34 persen yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan tantangan dalam pemungutan pajak daerah.

Meskipun demikian, pada tahun 2024 tax ratio kembali meningkat ke angka 0,46 persen dan hasil ini sekaligus menunjukkan adanya pemulihan serta penguatan dalam kebijakan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perpajakan. Konsistensi peningkatan tax ratio ini menjadi indikator penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kedepannya, stabilitas dan pertumbuhan tax ratio diharapkan terus ditingkatkan melalui ekstensifikasi basis pajak, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

GAMBAR 2. 47 TAX RATIO TERHADAP PDRB DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2024



Sumber : Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

2. PENANAMAN MODAL

Selama periode 2021 hingga 2023, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai investasi maupun jumlah proyek yang terealisasi. Pada tahun 2021, nilai investasi PMA tercatat sebesar Rp. 20,18 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 16. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai investasi menjadi Rp. 8,36 miliar, jumlah proyek justru meningkat menjadi 25 proyek, sehingga menunjukkan adanya diversifikasi atau perluasan minat investor asing pada skala proyek yang lebih kecil atau tersebar. Pada tahun 2023 mencatatkan kinerja yang lebih positif dari tahun 2021 dan 2022 dengan nilai investasi PMA yang melonjak tajam menjadi Rp. 29,75 miliar, serta bertambahnya jumlah proyek yang meningkat secara signifikan menjadi 34 proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya semakin menguat dan dapat dilihat dengan peningkatan kegiatan investasi secara kuantitas maupun kualitas.

Secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan nilai pada tahun 2022, tren realisasi proyek PMA menunjukkan kearah yang positif, dengan pertumbuhan proyek yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan gambaran optimistis terhadap iklim investasi asing yang semakin kondusif di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sedangkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan baik dari sisi nilai investasi maupun jumlah proyek. Pada tahun 2021, nilai investasi PMDN mencapai Rp. 133,21 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 104 dan menjadi capaian tertinggi selama periode tersebut. Tentunya hal ini menandakan bahwa tingginya minat investor dalam negeri terhadap peluang usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun tersebut.

Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai investasi menjadi Rp. 83,33 miliar dengan jumlah proyek yang juga menurun menjadi 79. Tren ini berlanjut terus di tahun 2023, di mana nilai investasi kembali turun menjadi Rp. 58,83 miliar dan disertai dengan penurunan jumlah proyek menjadi hanya 34 proyek. Penurunan yang konsisten selama tiga tahun terakhir ini mencerminkan adanya tantangan yang perlu segera direspons, baik dalam hal perbaikan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, maupun peningkatan daya tarik sektor-sektor prioritas bagi investor dalam negeri. Sehingga upaya strategis perlu dilakukan untuk membalikkan tren ini dan mendorong kembali partisipasi aktif investor domestik dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya.

TABEL 2. 24 NILAI INVESTASI DAN JUMLAH PROYEK PENANAMAN MODAL ASING DAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 S.D 2023

Komponen Penanaman Modal	2021	2022	2023
Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)Investasi (Rp)	20.181.048.335	8.363.611.000	29.749.449.709
Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Proyek	16	25	34
Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMDN) Investasi (Rp)	133.209.396.967	83.334.000.000	58.830.487.955
Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMDN) Proyek	104	79	34

Sumber : BPS Prov. NTT, 2024

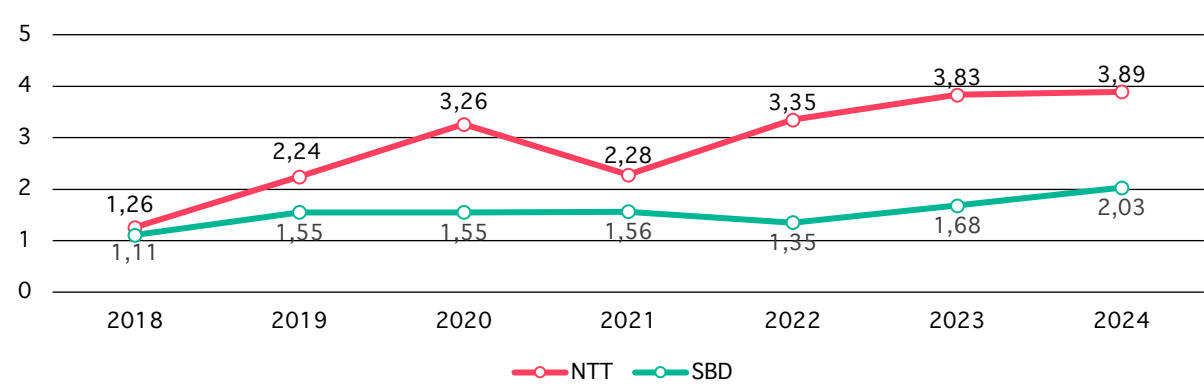
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

1. INDEKS SPBE

Pada tahun 2018, Indeks SPBE di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 1,11. Indeks ini telah merefleksikan tahap awal adaptasi terhadap SPBE di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hingga enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2024 telah terjadi peningkatan indeks SPBE yang sangat signifikan hingga mencapai 2,03. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPBE. Dengan capaian Indeks SPBE sebesar 2,03 pada tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini berada dalam kategori indeks 1,8 - <2,6 yang masuk dalam predikat *kurang*. Namun, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital di Kabupaten Sumba Barat Daya masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai standar pelayanan publik yang lebih optimal.

GAMBAR 2. 48 INDEKS SPBE KAB. SUMBA BARAT DAYA DAN PROV. NTT TAHUN 2018 S.D 2024



Sumber: Kementerian PANRB, 2024

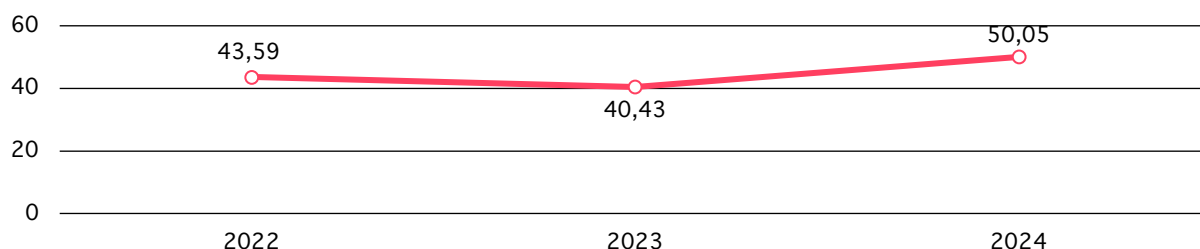
2. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rentang tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022, Kabupaten Sumba Barat Daya memperoleh nilai SAKIP sebesar 43,59 dengan predikat kinerja *kurang*. Kondisi ini bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023, dengan nilai yang turun lagi menjadi 40,43 dan tetap berada pada predikat kinerja *kurang*.

Namun memasuki tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mulai melakukan pembenahan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Sehingga upaya perbaikan tersebut membuahkan hasil, di mana pada tahun 2024 nilai SAKIP meningkat signifikan menjadi 50,05 dengan predikat kinerja *cukup*. Capaian ini menjadi indikasi positif bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mulai bergerak ke arah peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Perbaikan ini diharapkan menjadi momentum berkelanjutan dalam memperkuat budaya kinerja, efektivitas perencanaan, serta efisiensi penggunaan anggaran demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik.

GAMBAR 2. 49 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 S.D 2024

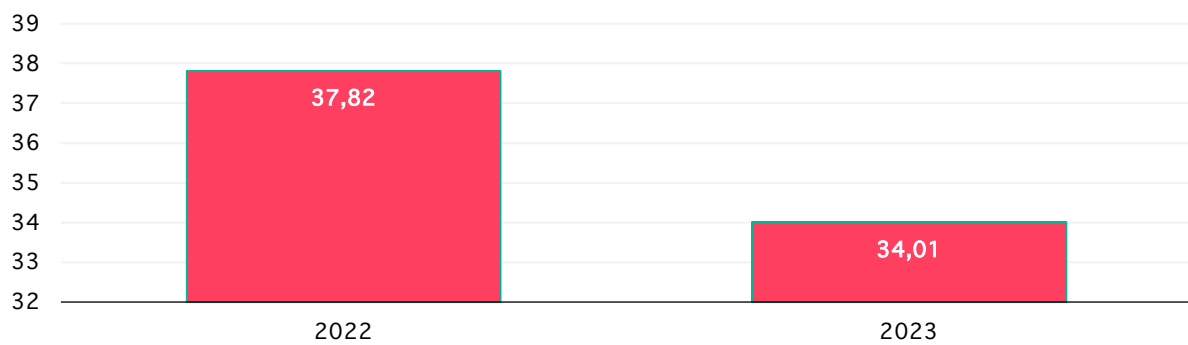


Sumber: Bagian Organisasi pada Setda Sumba Barat Daya Tahun 2025

3. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Evaluasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023 adalah 34,01 dengan kategori "C".

GAMBAR 2. 50 INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 - 2023



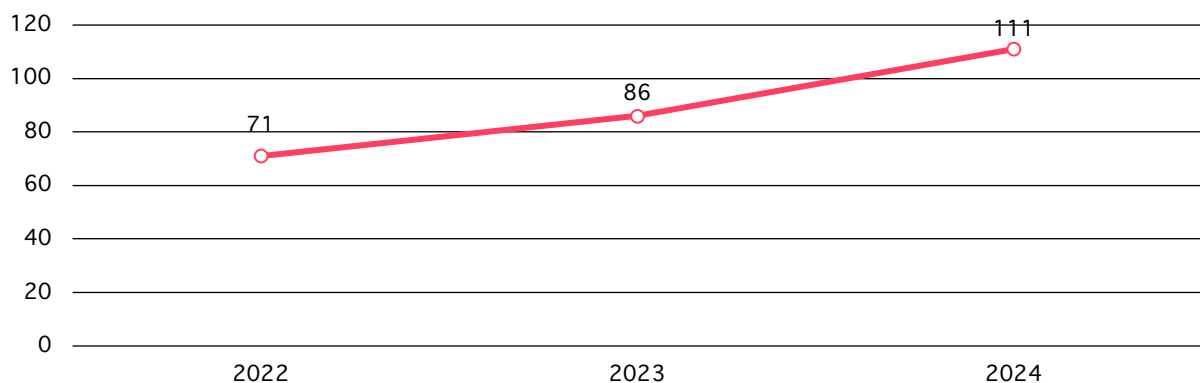
Sumber: Kementerian PANRB, 2024

2.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

1. RISIKO PENDUDUK TERJADI TINDAK PIDANA PER 100.000

Pada tahun 2024, risiko penduduk yang mengalami tindak pidana di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 111 kasus per 100.000 penduduk dan mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Khususnya dimulai pada tahun 2022, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 71 kasus, kemudian meningkat menjadi 86 kasus pada tahun 2023 dan kembali naik signifikan pada tahun 2024. Peningkatan ini harus menjadi perhatian serius karena mencerminkan menurunnya tingkat keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap tindak kriminal. Kondisi ini menuntut langkah-langkah strategis dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan, memperluas program pencegahan kejahatan, serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat guna menekan angka kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

GAMBAR 2. 51 RISIKO PENDUDUK TERJADI TINDAK PIDANA PER 100.000 TAHUN 2022 - 2024



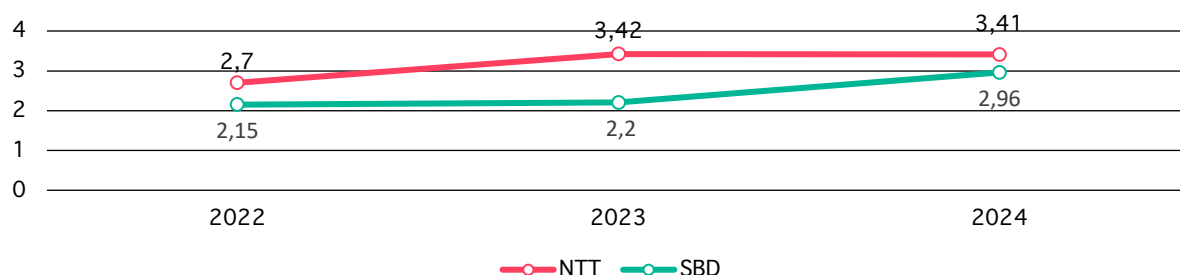
Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2025

2.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

1. INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah salah satu indikator kunci untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan peningkatan IDSD yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IDSD Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 2,15 poin. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,20 poin pada tahun 2023 dan melonjak drastis hingga mencapai 2,96 poin pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan adanya upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong daya saing wilayah. Namun, meskipun terjadi peningkatan yang menggembirakan, posisi Kabupaten Sumba Barat Daya masih berada di bawah rata – rata Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai perbandingan, IDSD Provinsi NTT pada tahun 2022 adalah 2,70 poin, kemudian meningkat menjadi 3,42 poin pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 3,41 poin pada tahun 2024. Perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan di tingkat kabupaten, masih ada kesenjangan yang perlu diatasi untuk menyamai atau bahkan melampaui rata – rata provinsi. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya masih memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan daya saingnya di berbagai sektor. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan Indeks Daya Saing Daerahnya dan berkontribusi lebih besar pada kemajuan Provinsi NTT secara keseluruhan. Berikut adalah tabel grafik IDSD :

GAMBAR 2. 52 INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 - 2024



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.4.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. URUSAN WAJIB

a) BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat baru mampu menyelesaikan pendidikan dasar, khususnya hingga tingkat

sekolah dasar atau awal sekolah menengah pertama. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya serius untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan agar masyarakat dapat menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas bahkan pendidikan tinggi. Harapan terhadap peningkatan kualitas pendidikan terlihat dari proyeksi lama sekolah anak-anak yang kini masuk sekolah, di mana mereka diperkirakan mampu menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas. Hal ini memberi sinyal positif, tetapi tetap membutuhkan intervensi program yang konsisten.

b) BIDANG KESEHATAN

Indikator derajat kesehatan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup, yang ditandai dengan harapan hidup masyarakat hingga usia lanjut. Walaupun demikian, tantangan kesehatan seperti akses terhadap layanan medis, ketersediaan tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan masih perlu terus ditingkatkan. Upaya promotif dan preventif harus lebih diperkuat, di samping layanan kuratif, agar kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

c) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Infrastruktur jalan di berbagai wilayah masih memerlukan perbaikan dan pembangunan baru untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Tata ruang wilayah juga perlu diperkuat agar pembangunan berjalan lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi serta pemukiman. Infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar arus barang, serta meningkatkan pelayanan publik.

d) BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Permasalahan rumah tidak layak huni masih ditemukan di berbagai lokasi, sehingga program peningkatan kualitas rumah dan penataan kawasan permukiman menjadi kebutuhan mendesak. Upaya penyediaan rumah layak huni dan pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

e) BIDANG SOSIAL

Pelayanan sosial diarahkan untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan, seperti anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dukungan terhadap kelompok ini masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kelembagaan, kebijakan, maupun sarana pelayanan.

f) BIDANG TENAGA KERJA

Ketersediaan lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan besar. Pembangunan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja. Hal ini penting agar tingkat pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat produktif meningkat.

g) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peran perempuan dalam pembangunan semakin terlihat, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya maupun kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik. Perlindungan anak juga menjadi isu penting, terutama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak serta pemenuhan hak-hak dasar anak.

h) BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kondisi keamanan wilayah relatif kondusif, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, sarana, dan kapasitas aparaturnya dalam menegakkan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

i) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi lingkungan menghadapi tantangan serius berupa kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lahan, dan pencemaran. Program pembangunan diarahkan untuk memperkuat konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta rehabilitasi lingkungan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.

j) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan administrasi kependudukan semakin membaik, ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana pelayanan, keterjangkauan wilayah terpencil, serta akurasi data yang perlu terus diperbaiki.

k) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program keluarga berencana terus dijalankan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga. Tantangan yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat dalam mengikuti program KB serta keterbatasan sarana pelayanan.

l) BIDANG PERHUBUNGAN

Ketersediaan infrastruktur transportasi, baik darat maupun laut, masih belum merata. Kondisi jalan yang belum memadai dan keterbatasan moda transportasi laut menyebabkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang belum optimal. Peningkatan aksesibilitas transportasi menjadi prioritas pembangunan ke depan.

m) BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif bagi masyarakat, meskipun akses internet dan jaringan komunikasi belum sepenuhnya merata. Program pembangunan diarahkan untuk memperluas cakupan layanan komunikasi, meningkatkan literasi digital, serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

n) BIDANG KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan modal, akses pasar, serta kemampuan manajerial pelaku usaha. Dukungan pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM dan penguatan koperasi.

o) BIDANG PENANAMAN MODAL

Iklim investasi di daerah belum optimal untuk menarik investor. Tantangan berupa regulasi, infrastruktur pendukung, dan kepastian usaha masih harus diperbaiki. Perbaikan iklim investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

p) BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Generasi muda memiliki potensi besar dalam pembangunan, namun sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga masih terbatas. Pembinaan kepemudaan diarahkan pada pengembangan kreativitas, kewirausahaan, serta kegiatan positif untuk meningkatkan kualitas SDM muda.

q) BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pengelolaan data statistik dan sistem persandian semakin penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, integrasi data antarinstansi masih perlu diperkuat agar perencanaan pembangunan berbasis data dapat lebih efektif.

r) BIDANG KEBUDAYAAN

Kekayaan budaya lokal di Sumba Barat Daya memiliki potensi besar sebagai identitas sekaligus daya tarik wisata. Namun, pelestarian budaya masih menghadapi tantangan berupa modernisasi dan berkurangnya minat generasi muda dalam menjaga tradisi.

s) BIDANG PERPUSTAKAAN

Akses masyarakat terhadap bahan bacaan masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan. Peningkatan fasilitas perpustakaan dan literasi membaca menjadi langkah penting untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.

t) BIDANG KEARSIPAN

Pengelolaan arsip pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam hal keteraturan, penyimpanan, dan digitalisasi. Arsip yang tertib akan menjadi dasar penting dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan.

2. URUSAN PILIHAN

a) PERTANIAN

Pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat. Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan memiliki potensi besar, namun keterbatasan sarana prasarana, teknologi, dan akses pasar menjadi tantangan utama.

b) KELAUTAN DAN PERIKANAN

Potensi kelautan dan perikanan sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, pemanfaatannya masih terbatas oleh keterbatasan sarana produksi, teknologi, serta kapasitas nelayan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana produksi menjadi kunci keberhasilan sektor ini.

c) PARIWISATA

Pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki daya tarik tinggi berkat keindahan alam dan kekayaan budaya. Namun, infrastruktur penunjang, akomodasi, serta kapasitas pelayanan wisata masih perlu ditingkatkan agar sektor ini dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

3. URUSAN PENDUKUNG

Urusan pendukung seperti perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, serta pengawasan berperan sebagai fondasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan menjadi prioritas agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

2.5 POTENSI UNGGULAN DAERAH

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Kabupaten Sumba Barat Daya masuk dalam “Kawasan Afirmasi” dengan status sebagai daerah tertinggal. Sehingga Pemerintah Pusat melakukan percepatan intervensi yang difokuskan pada pengembangan seluruh potensi unggulan daerah melalui :

- Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis dan wilayah;
- Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta pariwisata;
- Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah; dan
- Pengelolaan dan pengurangan resiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029, maka pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui RPJMD Tahun 2025 – 2029 akan difokuskan pada pengembangan potensi unggulan daerah berikut ini :

1. POTENSI PARIWISATA

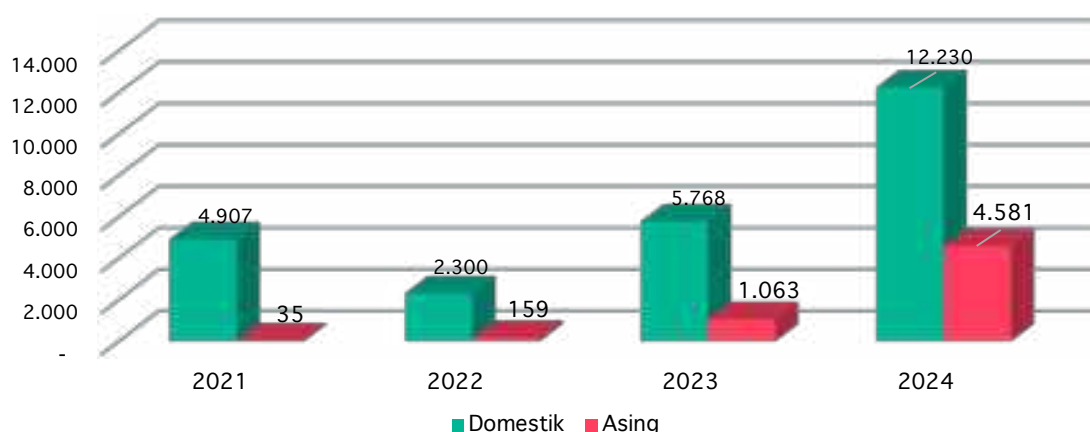
Berdasarkan data jumlah tamu yang menginap di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan, terutama dalam kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.907 wisatawan domestik dan 35 wisatawan asing. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dengan 2.300 wisatawan domestik dan 159 wisatawan asing, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi lonjakan yang signifikan. Tepatnya pada tahun 2023 tercatat 5.768 wisatawan domestik dan 1.063 wisatawan asing, lalu pada tahun 2024 melonjak tajam menjadi 12.230 wisatawan domestik serta 4.581 wisatawan asing.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya mulai menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lonjakan kunjungan wisatawan asing menunjukkan bahwa kabupaten ini mulai dikenal luas di kalangan wisatawan dunia, seiring dengan meningkatnya promosi, aksesibilitas, dan pengembangan destinasi wisata lokal.

Meski dari data tersebut masih menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya, namun Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Terdapat dua jenis daya tarik utama di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Dari sisi wisata alam, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki garis pantai sepanjang 97 km, Laguna Waikuri yang sudah dikenal hingga mancanegara, serta bentang alam eksotis lainnya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan pencinta alam dan petualangan.

Sementara itu dari sisi wisata budaya, Kabupaten Sumba Barat Daya menawarkan pengalaman yang unik dan otentik, seperti ritual adat Pasola yang digelar setahun sekali, tradisi Nyale dan Wulla Podu, serta kampung-kampung adat seperti Kampung Adat Ratenggaro, Kampung Adat Manola, dan Kampung Adat Wainyapu yang masih mempertahankan arsitektur tradisional Sumba yang khas dan memukau. Dengan modal kekayaan alam dan budaya yang luar biasa tersebut, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Diperlukan strategi promosi yang lebih agresif, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam mengelola destinasi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak utama ekonomi daerah.

GAMBAR 2. 53 JUMLAH TAMU ASING DAN DOMESTIK YANG MENGINAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2021 - 2024



Sumber : Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2025

2. POTENSI PERTANIAN

Total luas lahan sawah di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 tercatat sebesar 8.132 hektare. Dari jumlah tersebut, 5.328 hektare merupakan lahan sawah beririgasi, sementara 2.804 hektare lainnya merupakan lahan non-irigasi. Dominasi lahan beririgasi menunjukkan bahwa sebagian besar sawah di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki akses terhadap sistem pengairan yang lebih stabil dan berpotensi meningkatkan produktivitas dan intensitas tanam. Sementara itu, keberadaan lahan non-irigasi masih memegang peranan penting, terutama dalam mendukung pertanian tadah hujan yang umum dijumpai di kawasan dengan pola musim yang khas seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan total luas sawah yang cukup signifikan, sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, khususnya melalui peningkatan infrastruktur irigasi dan penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap kondisi lahan.

TABEL 2. 25 LUAS LAHAN SAWAH DAN JENIS PENGAIAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

Kabupaten	Irigasi (Ha)	Non Irigasi (Ha)	Jumlah (Ha)
Sumba Barat Daya	5.328	2.804	8.132

Sumber : BPS Prov. NTT Tahun 2025

Pada tahun 2024, tanaman jagung tetap menjadi komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya selain padi sawah dengan total produksi sebesar 38.210,4 ton dan padi ladang sebesar 53.366,5 ton. Hal ini tercermin dari capaian produksi yang sangat signifikan, yakni mencapai 170.078,3 ton yang melampaui produksi padi sawah dan padi ladang. Tingginya produksi jagung ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, masih menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk petani, pemerintah daerah, serta faktor alam yang mendukung seperti kondisi tanah dan iklim. Dengan mempertahankan jagung sebagai komoditas utama, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan nilai tambah pertanian melalui inovasi budidaya, pengolahan pascapanen, hingga perluasan akses pasar baik di tingkat lokal maupun nasional. Data terkait luas panen, provitas dan total produksi tanaman pangan yang menjadi unggulan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2. 26 LUAS PANEN, PROVITAS, DAN PRODUKSI PADI SAWAH, PADI LADANG, JAGUNG, DAN UBI KAYU TAHUN 2024

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang			Jagung			Ubi Kayu		
		Luas Panen	Provitas	Produksi	Luas Panen	Provitas	Produksi	Luas Panen	Provitas	Produksi	Luas Panen	Provitas	Produksi
		(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)
1	Kodi Bagedo	334,0	30,0	1.002,0	2.479,0	21,0	5.209,9	2.904,0	28,0	8.131,2	20,0	60,0	108,0
2	Kodi Balaghar	310,0	35,0	1.111,0	4.836,0	24,0	11.606,4	4.000,0	48,0	19.200,0	1.200,0	200,0	24.000,0
3	Kodi	20,0	38,0	76,0	1.456,0	21,9	3.249,0	11.068,0	32,0	35.417,6	880,0	80,0	7.040,0
4	Kodi Utara	45,0	31,0	139,5	4.653,0	20,0	18.612,0	10.383,0	40,0	41.528,0	301,0	300,0	9.039,0
5	Wewewa Selatan	2.056,0	26,0	5.345,6	667,0	20,0	2.900,0	2.563,0	25,0	6.817,6	50,0	60,0	300,0
6	Wewewa Barat	750,0	33,4	2.505,3	2.876,0	22,0	6.327,2	4.095,0	34,5	14.127,7	505,0	75,0	3.787,0
7	Wewewa Timur	3.628,0	50,0	18.140,0	492,0	20,0	584,0	2.398,6	25,0	5.996,5	520,0	150,0	5.194,3
8	Wewewa Tengah	1.072,0	51,0	5.786,0	667,0	25,0	1.662,0	3.207,0	30,0	9.621,0	635,0	89,0	5.684,0
9	Wewewa Utara	90,0	35,0	315,0	105,0	22,0	231,0	1.142,0	35,0	3.997,0	110,0	80,0	880,0
10	Loura	1.048,0	35,0	3.670,0	380,0	22,0	836,0	2.829,0	42,0	14.850,3	150,0	150,0	22.500,0
11	Kota Tambolaka	35,0	35,0	120,0	977,0	22,0	2.149,0	2.969,0	35,0	10.391,5	29,0	110,0	319,0
Jumlah		9.388,0	36,3	38.210,4	19.588,0	21,8	53.366,5	47.558,6	34,0	170.078,3	4.400,0	123,1	78.851,3

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

TABEL 2. 27 LUAS PANEN, PROVITAS, DAN PRODUKSI UBI JALAR, KACANG HIJAU, KACANG KEDELAI, KACANG TANAH TAHUN 2024

No	Kecamatan	Ubi Jalar			Kacang Hijau			Kacang Kedelai			Kacang Tanah		
		Luas Panen	Provitas	Produksi	Luas Panen	Provitas	Produksi	Luas Panen	Provitas	Produksi	Luas Panen	Provitas	Produksi
		(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)
1	Kodi Bangedo	6,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7,0	10,5
2	Kodi Balaghar	13,5	70,0	95,0	63,0	8,0	50,4	1.000,0	23,0	2.300,0	460,0	25,0	1.150,0
3	Kodi	17,0	50,0	85,0	0,0	0,0	0,0	1.712,0	7,0	1.198,4	7,0	7,0	5,0
4	Kodi Utara	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	12,0
5	Wewewa Selatan	25,0	60,0	150,0	0,0	0,0	0,0	20,0	8,0	16,0	1,5	5,0	1,0
6	Wewewa Barat	136,0	65,0	884,0	16,0	7,0	11,0	15,0	9,0	13,5	40,0	7,0	29,6
7	Wewewa Timur	84,0	82,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wewewa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Wewewa Utara	45,0	60,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Loura	44,0	160,0	704,0	477,0	8,0	390,4	0,0	0,0	0,0	76,0	8,0	60,8
11	Kota Tambolaka	0,0	0,0	0,0	141,0	6,0	84,6	0,0	0,0	0,0	93,0	2,0	186,0
Jumlah		380,5	58,8	2.583,0	697,0	2,6	536,4	2.747,0	4,3	3.527,9	697,5	6,1	1.454,9

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

3. POTENSI PERKEBUNAN

Sektor perkebunan di Kabupaten Sumba Barat Daya terus menunjukkan peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Jambu mete masih tercatat sebagai komoditas unggulan, baik dari sisi luas areal tanam maupun total produksi selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, luas lahan jambu mete mencapai 10.016 hektare, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 10.006 hektare. Meskipun demikian, dari sisi produktivitas, komoditas ini justru mencatatkan peningkatan, dari 5.872 ton pada tahun 2023 menjadi 5.874 ton pada tahun 2024.

Selain jambu mete, terdapat pula sejumlah komoditas perkebunan lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti kelapa, kopi, kakao, dan tembakau. Di antara komoditas tersebut, kopi telah menjadi sorotan khusus dan ikon dari Kabupaten Sumba Barat Daya karena telah memasuki tahap hilirisasi melalui peran aktif UMKM lokal.

Salah satu contoh sukses adalah produk kopi robusta Sumba dengan merek Kopi Kadi Roma. Produk ini telah tersertifikasi dan dipasarkan dalam berbagai varian rasa, serta telah menjadi representasi nyata dari nilai tambah komoditas perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya memperluas pasar hasil perkebunan lokal, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil menengah di daerah.

TABEL 2. 28 LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN (HA) DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023 - 2024

Kabupaten	Komoditi											
	Kelapa		Kopi		Kakao		Tembakau		Jambu Mete		Pala	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sumba Barat Daya	8.081	8.081	5.395	5.393	3.215	3.213	102	101	10.016	10.006	618	618

Sumber : BPS Prov. NTT Tahun 2025

TABEL 2. 29 PRODUKSI PERKEBUNAN (TON) MENURUT TANAMAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023 - 2024

Kabupaten	Komoditi											
	Kelapa		Kopi		Kakao		Tembakau		Jambu Mete		Pala	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sumba Barat Daya	4.150	4.051	2.415	2.416	1.125	1.123	78	74	5.872	5.874	-	-

Sumber : BPS Prov. NTT Tahun 2025

4. POTENSI PETERNAKAN

Sektor peternakan di Kabupaten Sumba Barat Daya terus menunjukkan dinamika yang menarik dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, ternak ayam dan babi merupakan dua jenis ternak dengan populasi tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Meskipun ayam mendominasi dari sisi jumlah, ternak babi tetap menjadi komoditas unggulan dalam sektor peternakan, mengingat nilai ekonominya yang tinggi serta peran pentingnya dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Populasi ternak babi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2020, jumlah populasi mencapai 49.880 ekor. Namun, setelah itu terjadi penurunan tajam hingga 22.907 ekor di tahun 2021, dan 29.425 ekor pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, populasi ternak babi mulai menunjukkan tren pemulihan dengan jumlah mencapai 41.109 ekor dan kembali naik pada tahun 2024 sebesar 49.016 ekor. Penurunan tajam yang terjadi selama periode 2021–2022 diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti wabah penyakit ternak seperti ASF (*African Swine Fever* atau Demam Babi Afrika), kondisi ekonomi, dan dampak pandemi COVID-19. Meski demikian, tren kenaikan pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya pemulihan dan potensi untuk mengembalikan posisi ternak babi sebagai penggerak utama sektor peternakan di daerah ini. Selain babi, masyarakat juga membudidayakan ternak lain seperti sapi, kuda, kerbau, dan kambing. Keempat jenis ternak tersebut memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, serta berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi bagian dari komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, baik untuk konsumsi lokal maupun pengembangan agribisnis berkelanjutan di masa depan.

TABEL 2. 30 POPULASI TERNAK DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 S.D 2023

Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	2.892	3.102	2.893	2.710	2.704
Kuda	5.324	5.073	4.988	5.002	5.404
Kerbau	12.220	11.159	12.199	12.028	11.943
Kambing	22.660	37.043	30.390	29.089	28.189
Babi	49.880	22.907	29.425	41.109	49.016
Ayam	159.434	144.991	305.368	291.634	182.359
Bebek, Itik, Angsa	14.939	17.672	16.332	7.287	11.360

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

5. POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada tahun 2023, sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan sebagai salah satu potensi sumber daya unggulan daerah. Nilai produksi dari sektor ini menjadi indikator penting bahwa wilayah pesisir Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki kekayaan laut yang patut diperhitungkan dan terus dikembangkan.

Produksi dari perikanan tangkap pada tahun tersebut mencapai 1.203.200 kilogram, sehingga mencerminkan aktivitas penangkapan ikan yang cukup tinggi di wilayah perairan laut yang luas dan produktif. Sementara itu, perikanan budidaya turut memberikan sumbangsih dengan total produksi sebesar 75.019 kilogram, oleh sebab itu dari capaian tersebut mencerminkan bahwa sektor budidaya air tawar maupun air payau mulai berkembang dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Selain perikanan tangkap dan perikanan budidaya, produksi dari budidaya rumput laut juga mencapai hasil yang luar biasa yaitu sebesar 1.688.741 kilogram. Dari hasil tersebut mampu memberikan gambaran bahwa rumput laut menjadi salah satu komoditas utama dengan potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi volume produksi maupun peluang hilirisasi produk turunan seperti bahan pangan, kosmetik, dan industri farmasi.

Dengan capaian tersebut, sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan terus menggali dan mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, penyediaan sarana-prasarana pendukung, serta penguatan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru (*blue economy*) di masa mendatang.

TABEL 2. 31 CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2023

No	Uraian	2023
1	Produksi Perikanan Tangkap (kg)	1.203.200
2	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	75.019
3	Produksi Budidaya Rumput Laut (kg)	1.688.741

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Tahun 2025

2.6 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan secara cermat dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029. Pengelolaan ini tidak hanya terfokus pada efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi fiskal daerah yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi fiskal merujuk pada keadaan keuangan daerah, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, serta struktur utang dan aset daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, kondisi fiskal yang sehat menjadi landasan untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan kemampuan daerah dalam mendanai program – program pembangunan yang dijalankan selama periode RPJMD. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menekankan pentingnya keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mengelola utang dengan bijaksana demi memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Analisis kondisi fiskal Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencakup evaluasi terhadap kinerja keuangan masa lalu, termasuk perkembangan pendapatan, pengeluaran, dan struktur utang. Data ini menjadi dasar untuk merencanakan penyesuaian strategis dalam pengelolaan keuangan untuk lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Dengan memperhatikan kondisi fiskal yang kuat dan terkelola dengan baik, Kabupaten Sumba Barat Daya akan mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk penyajian data pada Sub Bab ini adalah kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2019 - 2023. Di mana pada tahun 2019 - 2023 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai target indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengelolaan keuangan daerah selama periode ini menggunakan pendekatan berbasis kinerja, dengan fokus pada belanja yang terukur. Analisis kinerja ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan daerah, memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.6.1 GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dalam rangka penyajian Rancangan Teknis RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2029, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi prioritas utama dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi kinerja keuangan masa lalu akan dilakukan untuk menilai pencapaian dalam pelaksanaan APBD dan kondisi neraca, guna memahami perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perencanaan ke depan akan mengutamakan optimasi pendapatan melalui peningkatan pajak, perluasan sektor ekonomi dan pariwisata, serta pengelolaan pengeluaran yang tepat sasaran untuk infrastruktur dan layanan publik. Manajemen utang yang bijaksana serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan akan diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara efektif. Kebijakan fiskal yang responsif juga akan diterapkan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Selain itu, untuk peningkatan pendapatan daerah juga memerlukan Kebijakan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja. Realisasi pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan variasi dalam pencapaiannya. Meskipun terjadi fluktuasi dalam realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut umumnya berada di bawah target yang ditetapkan, khususnya realisasi pada tahun 2019 dan tahun 2024.

TABEL 2. 32 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 - 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/(Berkurang)	Pertumbuhan (%)
2019	953.975.120.900	1.071.885.111.639,00	112,36	117.909.990.739,00	14%
2020	1.129.445.060.612	1.013.616.994.344,00	89,74	-115.828.066.268,00	-5%
2021	1.140.118.912.620	1.004.086.021.424,00	88,07	-136.032.891.196,00	-1%
2022	1.062.158.089.112	1.004.810.305.686,55	94,60	-57.347.783.425,45	0%
2023	1.038.469.631.800	1.173.228.025.783,99	112,98	134.758.393.983,99	17%
2024	1.190.500.040.786	1.179.410.033.852,32	99,07	-11.090.006.933,68	1%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Sepanjang periode tahun 2019 hingga 2024, realisasi pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan kinerja yang cukup stabil dengan rata-rata capaian sebesar 99,47% dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola dan merealisasikan pendapatannya, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal.

Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 menjadi periode terendah dalam capaian pendapatan daerah. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan turun drastis hingga 89,74% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 88,07%. Penurunan ini secara langsung disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi secara nasional dan daerah, termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya. Tekanan terhadap aktivitas ekonomi dan keterbatasan fiskal menyebabkan turunnya kemampuan pendapatan daerah. Memasuki tahun 2022, situasi dan kondisi mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, baik secara nasional maupun global. Dampaknya, realisasi pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya meningkat menjadi 94,60% dari target yang ditetapkan. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana capaian pendapatan daerah melampaui target yakni sebesar 112,98% yang berarti mencerminkan telah pulihnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya efektivitas kebijakan fiskal daerah. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan tercatat sebesar 99,07% yang menandakan kembali tercapainya target secara optimal.

Walaupun kinerja pendapatan daerah terbilang baik, namun perlu dicatat bahwa hampir 96% dari total pendapatan didalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya berasal dari pendapatan transfer, khususnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini tentunya menunjukkan bahwa kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas dan perlu ditingkatkan secara bertahap melalui pengembangan potensi lokal, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan akumulasi rata-rata sebesar 4% selama enam tahun terakhir, Kabupaten Sumba Barat Daya telah mampu menunjukkan ketahanan fiskal yang cukup baik, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah, baik dalam masa krisis maupun pemulihan.

TABEL 2. 33 RATA – RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 – 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.071.885.111.639	1.013.616.994.344	1.004.086.021.424	1.004.810.305.686,55	1.173.228.025.783,99	1.179.410.033.852,32	2,20%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.800.716.478	45.796.257.267	43.918.102.502	31.522.054.433	35.304.169.687,99	43.651.261.637,32	-0,57%
PAJAK DAERAH	16.117.732.776,00	11.332.720.825,05	11.209.388.573	19.247.606.909,99	15.230.415.543,51	22.961.001.653,00	14,16%
RETRIBUSI DAERAH	1.477.049.563,00	1.590.336.004,00	1.376.906.596	1.719.635.554	8.684.969.797,00	11.644.335.136,00	91,65%
HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.502.702.267,00	5.085.016.169,55	7.075.077.120	4.336.715.550	7.742.306.863,00	3.944.963.310,00	4,46%
LAIN - LAIN PAD YANG SAH	25.703.231.871,85	27.788.184.268,64	24.256.730.212,64	6.218.096.418,56	3.646.477.484,48	5.100.961.538,32	-16,09%
PENDAPATAN TRANSFER	968.696.915.161	914.486.148.264,41	908.339.777.485	907.996.476.661	1.117.607.489.545	1.086.492.228.773,00	2,80%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	714.932.253.432	646.193.177.931,00	888.023.906.202	884.212.537.748	1.088.844.557.182	894.773.478.773,00	6,54%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	229.561.940.177	245.592.238.000,00	20.315.871.283	23.783.938.913	28.762.932.363,00	191.718.750.000,00	103,96%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA	24.202.721.552	22.700.732.333,41					-21,24%
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	54.387.480.000	53.334.588.812	51.828.141.437	65.291.774.593	20.316.366.551	49.266.543.442	18,97%
PENDAPATAN HIBAH	54.387.480.000	53.334.588.812,00	51.828.141.437	-	-	31.607.116.723,00	-0,95%
PENDAPATAN DANA DARURAT	-	-	-	-	-		
PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	65.291.774.593	20.316.366.551	17.659.426.719,00	-16,39%
BELANJA DAERAH	758.093.299.332,00	700.892.974.749,39	731.662.379.423	720.590.129.616	1.151.282.207.613	1.147.575.940.833,00	10,96%
BELANJA OPERASI	589.252.065.637	547.854.540.557,99	588.490.450.193	574.784.978.341	672.673.943.713	741.753.087.764,00	5,07%
BELANJA PEGAWAI	267.857.665.242	261.925.149.138,00	259.551.254.926	274.701.667.851	286.564.004.981	330.331.141.451,00	4,46%
BELANJA BARANG DAN JASA	314.295.100.395	276.976.441.419,99	285.268.502.409,39	257.363.508.093	303.857.301.344	319.265.652.334,00	0,89%
BELANJA BUNGA	-	-	-	-	-		
BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	117.966.000	233.203.450,00	19,54%
BELANJA HIBAH	4.649.300.000	6.049.850.000,00	21.059.603.308	17.380.803.868	67.296.181.388	74.046.925.529,00	111,59%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.450.000.000	2.903.100.000,00	22.611.089.550	25.338.998.529	14.838.490.000	17.876.165.000,00	137,69%

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
BELANJA MODAL	168.841.233.695,00	144.601.167.010,40	141.776.328.730,84	144.481.795.875	227.471.238.492	160.632.937.633,00	2,73%
BELANJA MODAL - TANAH	-	-	-	150.000.000	-		0,00%
BELANJA MODAL - PERALATAN DAN MESIN	28.114.427.042	40.816.518.038,60	25.608.455.439,00	31.278.194.753	32.506.485.331	27.119.273.098,00	3,48%
BELANJA MODAL - GEDUNG DAN BANGUNAN	49.380.649.071	55.027.672.967,80	42.818.592.656	31.681.833.494	73.256.412.346	35.658.539.759,00	8,63%
BELANJA MODAL - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	81.930.162.147	45.323.601.784,00	72.089.146.835,84	80.732.318.068	118.375.365.601	94.810.066.973,00	10,62%
BELANJA MODAL - ASET TETAP LAINNYA	9.415.995.435	3.433.374.220,00	1.260.133.800	639.449.560	3.252.975.214	3.045.057.803,00	45,25%
BELANJA MODAL - ASET LAINNYA	-	-	-	-	80.000.000		-20,00%
BELANJA TAK TERDUGA	-	8.437.267.181,00	1.395.600.499,00	1.323.355.400			-37,73%
BELANJA TAK TERDUGA		8.437.267.181,00	1.395.600.499,00	1.323.355.400			-37,73%
TRANSFER	283.379.504.612	315.147.837.239	311.075.898.402	282.628.277.394	251.137.025.408	245.189.915.436,00	-2,55%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.495.216.540	1.579.746.040	1.799.999.779	1.626.567.452	1.626.899.958	2.766.806.473,00	16,01%
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK	1.495.216.540	1.579.746.040	1.799.999.779	1.626.567.452	1.626.899.958	1.781.587.389,00	3,90%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA						985.219.084	100%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	281.884.288.072	313.568.091.199	309.275.898.623	281.001.709.942	249.510.125.450	242.423.108.963	-2,66%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA							
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	280.765.569.000	304.303.518.931	309.275.898.623	281.001.709.942	249.510.125.450	242.423.108.963,00	-2,63%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	1.118.719.072	1.080.572.268					-0,68%
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS		8.184.000.000					0,00%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.041.472.803.944,00	1.016.040.811.988,39	1.042.738.277.825	1.003.218.407.010	1.151.282.207.613	1.147.575.940.833,00	2,17%
SURPLUS/DEFISIT	30.412.307.694,85	-2.423.817.644,74	-38.652.256.401,59	1.591.898.676,55	21.945.818.171	31.834.093.019	521,25%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.443.080.666,93	111.928.533.361,78	91.814.762.614,04	43.162.506.212,45	34.754.404.889	54.842.835.929,10	-3,32%

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
PENGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	96.441.252.166,93	111.928.533.361,78	91.812.207.614,04	43.162.506.212,45	34.754.404.887,93	54.842.835.929,10	-3,32%
PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG	1.828.500,00		2.555.000,00				-40,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	17.692.508.084	10.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000	12.000.000.000,00	78,89%
PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	15.000.000.000	17.692.508.084	10.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000	12.000.000.000,00	78,89%
PEMBIAYAAN NETTO	81.443.080.666,93	94.236.025.277,78	81.814.762.614,04	33.162.506.212,45	32.754.404.887,93	42.842.835.929,10	-5,47%
SISA LEBIH/(KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN	111.855.388.361,78	91.812.207.633	43.162.506.212,45	34.754.404.887,93	54.700.223.058,92	74.676.928.948,42	0,70%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Berdasarkan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode tahun 2019 hingga 2024 terlihat sejumlah pola dan tren yang mencerminkan dinamika fiskal daerah serta arah kebijakan pembangunan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sumba Barat daya dalam kurun waktu tersebut.

1. Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akumulatif menunjukkan penurunan tipis dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar -0,57%. Meski demikian, komponen pajak daerah justru mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 14,16%, sehingga mencerminkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah. Kinerja retribusi daerah juga menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2024, sehingga kontribusinya terhadap PAD meningkat tajam hingga 91,65% secara rata-rata. Selain itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turut mencatat pertumbuhan positif dengan rata-rata 4,46%. Di sisi lain, komponen pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami kontraksi tajam dengan penurunan rata-rata -16,09% yang menjadi salah satu faktor penyumbang penurunan akumulatif PAD. Sementara itu, pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan kontribusi mencapai 96% dari total pendapatan APBD. Komponen ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan rata-rata sebesar 2,80%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada transfer dana perimbangan dengan rata-rata peningkatan 6,54%, sedangkan transfer dari pemerintah pusat lainnya mengalami lonjakan yang cukup tinggi dengan rata-rata 18,97% sekaligus mencerminkan meningkatnya dukungan fiskal dari pusat dalam memperkuat kapasitas daerah.
2. Dari sisi belanja, terdapat peningkatan rata-rata tahunan sebesar 5,07% pada belanja operasi, di mana belanja pegawai meningkat rata-rata 4,46%. Namun, belanja barang dan jasa mengalami sedikit penurunan sebesar -0,89%, sementara belanja hibah dan bantuan sosial tumbuh secara signifikan dengan rata-rata masing-masing 111,59% dan 137,69%, hal ini tentunya menggambarkan bahwa terjadi peningkatan perhatian terhadap aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal juga menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 2,73%, yang berfokus pada penguatan infrastruktur fisik. Investasi terbesar tercatat pada pembangunan gedung dan bangunan dengan rata-rata pertumbuhan 8,63%, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 10,62%, serta aset tetap lainnya dengan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 45,25%. Hal ini menandakan pergeseran kebijakan pembangunan ke arah penyediaan infrastruktur dasar yang lebih masif. Sementara itu, belanja tak terduga mengalami penurunan tajam sebesar -37,73%, dan hanya dianggarkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, yang bertepatan dengan masa penanganan pandemi Covid-19. Untuk transfer dan bantuan keuangan ke desa dan pihak ketiga, terjadi penurunan rata-rata sebesar -2,66%.

3. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan juga menunjukkan tren penurunan rata-rata -3,20% yang mengindikasikan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dalam menjaga keseimbangan APBD.

Secara keseluruhan, kondisi anggaran Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang konsisten dan terukur. Total pendapatan meningkat rata-rata sebesar 2,20%, terutama didorong oleh peningkatan dari sektor pajak dan transfer pemerintah pusat. Pengelolaan belanja dan pembiayaan juga mencerminkan adanya pergeseran fokus menuju pembangunan infrastruktur serta penguatan program sosial, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan yang bersifat tidak stabil. Dengan tren ini, Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat struktur pendapatan, serta menjaga keberlanjutan fiskal demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TABEL 2. 34 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019 - 2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERTUMBUHAN (%)
ASET LANCAR							
KAS DI KAS DAERAH	90.851.148.526,18	84.454.562.537,32	37.884.424.825,19	32.805.365.748,92	48.665.296.473,91	70.397.469.118,98	3
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	78.449.031,00	14.645.000,00	69.548.800,00	4.512.000,00	69.417.882,00	65.806.218,00	327
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	65.842.780,00		103.039.600,00	156.136.718,00	88.116.251,49	29.655.490,00	-32
KAS DI BLUD							
KAS DI BENDAHARA FKTP	6.846.149.640,00	6.113.177.148,72	3.977.190.626,97	1.251.646.496,07	1.957.741.387,14	376.013.475,14	-28
KAS DI BENDAHARA BOS	14.363.345.274,60	1.287.693.284,00	1.226.818.292,29	398.014.788,70	349.954.855,56		-55
KAS LAINNYA	943.039.736,00		2.850.000,00	424.780.232,00	3.778.706.988,00	3.879.484.806,35	300
SETARA KAS							
INVESTASI JANGKA PENDEK							
PIUTANG PENDAPATAN	10.300.942.483,00	10.335.368.827,00	16.369.783.828,00	19.690.343.250,00		20.925.149.474,09	-4
PIUTANG LAINNYA	4.974.690.677,00	4.967.382.077,00	4.964.827.077,00	4.963.527.077,00	4.963.527.077,00		-20
PENYISIHAN PIUTANG	-11.040.209.977,87	-11.931.298.014,77	-12.785.752.974,84	-13.444.260.596,41	-14.417.067.902,98	-10.935.992.257,19	1
BEBAN DIBAYAR DI MUKA							
PERSEDIAAN	16.292.084.724,48	34.648.441.406,43	32.983.559.477,16	32.792.131.001,72	23.893.945.664,39	17.231.055.867,61	10
JUMLAH ASET LANCAR	133.675.482.894,39	129.889.972.265,70	84.796.289.551,77	79.042.196.716,00	90.434.884.485,51	103.016.111.112,98	-3
INVESTASI JANGKA PANJANG	48.000.000.000,00	67.369.803.538,00	75.052.265.370,00	85.052.265.370,00	85.474.248.829,00	97.474.248.829,00	3
INVESTASI NON PERMANEN							
INVESTASI JANGKA PANJANG PADA ENTITAS LAINNYA							
INVESTASI DALAM OBLIGASI							

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERTUMBUHAN (%)
INVESTASI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN							
DANA BERGULIR							
DEPOSITO JANGKA PANJANG							
INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA							
PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR							
INVESTASI PERMANEN	48.000.000.000,00	67.369.803.538,00	75.052.265.370,00	85.052.265.370,00	85.474.248.829,00	97.474.248.829,00	3
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	48.000.000.000,00	67.369.803.538,00	75.052.265.370,00	85.052.265.370,00	85.474.248.829,00	97.474.248.829,00	16
INVESTASI PERMANEN LAINNYA							
ASET TETAP							
TANAH	165.798.718.926,00	373.040.470.026,00	372.863.137.063,00	371.281.409.336,00	371.281.409.336,00	366.129.124.336,00	25
PERALATAN DAN MESIN	227.433.887.096,12	266.108.562.160,72	293.952.480.343,72	315.073.890.734,62	341.701.391.858,62	359.815.725.945,51	10
GEDUNG DAN BANGUNAN	443.524.478.123,76	499.575.295.685,32	580.258.933.703,32	583.812.924.324,88	623.592.116.869,33	705.009.234.652,34	10
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	1.074.395.826.978,91	1.139.611.504.778,14	1.209.125.076.856,98	1.273.867.563.601,66	1.395.254.032.803,31	1.512.420.729.978,04	7
ASET TETAP LAINNYA	39.185.801.008,14	42.590.057.728,14	43.829.443.498,14	44.489.429.969,14	46.513.845.283,14	48.783.845.838,14	5
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	65.021.356.117,00	46.064.197.487,00	9.635.131.034,00	10.394.146.034,00	42.298.483.284,00	9.499.631.034,00	26
AKUMULASI PENYUSUTAN	-645.687.233.662,35	-649.122.615.129,93	-837.796.944.430,65	-918.702.502.060,78	-1.023.287.565.334,98	-1.143.914.005.443,99	12
JUMLAH ASET TETAP	1.369.672.834.587,58	1.717.867.472.735,39	1.671.867.258.068,51	1.680.216.861.939,52	1.797.353.714.099,42	1.857.744.286.340,04	7
DANA CADANGAN							
DANA CADANGAN							
JUMLAH DANA CADANGAN							

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERTUMBUHAN (%)
ASET LAINNYA							
TAGIHAN JANGKA PANJANG	1.098.875.549,04	1.093.525.549,04	1.121.745.437,04	2.271.088.362,20	1.717.322.480,35	1.565.986.950,09	14
KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA			1.391.760.700,00	1.391.760.700,00	1.391.760.700,00	1.322.423.200,00	-1
ASET TAK BERWUJUD	1.710.609.000,00	2.007.609.000,00	2.007.609.000,00	2.205.189.000,00	459.649.999,33	475.600.000,00	-10
ASET LAIN - LAIN	33.303.786.538,78	35.210.811.996,78	50.357.786.667,78	56.521.759.925,00	33.009.342.371,47	35.802.361.059,50	6
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN - LAIN	-23.068.387.748,49	-23.068.387.748,49	-1.516.965.566,67	-1.718.463.000,67			-36
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-1.354.048.370,00	-1.416.492.250,00	-30.733.029.133,96	-22.614.455.939,43			390
DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIF FACILITY (TDF)					493.575.000,00		-20
JUMLAH ASET LAINNYA	11.690.834.969,33	13.827.066.547,33	22.628.907.104,19	38.056.879.047,10	37.071.650.551,15	39.166.371.209,59	1
JUMLAH ASET	1.563.039.152.451,30	1.928.954.315.086,42	1.854.344.720.094,47	1.882.368.203.072,62	2.010.334.497.965,08	2.097.401.017.491,61	1
KEWAJIBAN	8.301.340.210,63	7.547.150.916,63	9.701.406.408,83	2.585.025.909,39	4.997.634.110,88		-20
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	349.546.890,00	77.981.214,00	101.365.932,00	286.051.094,69	209.010.779,18	71.500.160,05	8
UTANG BUNGA							
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG							
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA							
UTANG BEBAN			256.546.800,00	1.339.062.564,70	4.788.623.331,70	3.686.692.810,00	131
UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	7.951.793.320,63	7.469.169.702,63	9.343.493.676,83	959.912.250,00			-34
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.301.340.210,63	7.547.150.916,63	9.701.406.408,83	2.585.025.909,39	4.997.634.110,88	3.758.192.970,05	-5

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERTUMBUHAN (%)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
UTANG DALAM NEGERI							
UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA							
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
EKUITAS	1.554.737.812.240,67	1.921.407.164.169,79	1.844.643.313.658,64	1.879.783.177.163,23	2.005.336.863.854,20	2.098.795.109.521,56	
EKUITAS	1.554.737.812.240,67	1.921.407.164.169,79	1.844.643.313.658,64	1.879.783.177.163,23	2.005.336.863.854,20	2.098.795.109.521,56	7
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.563.039.152.451,30	1.928.954.315.086,42	1.854.344.720.067,47	1.882.368.203.072,62	2.010.334.497.965,08	2.102.553.302.491,61	6

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Data Neraca Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode 2019 hingga 2024 memberikan gambaran penting mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal likuiditas, investasi aset tetap, serta struktur permodalan atau ekuitas.

1. Secara umum, aset lancar di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata penurunan sebesar -3% selama periode 2019 hingga 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu ditingkatkan. Sehingga ketahanan likuiditas yang rendah dapat menjadi hambatan dalam mendukung operasional jangka pendek dan merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan aset tetap menunjukkan tren yang positif, dengan rata-rata kenaikan sebesar 7% setiap tahunnya selama periode yang dianalisis. Hal ini mencerminkan adanya investasi yang konsisten dalam pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan aset tetap tersebut sejalan dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang berfokus pada percepatan pembangunan untuk mengatasi ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai diyakini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Sementara itu, ekuitas daerah juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7% yang artinya bahwa kondisi finansial yang stabil dan pengelolaan fiskal yang cukup sehat telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pertumbuhan ekuitas ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya relatif tidak bergantung pada pembiayaan dari utang dan lebih banyak mengandalkan dana sendiri dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan.

Untuk memperkuat kesehatan keuangan daerah secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengumpulan piutang untuk menambah kas dan memperbaiki likuiditas;
2. Mengelola aset lancar secara lebih efisien, termasuk optimalisasi kas, persediaan, dan piutang jangka pendek;
3. Memanfaatkan struktur ekuitas secara optimal untuk mendorong investasi produktif; serta
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan mampu membangun fondasi keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mempercepat kemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakatnya.

2.6.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN KE DEPAN

Pengelolaan anggaran yang efektif adalah kunci utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Teori ekonomi publik menekankan pentingnya alokasi sumber daya publik yang efisien dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan meminimalkan biaya sosial. Dalam konteks ini, proyeksi anggaran dari tahun 2025 hingga 2030 bukan hanya sebagai alat untuk meramalkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerapkan strategi yang terukur dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Teori manajemen keuangan publik menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Keputusan keuangan yang baik harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap risiko dan keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dengan belanja yang direncanakan. Proyeksi anggaran yang teliti tentunya akan membantu Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan yang optimal serta mengalokasikan belanja dengan efisien, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks regulasi, proyeksi anggaran harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan regulasi ini mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dengan mempertimbangkan teori ekonomi, manajemen keuangan, dan aspek regulasi ini, proyeksi anggaran dari tahun 2025 hingga 2030 diharapkan mampu menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penetapan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam periode 2025–2030 disusun berdasarkan pada kinerja pelaksanaan anggaran sebelumnya, data historis realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mempertimbangkan asumsi makro ekonomi dan arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam lima tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Seluruh asumsi ini diselaraskan dengan target pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025–2045. Untuk periode lima tahunan pertama (2025–2030) dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh di atas 3% dengan pendapatan per kapita ditargetkan melampaui Rp 15.253.870. Proyeksi ini diyakini akan meningkatkan daya beli

masyarakat dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan target tersebut, PAD Kabupaten Sumba Barat Daya diperkirakan tumbuh rata-rata 10% per tahun, dari Rp 44.754.639.573 pada tahun 2025 menjadi Rp 78.122.492.077,18 di tahun 2030. Pertumbuhan ini akan didorong oleh pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Komponen PAD seperti pajak daerah, dan retribusi daerah diharapkan dapat tumbuh akseleratif dalam kisaran 10-11% per tahun selama periode ini. Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana perimbangan, ditargetkan tumbuh lebih konservatif sekitar 1-1,5% per tahun, dengan nilai sebesar Rp 1.125.722.919.345 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp 1.201.347.738.960,05 pada tahun 2030. Kebijakan ini diambil secara hati-hati mengingat dinamika kebijakan fiskal nasional yang belum sepenuhnya stabil.

Selain itu secara umum, total pendapatan daerah juga akan mencakup sumber pendapatan sah lainnya yang diprediksi tumbuh stabil pada kisaran 2% per tahun. Seluruh pendapatan ini akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pendanaan program pembangunan tersebut dialokasikan ke dalam tiga komponen utama belanja daerah, yaitu belanja operasional, dan belanja modal. Belanja operasional tetap menjadi komponen belanja terbesar dengan proyeksi peningkatan dari Rp 803.194.489.581 pada tahun 2025 menjadi Rp 857.956.143.646,38 di tahun 2030 yang tumbuh rata-rata sekitar 2% per tahunnya. Kenaikan ini didorong oleh belanja pegawai dan belanja barang yang menjadi kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, belanja modal juga mengalami peningkatan dari Rp 151.173.482.750 pada tahun 2025 menjadi Rp 159.987.824.212,63 di tahun 2030. Belanja ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, irigasi, dan jaringan guna memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi wilayah yang memiliki potensi unggulan.

Secara keseluruhan, belanja daerah dan transfer bantuan keuangan Kabupaten Sumba Barat Daya diproyeksikan tumbuh rata-rata 1-1,5% per tahun, dengan total belanja yang meningkat dari Rp 1.203.031.035.706 pada tahun 2025 menjadi Rp 1.302.711.657.213,98 di tahun 2030. Penetapan target belanja dilakukan secara selaras dengan proyeksi pendapatan agar dapat menghindari ketergantungan terhadap pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyusun anggaran secara berimbang dan menghindari defisit, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kebijakan fiskal yang terarah dan proyeksi yang realistis, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial dalam jangka menengah, serta memperkuat fondasi kemandirian fiskal daerah.

TABEL 2. 35 PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 S.D 2030

URAIAN	APBD MURNI 2025	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	1.189.863.113.723,00	1.223.374.973.289,75	1.242.572.011.635,57	1.262.129.738.589,36	1.282.055.918.670,08	1.304.211.657.213,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.754.639.573,00	49.932.572.648,07	55.767.632.771,16	62.344.846.352,23	69.760.283.231,86	78.122.492.077,18
PAJAK DAERAH	29.108.318.769,00	32.892.400.208,97	37.168.412.236,14	42.000.305.826,83	47.460.345.584,32	53.630.190.510,28
RETRIBUSI DAERAH	9.549.463.000,00	10.790.893.190,00	12.193.709.304,70	13.778.891.514,31	15.570.147.411,17	17.594.266.574,62
HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.953.742.399,00	4.052.585.958,98	4.153.900.607,95	4.257.748.123,15	4.364.191.826,23	4.473.296.621,88
LAIN - LAIN PAD YANG SAH	2.143.115.405,00	2.196.693.290,13	2.251.610.622,38	2.307.900.887,94	2.365.598.410,14	2.424.738.370,39
PENDAPATAN TRANSFER	1.125.722.919.345,00	1.153.087.568.096,43	1.165.431.804.691,90	1.177.343.689.355,99	1.188.732.372.413,02	1.201.347.738.960,05
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.107.294.069.000,00	1.133.921.563.737,63	1.145.499.160.158,74	1.156.613.739.041,51	1.167.173.224.085,97	1.178.926.224.699,91
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA	18.428.850.345,00	19.166.004.358,80	19.932.644.533,15	20.729.950.314,48	21.559.148.327,06	22.421.514.260,14
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	19.385.554.805,00	20.354.832.545,25	21.372.574.172,51	22.441.202.881,14	23.563.263.025,20	24.741.426.176,45
LAIN - LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	19.385.554.805,00	20.354.832.545,25	21.372.574.172,51	22.441.202.881,14	23.563.263.025,20	24.741.426.176,45
PENDAPATAN DANA DARURAT						
PENDAPATAN LAINNYA						
BELANJA DAERAH	963.421.603.406,00	979.749.641.950,60	996.404.364.317,22	1.013.393.080.974,29	1.030.723.276.149,71	1.049.149.752.153,25
BELANJA OPERASI	803.194.489.581,00	817.835.616.614,90	832.785.665.104,98	848.051.758.467,11	863.641.191.906,49	879.561.436.646,38
BELANJA PEGAWAI	428.109.302.986,00	438.812.035.560,65	449.782.336.449,67	461.026.894.860,91	472.552.567.232,43	484.366.381.413,24
BELANJA BARANG DAN JASA	313.390.065.361,00	316.680.661.047,29	320.005.807.988,29	323.365.868.972,16	326.761.210.596,37	330.192.203.307,63
BELANJA BUNGA						

URAIAN	APBD MURNI 2025	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA SUBSIDI	322.377.254,00	325.762.215,17	329.182.718,43	332.639.136,97	336.131.847,91	339.661.232,31
BELANJA HIBAH	47.469.426.480,00	47.967.855.458,04	48.471.517.940,35	48.980.468.878,72	49.494.763.801,95	50.014.458.821,87
BELANJA BANTUAN SOSIAL	13.903.317.500,00	14.049.302.333,75	14.196.820.008,25	14.345.886.618,34	14.496.518.427,83	14.648.731.871,33
BELANJA MODAL	151.173.482.750,00	152.760.804.318,88	154.364.792.764,22	155.985.623.088,25	157.623.472.130,67	159.987.824.212,63
BELANJA MODAL - TANAH						
BELANJA MODAL - PERALATAN DAN MESIN	20.997.346.835,00	21.217.818.976,77	21.440.606.076,02	21.665.732.439,82	21.893.222.630,44	22.221.620.969,90
BELANJA MODAL - GEDUNG DAN BANGUNAN	55.339.413.000,00	55.920.476.836,50	56.507.641.843,28	57.100.972.082,64	57.700.532.289,51	58.566.040.273,85
BELANJA MODAL - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	73.765.594.840,00	74.540.133.585,82	75.322.804.988,47	76.113.694.440,85	76.912.888.232,48	78.066.581.555,97
BELANJA MODAL - ASET TETAP LAINNYA	1.071.128.075,00	1.082.374.919,79	1.093.739.856,45	1.105.224.124,94	1.116.828.978,25	1.133.581.412,92
BELANJA MODAL - ASET LAINNYA						
BELANJA TAK TERDUGA	9.053.631.075,00	9.153.221.016,83	9.253.906.448,01	9.355.699.418,94	9.458.612.112,55	9.600.491.294,23
BELANJA TAK TERDUGA	9.053.631.075,00	9.153.221.016,83	9.253.906.448,01	9.355.699.418,94	9.458.612.112,55	9.600.491.294,23
TRANSFER	239.609.432.300,00	242.125.331.339,15	244.667.647.318,21	247.236.657.615,05	249.832.642.520,01	253.561.905.060,73
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.884.720.000,00	3.925.509.560,00	3.966.727.410,38	4.008.378.048,19	4.050.466.017,69	4.092.995.910,88
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK	3.884.720.000,00	3.925.509.560,00	3.966.727.410,38	4.008.378.048,19	4.050.466.017,69	4.092.995.910,88
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA						
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	235.724.712.300,00	238.199.821.779,15	240.700.919.907,83	243.228.279.566,86	245.782.176.502,32	249.468.909.149,85
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA						
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	235.724.712.300,00	238.199.821.779,15	240.700.919.907,83	243.228.279.566,86	245.782.176.502,32	249.468.909.149,85

URAIAN	APBD MURNI 2025	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN LAINNYA						
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS						
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.203.031.035.706,00	1.221.874.973.289,75	1.241.072.011.635,43	1.260.629.738.589,34	1.280.555.918.669,72	1.302.711.657.213,98
SURPLUS/DEFISIT	-13.167.921.983,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,14	1.500.000.000,01	1.500.000.000,35	1.499.999.999,70
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.667.921.983,00	-	-	-	-	-
PENGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	14.667.921.983,00					
PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	13.167.921.983,00	-1.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	-1.500.000.000,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	0	0	0	0	0

2.7 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.7.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur di suatu wilayah dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai upaya dan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan saat ini, serta menciptakan peluang baru, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sering kali dihadapi berbagai masalah dan isu yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, yang sering kali menghambat pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sumber daya alam, finansial, maupun manusia, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melaksanakan program-program pembangunan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tata kelola pemerintahan yang tidak optimal juga dapat memperburuk situasi. Masalah seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pelaksanaan yang tidak efisien.

Kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kekeringan, hingga longsor juga dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap proses pembangunan. Bencana alam dapat merusak infrastruktur, mengakibatkan kerugian ekonomi, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Isu sosial budaya, seperti konflik antar kelompok, perbedaan nilai, dan ketidaksetaraan gender, juga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Dalam mengatasi masalah-masalah ini dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif agar proses pembangunan dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, struktur ekonomi daerah yang tidak seimbang, misalnya ketergantungan pada satu sektor ekonomi atau kekurangan dalam diversifikasi, dapat menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembangunan daerah sangat diperlukan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan langkah krusial untuk menciptakan daerah yang lebih maju, adil dan berkelanjutan. Pembahasan mengenai permasalahan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang tepat. Solusi ini kemudian dapat dituangkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama dari berbagai pihak, Kabupaten Sumba Barat Daya dan daerah lainnya memiliki potensi untuk mengatasi tantangan yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan

pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang telah diungkapkan dalam gambaran umum kondisi daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

- a) Tingkat partisipasi penduduk sebagaimana diterangkan melalui besaran Angka Partisipasi Murni (APM) relatif tinggi pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 sebesar 93,98, tetapi semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, yakni SMP/MTs sebesar 59,48 dan SMA/SMK/MA sebesar 54,37. Kondisi demikian menggambarkan rendahnya kesadaran penduduk untuk berpartisipasi pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Implikasinya adalah dalam jangka menengah dan panjang, pasar tenaga kerja akan didominasi angkatan kerja berpendidikan rendah.
- b) Pada tahun 2024, angka melek huruf di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 84,91 persen. Capaian ini masih berada di bawah rata – rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 95,15 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kemampuan dasar literasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Angka melek huruf yang relatif rendah ini mencerminkan masih terbatasnya akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas serta belum meratanya upaya pemberantasan buta huruf di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, terbatasnya partisipasi dalam pembangunan, serta lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, teknologi, dan peluang ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperlambat laju pembangunan sosial – ekonomi di daerah tersebut.
- c) Tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan dasar siswa masih tergolong rendah. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), angka literasi hanya mencapai 38,16, sementara numerasi berada pada angka 32,82. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), capaian sedikit lebih tinggi, dengan angka literasi sebesar 44,96 dan numerasi sebesar 47,89. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa di jenjang pendidikan dasar belum sepenuhnya menguasai kemampuan membaca dan berhitung secara fungsional, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran. Rendahnya tingkat literasi dan numerasi ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk dalam kemampuan siswa untuk memahami materi pembelajaran lintas mata pelajaran, menyelesaikan masalah secara logis, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya capaian ini antara lain terbatasnya kualitas pengajaran, minimnya sarana pendukung pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, serta masih rendahnya partisipasi orang tua dalam mendukung proses belajar di rumah. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

2. KESEHATAN

- a) Pada tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat Daya mencatat sebanyak 7 kasus kematian ibu (AKI) dan 59 kasus kematian bayi (AKB). Meskipun jumlah tersebut terlihat kecil secara absolut, namun tetap menjadi perhatian serius karena mencerminkan tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di daerah tersebut. Situasi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk memperkuat sistem kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas layanan di tingkat puskesmas dan posyandu, serta memperluas edukasi kesehatan reproduksi dan perawatan neonatal di tingkat masyarakat.
- b) Angka balita stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 mencapai 39,2% dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di angka 16,9%. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya penanganan stunting di Sumba Barat Daya, mengingat angka prevalensinya lebih dari dua kali lipat rata-rata provinsi. Kondisi ini memerlukan perhatian dan intervensi khusus untuk memastikan kesehatan dan tumbuh kembang balita di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- c) Tingkat keberhasilan (*success rate*) pengobatan TBC di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 adalah 4,24% yang artinya masih tergolong sangat rendah dan mengindikasikan bahwa sebagian besar pasien TBC di Kabupaten Sumba Barat Daya belum berhasil menuntaskan pengobatannya. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keberhasilan pengobatan TBC sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan resistensi obat. Rendahnya angka tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti putus obat, kurangnya kepatuhan pasien, keterbatasan akses layanan kesehatan, atau kendala dalam sistem pendukung pengobatan. Sehingga untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC diperlukan evaluasi yang mendalam dan intervensi yang kuat dari perangkat daerah teknis dibidang kesehatan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a) Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 menunjukkan bahwa total panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 1.136,3 Km. Panjang ini terbagi berdasarkan jenis permukaannya, yaitu 802,54 Km jalan beraspal,

248,3 Km jalan kerikil, dan 85,46 Km jalan tanah. Adapun berdasarkan kondisi jalan tersebut adalah sebagai berikut :

- Baik : 651,76 Km;
- Sedang : 29,82 Km;
- Rusak : 70,53 Km;
- Rusak Berat : 384,19 Km.

Apabila dianalisis, data ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar jaringan jalan telah beraspal, kondisi kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih memerlukan perhatian serius. Sepanjang 384,19 Km atau sekitar 33,8% dari total panjang jalan berada dalam kondisi rusak berat. Jika ditambahkan dengan ruas jalan yang berkondisi rusak, maka lebih dari sepertiga total panjang jalan membutuhkan rehabilitasi yang signifikan. Kondisi ini dapat berdampak pada efisiensi mobilitas, aksesibilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- b) Berdasarkan data dari BPS Prov. NTT tahun 2025 menunjukkan bahwa 86,12% rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki akses air minum layak pada tahun 2024. Meskipun angka ini tergolong tinggi, namun ternyata masih berada di bawah rata - rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 88,55%. Perbedaan persentase ini, meskipun tidak terlalu besar namun mengindikasikan bahwa masih ada pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk meningkatkan cakupan akses air minum layak bagi seluruh rumah tangga.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Data tahun 2024 yang dirilis oleh BPS Prov. NTT menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak (Rumah Layak Huni) di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya sebesar 32,06% dan cukup memprihatinkan karena masih jauh di bawah rata - rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 46,88%. Kesenjangan yang signifikan ini menjadi tantangan besar dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kondisi rumah yang tidak layak huni dapat berdampak negatif pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup penghuninya. Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah layak huni menjadi prioritas penting untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik di kabupaten Sumba Barat Daya.

5. SOSIAL

Data terbaru yang dirilis BPS Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 102,05 ribu jiwa atau 27,20% dari total jumlah jiwa sehingga menempatkan Kabupaten Sumba Barat Daya pada posisi kedua terbanyak untuk jumlah penduduk miskin se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Secara umum kondisi ketenteraman, ketertiban umum (trantibum), dan perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dikatakan relatif baik. Kondisi ini menandakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumba Barat Daya terpelihara dengan cukup stabil dan Masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, Tetapi di balik kondisi yang positif ini, terdapat tantangan signifikan terkait ketersediaan petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sangat terbatas. Satpol PP memegang peranan krusial dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Keterbatasan personel ini tentu dapat menjadi hambatan dalam menjaga stabilitas trantibumlinmas secara optimal, terutama jika terjadi situasi yang membutuhkan respons cepat dan cakupan wilayah yang luas.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Berdasarkan hasil rilis data dari BPS Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,64%, yang merepresentasikan persentase jumlah pengangguran (orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha) terhadap total angkatan kerja. Angka 2,64% ini tergolong rendah, bahkan lebih rendah dari rata – rata TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada tahun 2024 mencapai 3,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya telah berhasil terserap di pasar kerja. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sumba Barat Daya sangat tinggi yaitu sebesar 78,70%. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Tingginya TPAK ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif di Kabupaten Sumba Barat Daya aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumba Barat Daya masih menghadapi tantangan serius terkait kasus kekerasan, baik yang menimpa anak – anak maupun perempuan. Tercatat sebanyak 16 kasus kekerasan pada anak terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya selama tahun 2024 dan berdasarkan data tersebut telah menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap anak – anak di Kabupaten Sumba Barat Daya perlu diperkuat. Kekerasan pada anak dalam bentuk apapun akan memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik dan psikologis korban. Selain itu, kekerasan pada perempuan juga menjadi isu yang memerlukan perhatian. Berdasarkan data tahun 2024 terdapat 7 kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi cermin bagi masalah ketidaksetaraan gender dan kerentanan yang masih dialami oleh sebagian perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data kasus kekerasan ini adalah cerminan dari kebutuhan mendesak untuk perlindungan yang lebih baik dan penegakan

hukum yang tegas demi terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan setara di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator penting yang mengukur seberapa mampu suatu wilayah dalam menjamin akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakatnya. Pada tahun 2024, Badan Pangan Nasional RI mencatatkan bahwa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 62,53 poin. Nilai ini menempatkan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kategori "Tahan Pangan". Kategori ini menunjukkan bahwa secara umum, kondisi ketersediaan dan akses pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada tingkat yang memadai, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Indikasi positif ini sekaligus mempertegas bahwa upaya – upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan aksesibilitasnya telah membuahkan hasil. Dengan langkah – langkah ini, diharapkan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat terus memperkuat Indeks Ketahanan Pangannya dan memastikan bahwa seluruh masyarakatnya memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

4. PERTANAHAN

Berdasarkan data rekapitulasi tanah di Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 1960 hingga 2024 yang dirilis oleh BPS Prov. NTT, telah menunjukkan bahwa sebanyak 65.591 bidang tanah yang telah terdaftar dengan total luas mencapai 419.511.965 meter persegi. Data tersebut telah mampu menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama puluhan tahun dalam proses legalisasi kepemilikan tanah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun, di balik data tanah terdaftar tersebut terdapat tantangan besar berupa masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar. Berdasarkan estimasi, bahwa jumlah bidang tanah yang belum terdaftar telah mencapai 156.359 bidang, yang artinya jauh melebihi jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar. Sehingga mengindikasikan bahwa sebagian besar tanah di Kabupaten Sumba Barat Daya masih berstatus belum bersertifikat atau belum memiliki legalitas formal. Dengan percepatan pendaftaran tanah, diharapkan ketidakpastian hukum dapat diminimalisir, serta investasi dapat meningkat, dan pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

5. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Kualitas lingkungan hidup merupakan cerminan penting dari keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2024 mencapai 63,52, yang menempatkannya dalam kategori "Sedang";

- b. Persoalan krusial yang dihadapi Kabupaten Sumba Barat Daya terkait penanganan sampah adalah belum optimalnya sistem pengelolaan yang ada. Akar dari masalah ini adalah keterbatasan infrastruktur penanganan sampah yang memadai, yang pada gilirannya mencakup beberapa aspek penting yaitu:
- Kabupaten Sumba Barat Daya menghadapi kendala serius dalam hal sarana dan prasarana persampahan. Kondisi kekurangan armada pengumpul sampah (truk, gerobak), tempat penampungan sementara (TPS) yang tidak memadai, atau fasilitas pengolahan sampah (misalnya, mesin pencacah atau fasilitas daur ulang) yang minim. Keterbatasan ini secara langsung telah menghambat proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dari sumbernya hingga ke tempat pemrosesan akhir;
 - Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus yang mengoperasionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ramadana. Keberadaan UPTD yang sangat vital untuk memastikan pengelolaan TPA berjalan secara profesional, terorganisir, dan berkelanjutan. Tanpa kelembagaan yang jelas, operasional TPA cenderung kurang efektif serta rawan menjadi masalah lingkungan, dan sulit untuk dikembangkan;
 - Aspek krusial lainnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah yang dimulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan di TPA sangat memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Kurangnya SDM yang berkompeten dapat mengakibatkan praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar serta memicu pencemaran lingkungan, dan mengurangi efisiensi keseluruhan sistem.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan administrasi kependudukan yang efisien dan mudah diakses adalah hak dasar setiap warga negara dan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini mencakup berbagai layanan vital seperti penerbitan :

- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Akta Pernikahan;
- Akta Perceraian;
- Akta Kematian;
- Akta Lahir.

Kualitas layanan yang belum optimal ini tentu berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dalam mengakses hak – hak sipil lainnya yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan daerah.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya masih belum optimal, kondisi ini dapat terlihat langsung pada belum termanfaatkannya potensi ekonomi masyarakat secara maksimal. Sehingga menjadi perhatian serius karena mengingat besarnya peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Beberapa aspek krusial yang memerlukan perhatian khusus adalah pendayagunaan potensi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes, dan keberlanjutan program pemberdayaan.

- **Pendayagunaan Potensi Masyarakat yang Belum Optimal:** Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki beragam potensi, baik dari segi sumber daya alam (pertanian, perikanan, pariwisata), kearifan lokal, maupun keterampilan tradisional. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali dan termanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sehingga keterbatasan akses terhadap informasi pasar, modal, dan pelatihan bisa menjadi penghambat utama;
- **Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang Terbatas:** Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tingkat masyarakat, khususnya di sektor pertanian atau industri rumahan. Namun, pengembangan dan diseminasi TTG yang sesuai dengan konteks lokal dan mudah diakses oleh masyarakat masih terbatas. Akibatnya, praktik – praktik ekonomi masih bersifat konvensional dan kurang efisien.
- **Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Terutama BUMDes yang Belum Kuat:** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa dan wadah bagi kegiatan usaha masyarakat. Namun, pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di Kabupaten Sumba Barat Daya belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan kapasitas manajemen, kurangnya modal, atau minimnya inovasi dalam jenis usaha BUMDes bisa menjadi faktor penghambat.
- **Keberlanjutan Penanganan Kegiatan Pemberdayaan:** Seringkali, program pemberdayaan masyarakat bersifat sporadis atau tidak berkelanjutan. Ketika sebuah proyek selesai, masyarakat tidak lagi mendapatkan pendampingan atau dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan dampak positif yang dihasilkan program tidak bertahan lama.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan data demografi yang dirilis oleh BPS Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 telah menunjukkan beberapa dinamika penting terkait pertumbuhan penduduk dan kesadaran dalam pengaturan kelahiran. Pada tahun 2024 Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki total jumlah penduduk 328.771 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,14%. Laju pertumbuhan ini mengindikasikan adanya penambahan populasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang stabil dapat menjadi modal pembangunan jika diimbangi dengan

kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan berdasarkan data dari BPS Prov. NTT yang dirilis pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rentang usia 15 – 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi (KB) di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 36,7% dan angka tersebut masih jauh dari rata – rata Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam program Keluarga Berencana (KB) yaitu 40,76%.

9. PERHUBUNGAN

Sektor transportasi dan pergudangan memiliki peran fundamental dalam mendukung mobilitas barang dan jasa, serta menghubungkan berbagai wilayah. Sektor ini secara inheren sangat erat kaitannya dengan urusan perhubungan, karena efisiensi dan kapasitas transportasi serta pergudangan sangat bergantung pada infrastruktur dan kebijakan perhubungan yang memadai. Pada tahun 2025 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya merilis data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 yang mencapai Rp. 163,17 miliar. Angka ini merefleksikan nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi darat, laut, udara, serta jasa penyimpanan dan pendistribusian barang di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oleh sebab itu, peningkatan dan perbaikan dalam urusan perhubungan harus menjadi tugas utama pemerintah daerah untuk mendorong investasi yang akan meningkatkan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor komunikasi dan informatika (Kominfo) memegang peranan krusial dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menyediakan layanan publik yang berbasis teknologi. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, meskipun peranan ini sangat strategis, terdapat dua permasalahan pokok yang menghambat optimalisasi fungsi Kominfo, yang memerlukan perhatian serius, yaitu :

- a. Ketersediaan sistem, sarana – prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi atau *e-government*, diantaranya :
 - Sistem dan Infrastruktur IT : belum adanya sistem aplikasi yang terintegrasi, jaringan internet yang stabil dan merata, atau *server* yang memadai untuk mendukung operasional pemerintahan digital;
 - Sarana dan Prasarana : Kurangnya perangkat keras seperti komputer, *printer*, atau perangkat jaringan yang modern dan mencukupi bagi seluruh instansi pemerintah daerah;

- SDM yang Terlatih : Belum adanya ASN yang memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk tugas-tugas pemerintahan;

Keterbatasan ini secara langsung menghambat efisiensi birokrasi, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik melalui platform digital.

- b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, khususnya dalam mematuhi peraturan perundang – undangan tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini disebabkan oleh:

- Absennya Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) : Kurangnya kerangka regulasi yang jelas dan terukur di bidang informasi dan komunikasi publik, serta bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan pengelolaan informasi tidak terstruktur dan tidak konsisten;
- Kurangnya Pedoman Operasional : Tanpa NSPK yang memadai, instansi pemerintah mungkin kesulitan dalam menentukan informasi apa yang harus dipublikasikan, bagaimana cara mempublikasikannya, dan standar kualitas apa yang harus dipenuhi.

Akibatnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan menjadi terbatas dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan juga kurang maksimal.

11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa koperasi aktif di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 85,11%. Persentase keaktifan yang tinggi ini adalah indikator positif yang mencerminkan potensi besar koperasi dalam menggerakkan ekonomi. Namun informasi lebih lanjut mengenai perkembangan koperasi menurut jenisnya, kelembagaannya, kepengurusan, jumlah anggota, akses terhadap sumber pembiayaan, dan kinerja usahanya tidak diketahui secara mendetail. Ketiadaan data yang rinci ini akan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan koperasi yang tepat sasaran. Tanpa pemahaman mendalam tentang profil dan kebutuhan masing-masing koperasi, upaya untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan usaha, atau memfasilitasi akses permodalan menjadi tidak efektif. Akibatnya potensi besar koperasi untuk mendukung perekonomian daerah di masa mendatang tidak dapat dioptimalkan;
- b. Serupa dengan koperasi, sektor UMKM di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan jumlah yang signifikan dengan total 1.311 unit UMKM yang tercatat. Jumlah ini menandakan bahwa UMKM adalah denyut nadi ekonomi masyarakat. Namun seperti halnya koperasi, informasi lebih lanjut tentang perkembangan dan kinerja usaha UMKM juga tidak diketahui.

12. PENANAMAN MODAL

Berdasarkan data penanaman modal yang dirilis oleh BPS Prov. NTT tahun 2025 mencatatkan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 telah mengalami dinamika yang menarik antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sektor investasi, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di suatu daerah.

- a. Pada tahun 2024, PMDN di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi dalam jumlah proyek dengan realisasi mencapai 34 proyek. Dari sisi nilai investasi, PMDN menyumbangkan Rp. 11.378.700.000 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu, terdapat juga investasi dalam mata uang asing senilai 768.831 USD yang mengindikasikan bahwa investor domestik cukup aktif dalam mengembangkan usahanya di berbagai sektor di kabupaten Sumba Barat Daya dengan preferensi pada jumlah proyek yang lebih banyak meskipun dengan nilai investasi rupiah per proyek yang mungkin lebih kecil dibandingkan PMA;
- b. Di sisi lain, PMA mencatat realisasi sebanyak 24 proyek di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024. Meskipun jumlah proyeknya lebih sedikit dibandingkan PMDN, PMA menunjukkan nilai investasi rupiah yang jauh lebih besar, yaitu mencapai Rp.60.715.520.000 (enam puluh miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu, investasi dalam mata uang asing tercatat sebesar 4.102.400 USD. Nilai investasi rupiah yang lebih besar dari PMA per proyek menunjukkan adanya investasi asing dalam skala yang lebih besar atau padat modal dibandingkan investasi domestik.

Data ini menunjukkan adanya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini pemerintah daerah perlu terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menyederhanakan perizinan, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan memastikan kepastian hukum bagi investor.

13. KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA

Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan capaian yang mengesankan dalam hal cakupan organisasi pemuda aktif dan wirausaha muda, yang mencapai 100%. Ini mengindikasikan partisipasi dan inisiatif yang tinggi dari kalangan pemuda di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi sebuah modal sosial yang sangat berharga. Namun, di balik angka partisipasi yang tinggi tersebut, kinerja riil kepemudaan melalui organisasi mereka dan peranan mereka sebagai wirausaha muda belum tergambar dengan jelas. Ketiadaan informasi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam mengukur dampak sesungguhnya dari keberadaan mereka. Mengingat proporsi pemuda yang merupakan bagian cukup besar dari struktur kependudukan menurut usia di Kabupaten Sumba Barat Daya, perhatian khusus terhadap pembinaan dan pengembangan kepemudaan dari aspek

sosial, politik, dan ekonomi sangatlah penting. Tanpa pembinaan yang terarah, potensi besar ini mungkin tidak termanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah.

Selain kepemudaan secara umum, sektor olahraga di Kabupaten Sumba Barat Daya juga menghadapi tantangan. Prestasi di bidang olahraga juga belum optimal sepenuhnya, kondisi ini erat kaitannya dengan beberapa faktor utama yaitu :

- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Belum Memadai: Infrastruktur olahraga yang terbatas atau kurang terawat menjadi hambatan besar dalam pembinaan atlet. Tanpa fasilitas yang layak, baik untuk latihan maupun kompetisi, sulit bagi bakat – bakat muda untuk berkembang secara maksimal;
- Kurangnya Pelatih Bersertifikat : Kualitas pembinaan sangat bergantung pada kompetensi pelatih. Keterbatasan pelatih yang memiliki sertifikasi resmi menunjukkan bahwa standar kepelatihan mungkin belum merata atau sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menghasilkan atlet yang berprestasi;
- Pelaksanaan Sistem Penjaringan Bakat yang Belum Mantap : Untuk mendapatkan atlet yang berpotensi, diperlukan sistem penjaringan bakat yang terstruktur dan berkelanjutan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga komunitas. Jika sistem ini belum solid, maka banyak talenta – talenta muda yang mungkin tidak teridentifikasi atau tidak mendapatkan kesempatan pembinaan yang tepat.

14. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan memiliki peran yang krusial sebagai pusat pengetahuan dan informasi. Tetapi di Kabupaten Sumba Barat Daya, penyelenggaraan perpustakaan berbasis layanan fisik saat ini masih belum memadai. Hal ini telah memperhadapkan masyarakat dengan keterbatasan dalam akses buku, fasilitas baca, atau jam operasional yang terbatas. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi terdapat kebutuhan mendesak untuk mentransformasi pendekatan perpustakaan. Di masa mendatang akan menjadi perhatian utama yang harus dialihkan pada pengembangan perpustakaan berbasis virtual. Konsep perpustakaan virtual memungkinkan akses terhadap koleksi digital, sumber daya elektronik, dan berbagai layanan dari mana saja dan kapan saja yang melampaui batasan fisik dan geografis.

15. KEARSIPAN

Pengelolaan arsip yang baik merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, tata kelola arsip yang baku dan tertata masih belum optimal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) : Kurangnya staf yang terlatih dan memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan;
- Ketiadaan Sistem yang Memadai : Belum adanya sistem pengelolaan arsip digital atau manual yang terstandarisasi dan efisien;

- Infrastruktur Penunjang yang Terbatas : Kurangnya fasilitas penyimpanan arsip yang aman, peralatan digitalisasi, atau sarana lain yang mendukung pengelolaan arsip modern.

Hingga berakibat pada akses terhadap informasi arsip bisa menjadi sulit, berisiko kehilangan data penting, dan menghambat efisiensi administrasi pemerintahan. Peningkatan di ketiga aspek ini sangat krusial untuk menciptakan sistem kearsipan yang efektif di Kabupaten Sumba Barat Daya.

16. STATISTIK

Sektor statistik memegang peranan krusial dalam menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, serta proses monitoring dan evaluasi. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang statistik dapat dilihat dari ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi. Dalam konteks ini, Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan upaya positif melalui penerbitan rutin buku data "Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka" dan publikasi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Keberadaan publikasi – publikasi ini menunjukkan komitmen untuk menyediakan data dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, meskipun publikasi rutin telah dilakukan, terdapat masalah mendasar seperti informasi/data yang disajikan belum sepenuhnya menunjang kebutuhan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

17. PERSANDIAN

Dalam era digital, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*) sangat membutuhkan dukungan sistem persandian yang kuat untuk menjaga keamanan data dan informasi. Namun, di Kabupaten Sumba Barat Daya pengamanan informasi pada tingkat daerah belum berjalan maksimal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu :

- Ketersediaan Infrastruktur yang Belum Memadai : Perangkat keras, jaringan, dan fasilitas fisik yang mendukung sistem persandian, seperti pusat data yang aman atau perangkat enkripsi, belum mencukupi;
- Ketiadaan Sistem Persandian yang Optimal : Belum adanya sistem atau *software* persandian yang terintegrasi, andal, dan sesuai standar untuk mengenkripsi, mendekripsi, dan mengelola informasi rahasia;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai : Kurangnya personel yang memiliki keahlian khusus di bidang persandian dan keamanan siber untuk mengoperasikan, memantau, dan mengembangkan sistem pengamanan informasi.

Implikasi dari belum maksimalnya pengamanan informasi ini sangat serius. Data dan informasi penting milik pemerintah daerah berisiko tinggi terhadap kebocoran, modifikasi tidak sah, atau serangan siber. Hal ini dapat merusak kredibilitas pemerintah, mengganggu pelayanan publik, dan membahayakan data pribadi masyarakat.

18. KEBUDAYAAN

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mencakup berbagai unsur budaya seperti kampung adat, cagar budaya, artefak, situs, dan ritus. Berdasarkan informasi yang ada, perlindungan terhadap berbagai ikon budaya ini telah memadai. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dalam menjaga warisan leluhur agar tetap lestari. Namun, di balik keberhasilan dalam aspek perlindungan, terdapat tantangan besar yang berkaitan dengan keberlanjutan upaya pelestariannya. Inti permasalahannya adalah bagaimana memastikan bahwa keseluruhan ikon budaya tersebut tidak hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga dapat menjadi sarana belajar yang hidup dan obyek budaya yang menarik bagi generasi mendatang dan juga wisatawan.

C. URUSAN PILIHAN

1. PARIWISATA

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang diindikasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih mencatatkan angka yang relatif kecil yaitu Rp. 2,15 miliar pada tahun 2024. Meskipun merefleksikan adanya kontribusi ekonomi dari sektor ini, selain itu juga menegaskan bahwa potensi besar pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya belum sepenuhnya tergali secara optimal dan sumbangsihnya terhadap keseluruhan PDRB daerah masih sangat kecil. Meskipun data tahun 2024 mencatatkan jumlah tamu yang menginap di hotel cukup beragam, dengan 12.230 tamu domestik dan 4.589 tamu asing, nilai ekonomi yang dihasilkan dari akomodasi dan makan minum ini belum sebanding dengan kekayaan alam dan budaya yang ditawarkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menunjukkan bahwa rantai nilai pariwisata mungkin belum sepenuhnya berkembang atau wisatawan yang datang belum membelanjakan dananya secara signifikan di berbagai lini usaha pariwisata lainnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. PERTANIAN

- a. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada sektor pertanian mencapai Rp. 1.921,44 miliar, sehingga menjadikannya sektor dominan dan unggulan. Namun, kontribusi yang tinggi pada PDRB ini belum sepenuhnya berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan utamanya adalah seluruh hasil sektor ini belum dihilirisasi, yang berarti sebagian besar masih dijual sebagai bahan baku. Akibatnya, produk – produk tersebut tidak memiliki nilai tambah yang signifikan serta membatasi potensi pendapatan petani dan pelaku usaha. Selain tantangan hilirisasi, data

tahun 2024 juga menunjukkan penurunan kinerja pada produksi padi, salah satu komoditas pertanian yang sangat vital dengan rincian sebagai berikut :

- Luas Panen mengalami penurunan dari 14.302,87 hektar pada tahun 2023 menjadi 13.253,47 hektar pada tahun 2024;
- Produktivitas mengalami penurunan dari 34,74 kuintal per hektar pada tahun 2023 menjadi 30,21 kuintal per hektar pada tahun 2024; dan
- Produksi padi secara keseluruhan juga mengalami penurunan dari 49.691,20 ton pada tahun 2023 menjadi 40.037,84 ton pada tahun 2024.

Ketiga komponen ini, yaitu luas panen, produktivitas, dan produksi padi, semuanya menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

- b. Sektor peternakan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sektor pertanian adalah komponen vital yang menggerakkan ekonomi dan menjadi bagian yang terintegrasi dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada tahun 2024, ternak babi menonjol sebagai sektor peternakan yang dominan dan unggulan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data menunjukkan tren positif pada populasi babi dengan peningkatan signifikan menjadi 65.897 ekor pada tahun 2024 dari 63.894 ekor pada tahun 2023 yang menandakan bahwa pertumbuhan yang kuat dalam populasi ternak babi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peningkatan ini menunjukkan ketahanan dan potensi besar sektor ini sebagai penopang ekonomi lokal. Namun keberhasilan ini hadir di tengah ancaman yang serius, dimana selama tiga tahun berturut – turut virus *African Swine Fever* (ASF) telah mewabah di Kabupaten Sumba Barat Daya. ASF adalah penyakit yang sangat menular dan memiliki tingkat fatalitas hingga 100% pada babi yang terinfeksi. Wabah ini secara konsisten menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak babi. Meskipun menghadapi tantangan berat dari ASF, namun pertumbuhan populasi babi mengindikasikan upaya keras peternak dan mungkin efektivitas langkah – langkah mitigasi yang telah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi bukti daya tahan dan pentingnya sektor peternakan babi bagi perekonomian lokal.

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal pada tahun 2023. Potensi maritim ini terlihat dari dua komoditas utama yaitu : hasil perikanan tangkap laut dan rumput laut. Produksi perikanan tangkap di laut mencapai 1.203.200 kilogram (sekitar 1.203,2 ton) pada tahun 2023. Dari volume tersebut, sektor ini berhasil membukukan nilai ekonomi sebesar Rp. 34.860,31 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa perikanan tangkap laut merupakan penyumbang yang sangat substansial bagi pendapatan daerah dan mata pencarian masyarakat pesisir. Selain perikanan tangkap, rumput laut juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang sangat menjanjikan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Produksi

rumput laut pada tahun 2023 mencapai 1.688.741 kilogram (sekitar 1.688,74 ton). Meskipun nilai per kilogramnya mungkin tidak setinggi ikan tangkap, volume produksi yang besar ini menghasilkan nilai ekonomi yang tidak kalah impresif, yaitu Rp. 6.754,94 miliar. Kondisi ini sekaligus menegaskan peran strategis rumput laut sebagai komoditas yang memberikan kontribusi besar dan terus berkembang.

4. PERDAGANGAN

Pada tahun 2024, Sektor perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Sumba Barat Daya mencatatkan perolehan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 742,98 miliar berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan total PDRB ADHB Kabupaten Sumba Barat Daya secara keseluruhan. Kontribusi yang relatif rendah ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang menghambat pertumbuhan optimal sektor perdagangan di Kabupaten Sumba Barat Daya, diantaranya sebagai berikut :

- Keterbatasan Modal dan Jaringan bagi UMKM Perdagangan : Pelaku UMKM di sektor perdagangan seringkali menghadapi kesulitan akses permodalan dan jaringan distribusi yang luas. Hal ini tentunya membatasi skala usaha mereka dan kemampuan untuk bersaing;
- Regulasi dan Perizinan : Meskipun tidak disebutkan secara langsung, prosedur regulasi atau perizinan yang rumit bagi usaha perdagangan dapat menghambat pertumbuhan;
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi (*e-commerce*) : Kurangnya pemanfaatan platform *e-commerce* atau penjualan daring dapat membatasi jangkauan pasar dan efisiensi transaksi, terutama bagi UMKM.

5. PERINDUSTRIAN

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumba Barat Daya yang dirilis pada tahun 2025 menunjukkan kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 mencatatkan perolehan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp. 42 miliar sekaligus menunjukkan peningkatan positif dari tahun sebelumnya, di mana pada 2023 hanya mencapai Rp. 36,35 miliar. Meskipun adanya pertumbuhan, kontribusi sektor ini terhadap total PDRB ADHB Kabupaten Sumba Barat Daya secara keseluruhan masih tergolong sangat kecil. Kontribusi yang minim ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan belum berkembang optimal di Kabupaten Sumba Barat Daya. Berbagai faktor mendasar telah menjadi penghambat, diantaranya adalah:

- Minimnya Hilirisasi Produk Primer : Sektor – sektor dominan di Kabupaten Sumba Barat Daya, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagian besar masih menjual hasilnya dalam bentuk bahan baku mentah. Sehingga potensi nilai tambah dari pengolahan produk lokal di dalam daerah belum banyak terealisasi, karena bahan baku justru keluar untuk diolah di tempat lain;

- Keterbatasan Modal dan Investasi : Industri pengolahan memerlukan investasi besar untuk pembangunan fasilitas produksi, pembelian mesin, dan modal kerja. Akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai, baik dari perbankan maupun investor, masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha lokal;
- Keterbatasan Teknologi dan Inovasi : Pelaku industri pengolahan di Kabupaten Sumba Barat Daya mungkin masih menghadapi kendala dalam mengakses dan menerapkan teknologi pengolahan yang modern dan efisien dan kurangnya inovasi produk juga membatasi daya saing di pasar;
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas : Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus di bidang produksi, pengoperasian mesin, atau manajemen kualitas industri pengolahan masih kurang, sehingga menjadi penghalang bagi pengembangan industri yang lebih kompleks.

6. TRANSMIGRASI

Urusan transmigrasi memiliki potensi besar untuk pemerataan penduduk, pengembangan wilayah baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Kabupaten Sumba Barat Daya penyelenggaraan urusan transmigrasi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci yang saling berkaitan dan menghambat keberhasilan program transmigrasi. Hambatan utama dalam penyelenggaraan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- Perencanaan kawasan transmigrasi yang belum memadai;
- Pembangunan kawasan transmigrasi yang belum memadai;
- Pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal.

D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya telah menunjukkan adanya konsistensi yang positif dalam penjabaran program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Namun terdapat dua masalah utama yang menghambat efektivitas proses ini, diantaranya adalah:

- a. Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang Belum Optimal : Meskipun pengendalian dan evaluasi telah dilakukan, persentase pemanfaatan hasilnya masih tergolong rendah. Sehingga temuan dari proses evaluasi, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, belum secara maksimal dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan di periode selanjutnya. Akibatnya, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya kurang terintegrasi dalam siklus perencanaan;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Krusial Belum Optimal : Meskipun koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah telah berjalan baik, namun penyusunan dokumen perencanaan untuk bidang – bidang kunci seperti pemerintahan,

pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, serta infrastruktur dan kewilayahan belum secara optimal dilakukan. Oleh sebab itu seluruh detail, kelengkapan, atau kualitas dokumen perencanaan di sektor – sektor vital tersebut masih memerlukan peningkatan. Karena jika dokumen perencanaan sektoral ini tidak direncanakan secara optimal maka seluruh implementasi program di lapangan menjadi kurang terarah atau tidak efektif.

Singkatnya, Kabupaten Sumba Barat Daya telah memiliki kerangka perencanaan yang konsisten, namun masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan umpan balik dari evaluasi dan memperkuat kualitas detail perencanaan pada sektor – sektor strategis untuk mencapai pembangunan yang lebih efektif.

2. KEUANGAN

- a. Pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal ditandai dengan masih terbatasnya cakupan aset daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), serta rendahnya tingkat sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah. Hal ini menghambat upaya penertiban dan pemanfaatan aset secara maksimal;
- b. Pengelolaan pendapatan daerah juga belum berjalan secara optimal yang berdampak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

3. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Hasil – hasil penelitian dan pengembangan yang seharusnya menjadi dasar ilmiah dan data untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan belum dimanfaatkan secara maksimal;
- b. Kinerja penelitian dan pengembangan yang kurang optimal secara langsung akan berkorelasi dengan minimnya inovasi baru yang muncul dari daerah. Inovasi yang dihasilkan, baik dalam bentuk produk, proses, maupun layanan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi di berbagai sektor.

4. KEPEGAWAIAN

Kabupaten Sumba Barat Daya menghadapi tantangan yang signifikan dalam manajemen kepegawaiannya. Secara singkat, permasalahan utamanya adalah belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mencakup beberapa aspek penting, diantaranya :

- a. Peta Jabatan yang belum jelas : Kurangnya peta jabatan yang terstruktur dan sesuai standar membuat penempatan pegawai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kompetensi ASN dengan kebutuhan jabatan;
- b. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang Belum Optimal : Tanpa analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akurat, sulit untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan, pendistribusian tugas yang adil, serta standar kinerja yang realistis. Kondisi

- seperti ini bisa berakibat pada kekurangan atau kelebihan pegawai di unit tertentu, dan beban kerja yang tidak merata;
- c. Sistem Evaluasi Kinerja yang Kurang Efektif : Mekanisme evaluasi kinerja ASN yang belum optimal sangat menyulitkan identifikasi pegawai berkinerja tinggi atau yang membutuhkan pengembangan. Sehingga berakibat pada sistem promosi dan mutasi yang tidak berbasis kinerja yang jelas;
 - d. Pengembangan kompetensi yang terbatas : Program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan secara maksimal. sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM ASN untuk menjawab tantangan dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

Keseluruhan masalah ini tentunya akan berdampak pada efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan motivasi kerja ASN di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga perbaikan manajemen kepegawaian secara menyeluruh sangat penting dan krusial untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

5. PENGAWASAN

- a. Cakupan perangkat daerah yang diaudit sudah optimal, namun tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum maksimal;
- b. Reviu dokumen laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah telah dilakukan, namun perbaikan kinerja belum merata di seluruh perangkat daerah;
- c. Cakupan audit APBDes belum optimal akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas APIP yang masih perlu ditingkatkan.

6. UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, hal ini ditandai dengan cakupan pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan yang masih bervariasi antar wilayah;
- b. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan juga belum dilaksanakan secara optimal yang tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang masih berbeda – beda antar desa.
- c. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah dilaksanakan, namun hasilnya belum maksimal karena cakupan fasilitasi dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa masih terbatas.

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan telah dilaksanakan, namun cakupan koordinasi dalam bidang wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan masih belum optimal;

- b. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sudah berjalan, namun cakupan ormas yang terdaftar serta pembinaan terhadap LSM, ormas, dan OKP di tingkat kabupaten masih belum maksimal.

2.8 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis kabupaten, perlu diidentifikasi isu strategis yang kemudian masing-masing dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani. Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, dilakukan analisis isu strategis pada tingkat global, nasional dan daerah. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat global, nasional dan Provinsi NTT. Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan telaahan lebih dahulu terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat global, nasional dan regional untuk menentukan isu-isu mana yang sedang berkembang khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Isu – isu yang terjadi secara global umumnya bisa menjadi isu-isu yang ada pada tingkat nasional karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Kemudian isu – isu nasional yang ada merupakan akumulasi dari setiap isu yang terjadi di setiap daerah – daerah di Indonesia, sehingga perlu untuk melihat seberapa jauh keterlibatan daerah untuk mengatasi isu-isu nasional yang terjadi di wilayahnya. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional maupun daerah.

2.8.1 ISU STRATEGIS GLOBAL

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 – 2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015 – 2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a) Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- b) Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c) Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- d) Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e) Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

- a) Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- b) Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- c) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- d) Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- e) Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a) Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- b) Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- c) Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- d) Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- e) Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

- f) Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

- a) Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Target-target SDGs yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, diantaranya pandemi covid-19 dan konflik geopolitik. Pandemi covid 19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti *lockdown*, *physical distancing*, *travel ban/restriction*, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

2.8.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia ke depan :

1. KEMISKINAN

Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup

tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

2. KESENJANGAN JAWA DAN LUAR JAWA

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten, jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Jawa (*Java Centris*), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen.

Masih tingginya ketimpangan antar wilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal khususnya di bagian

timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar pulau Jawa terutama di KTI. Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan, ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.

3. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA RENDAH

Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, yaitu sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

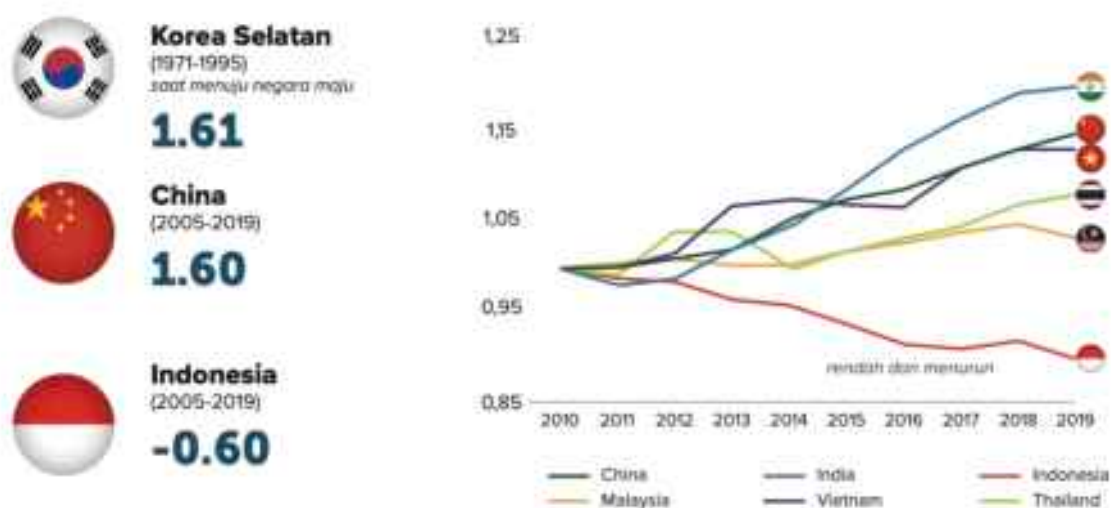
4. INTEGRASI DOMESTIK TERBATAS

Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Saat ini, ekonomi domestik Indonesia belum terintegrasi secara optimal, dengan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain (a) pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022); (b) infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik; (c) masih banyaknya regulasi yang menghambat; serta (d) kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia yang ditunjukkan oleh kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan Tiongkok mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk), serta tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara Tiongkok 1,21 persen).

5. RENDAHNYA TINGKAT PRODUKTIVITAS

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.

GAMBAR 2. 54 TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY INDEX 2010 – 2019 (2010 = 1,0)



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025 – 2045

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005 – 2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata rata 4,7 persen selama tahun 2010 – 2015. Kemudian, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015 – 2022. Rendahnya pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

6. IPTEKIN DAN RISET LEMAH

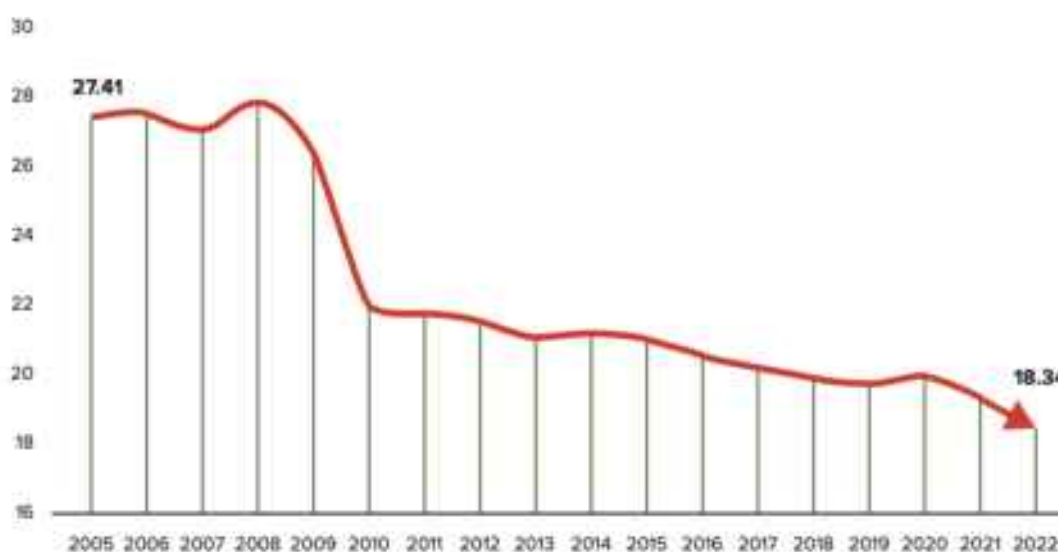
Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin). Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa

dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi masih menghadapi tantangan di antaranya masih lemahnya komitmen pemerintah terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020. Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1790), Singapura (7287), dan Korea Selatan (8408) pada tahun 2019. Ekosistem riset dan inovasi juga masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1445, jauh tertinggal dari Malaysia (1863), Singapura (9766) dan Korea Selatan (267,527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H – Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697) dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

7. DEINDUSTRIALISASI DINI DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN YANG MASIH RENDAH

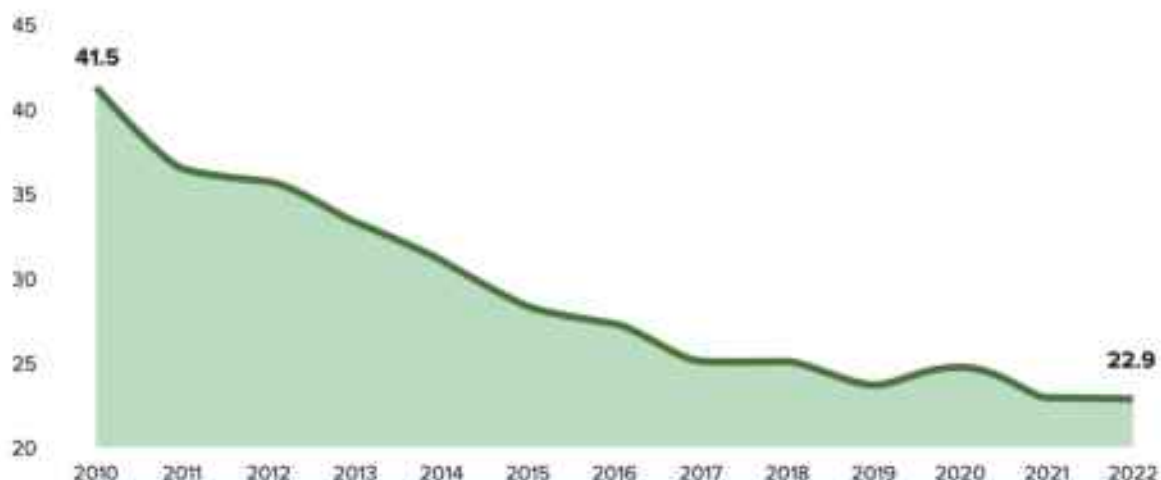
Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

GAMBAR 2. 55 KONTRIBUSI MANUFAKTUR TERHADAP PDB (%PDB)



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025 – 2045

GAMBAR 2. 56 PRODUKTIVITAS PERTANIAN (JUTA RUPIAH/PEKERJA



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025 – 2045

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang masih rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan sebesar 9,07 persen dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat sebesar Rp. 18,26 juta per pekerja dari Rp. 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

8. PARIWISATA DI BAWAH POTENSINYA

Kinerja pariwisata di Indonesia meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan. Adapun kinerja pariwisata berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas. Disamping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan.

9. KONTRIBUSI UMKM DAN KOPERASI KECIL TERHADAP PEREKONOMIAN

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah :

- a. Sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah;
- b. Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha;
- c. Rendahnya kapasitas pengelolaan;
- d. Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; dan
- e. Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

10. INFRASTRUKTUR DAN LITERASI DIGITAL RENDAH

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi diantaranya :

- a. Jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal dibanding negara sebanding (Malaysia 96,8 persen dan Thailand 85,3 persen);
- b. Masih rendah dan belum meratanya literasi digital dan talenta digital;
- c. Masih belum sepenuhnya masyarakat terjangkau jaringan 4G (96,97 persen) yang berkualitas dan kecepatan internet yang relatif masih terbatas;
- d. Rentannya keamanan siber yang masih harus ditingkatkan;
- e. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri; dan
- f. Sulitnya kondisi geografis di beberapa daerah.

11. EKONOMI LAUT BELUM OPTIMAL

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada beberapa masalah yaitu :

- a. Masih rendahnya pemanfaatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan SloC (*Sea Lines of Communication*). Pemanfaatan sumber daya laut tidak optimal dan berkelanjutan, tercermin dari ekspor perikanan yang mencapai US\$ 6,24 miliar pada tahun 2022 dibandingkan potensi ekonomi kelautan sebesar US\$1.334 miliar;
- b. Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan;
- c. Masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut;
- d. Terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan;
- e. Rendahnya penanganan sampah plastik yang ditunjukkan dari data kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 440.160,7 ton (*land base and sea base*) pada tahun 2021. Kegiatan ilegal, unreported, dan unregulated fishing (IUU) yang masih tinggi, yaitu ditangkapnya 97 kapal ikan, yang terdiri dari 79 kapal ikan Indonesia, 18 kapal asing dan 45 kasus TPKP;
- f. Belum berkembangnya industri pengolahan dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi;
- g. Tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut belum optimal karena hanya lima provinsi (Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Bali) yang sudah melakukan pengintegrasian RZWP3K dengan RTRW.

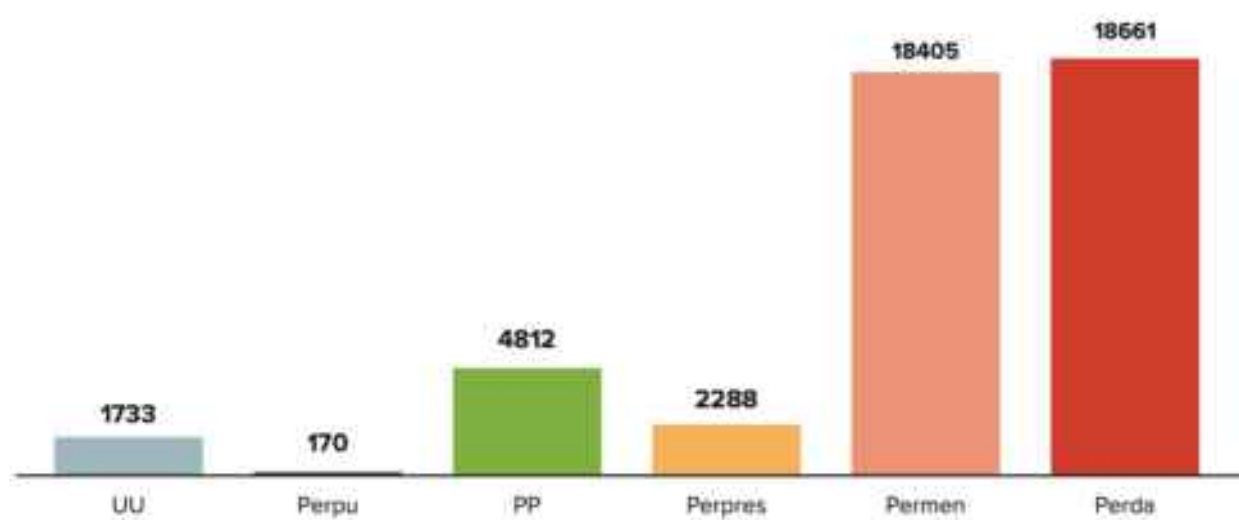
12. PEMBANGUNAN BELUM BERKELANJUTAN

Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, Indonesia harus mengatasi beberapa hambatan seperti penggunaan energi fosil yang masih tinggi, tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.318 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Selain itu, pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah, tercermin dari limbah B3 yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022. Regulasi serta sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif, meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang meningkatkan degradasi hutan deforestasi, serta masih tingginya pencemaran air permukaan dan meningkatnya kelangkaan air.

13. HYPER REGULATION DAN KUALITAS REGULASI RENDAH

Tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarunya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

GAMBAR 2. 57 KONDISI HYPER REGULASI



Sumber : peraturan.bpk.go.id; peraturan.go.id, 2023

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

2.8.3 ISU STRATEGIS KLHS RPJMD TAHUN 2025 – 2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

permbangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP). Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan hasil pencapaian TPB dan identifikasi isu strategis dalam KLHS RPJMD maka terdapat 5 (lima) isu strategis yang perlu diantisipasi dan menjadi isu yang harus diselesaikan dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Isu ketimpangan sosial;
2. Isu ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi;
3. Isu akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
4. Isu pengelolaan sampah dan limbah B3;
5. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan;
6. Isu ketahanan iklim dan bencana; dan
7. Isu good governance dan akses pelayanan publik yang belum optimal.

2.8.4 ISU STRATEGIS REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis regional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipetakan pada beberapa transformasi sebagai berikut :

1. ISU STRATEGIS TRANSFORMASI SOSIAL

Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif (Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial serta Pembangunan Gender, Equalitas, Disability, dan Sosial Inklusi (GEDSI) yang belum optimal). Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal social budaya yang berkaitan dengan 151 kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit esehat (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan *underweight*.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningaktan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan Gender, Equalitu, Disabilitas, dan Sosial Inklusi (GEDSI), peningkatan perlindungan sosial bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

2. ISU STRATEGIS TRANSFORMASI EKONOMI

Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi :

1. Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
2. Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar;
4. Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan.

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor industri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimisasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim. Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis Core Competence Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. ISU STRATEGIS TRANSFORMASI TATA KELOLA

Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan (Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan) Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap derajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. ISU STRATEGIS SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

Penekanan utama pada Isu yakni Stabilitas Makro dengan penjabaran isu strategis daerah sebagai berikut: Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi /hexa helix; Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan

5. ISU STRATEGIS KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI

Fokus isu meliputi aspek ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang dijabarkan dalam beberapa isu strategis daerah sebagai berikut: Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi; Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan; Perubahan Iklim, ketahanan pangan dan kebencanaan.

Keselarasan Isu Daerah dengan Isu KLHS serta Isu Lingkungan Dinamis yang mencakup Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional dapat dilihat secara mendetail pada table di bawah ini yang menjelaskan bahwa Isu Strategis Daerah Provinsi NTT telah selaras dengan isu KLHS, isu Global, Nasional dan Regional. Selain itu, keselarasan menggambarkan adanya sinergitas setiap isu pembangunan yang wajib diselesaikan dengan dukungan kerja kolaborasi produktif bersama pihak / hexa helix demi mewujudkan agenda pembangunan NTT sekaligus mencapai tujuan pembangunan global yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.8.5 ISU STRATEGIS DAERAH

Setelah dilakukan telaahan menyeluruh terhadap berbagai isu strategis di tingkat global dan nasional, serta mencermati berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah isu yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Isu-isu ini bersifat penting, mendasar, mendesak, serta berjangka panjang, dan akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian visi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun ke depan dan hingga dua dekade mendatang.

Isu-isu strategis ini telah dirumuskan secara komprehensif dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025–2045. Keberadaan isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam merancang arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara berkelanjutan, partisipatif, serta berbasis potensi dan tantangan lokal dalam lima tahun kedepan. Adapun beberapa isu strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025–2045 antara lain:

1. KESENJANGAN DAN KETERTINGGALAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024, dimana Kabupaten Sumba Barat Daya termasuk salah satu dari 13 (tiga belas) daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2022 terkait laju pertumbuhan ekonomi ditahun tersebut sebesar 3,8% dan masih berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang sama sebesar 3,15%. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi yang mumpuni untuk keluar dari status daerah tertinggal, karena memiliki potensi pergerakan ekonomi diatas rata – rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi yang dimiliki lebih kepada sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata berbasis alam.

2. TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2023 menunjukkan persentase penduduk miskin ditahun tersebut adalah 27,48% dengan indeks kedalaman kemiskinan 5,86 dan indeks keparahan kemiskinan 1,55 pada tahun yang sama. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2023 adalah sebesar 101.400 ribu jiwa (27,48%). Bila dibandingkan dengan persentase rata – rata penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya masih lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yang hanya 19,96%, begitu juga dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebesar 3,33 dan 0,80.

Sehubungan dengan hal tersebut, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya

kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini sebagai akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif serta belum optimalnya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

3. RENDAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Nilai IPM Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2023 sebesar 63,74 dan masih dibawah rata – rata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang sama sebesar 66,68. Secara umum, akar permasalahan rendahnya IPM ini dipengaruhi oleh aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. Pada tahun 2023 prevalensi *stunting* di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 32% dan menjadi kabupaten tertinggi prevalensi *stunting* nya di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun tersebut.

Selain tingginya prevalensi *stunting*, angka literasi dan numerasi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2023 masih dibawah 50%, dimana sebesar 38,15% untuk literasi dan 32,82% untuk numerasi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sebesar 47,86% untuk literasi dan 44,96% untuk numerasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun tersebut. Rendahnya IPM di Kabupaten Sumba Barat Daya juga disebabkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan data, Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023 mencapai 68,99 tahun namun masih dibawah rata – rata nasional yang berkisar antara 70 – 74 tahun pada tahun yang sama, sedangkan untuk rata – rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 6,38 tahun yang berarti masih jauh dari rata – rata lama sekolah secara nasional yang berkisar antara 12 – 13 tahun. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

4. RENDAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Struktur perekonomian di Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini didominasi oleh sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 1,970.70 (milyar) atau 39,79% terhadap total PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023. Sementara sektor – sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa sejajar dengan kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa. Namun di satu sisi, ini menunjukkan peluang dan potensi Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan (pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan).

Kabupaten Sumba Barat Daya perlu mengembangkan sub sektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusi sektor primer ini cukup tinggi untuk perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama.

Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Sektor industri di Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Peran sektor industri pada pembentukan PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dominan karena kontribusi terbesar perekonomian adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian hanya sebesar 0,81% pada tahun 2023, mengindikasikan ketergantungan Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap suplai produk olahan dari daerah lain sangat tinggi. Oleh karena itu, industri pengolahan berbasis sumber daya alam perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi alam di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan berkembangnya sektor industri, aktivitas di sektor – sektor lain akan turut meningkat karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku dari sektor primer.

Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat ekstraksi tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari

masyarakat setempat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal untuk mendorong transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi pada sektor pertanian perlu dilakukan sehingga ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*).

5. PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN PANGAN, DAN PENANGANAN BENCANA

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori “kode merah bagi manusia”. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga Tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan GRK yang signifikan di atmosfer dan berbagai aktivitas manusia. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan bagi daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Isu yang juga menjadi perhatian serius bagi Kabupaten Sumba Barat Daya adalah terkait dengan ketahanan pangan, dimana Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2023 sebesar 62,66 masuk kategori agak rentan. Tantangan utama ketahanan pangan terkait dengan sisi demand, dimana pemerintah harus memenuhi permintaan pangan bagi penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya yang diproyeksikan sebanyak 360.888 jiwa pada tahun 2045. Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadinya pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan.

Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Lembaga penelitian padi di Philipina melaporkan bahwa peningkatan suhu 1 C dapat mengakibatkan terjadinya penurunan panen padi sebesar 10%. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia (*antrophogenik*) yang menghasilkan “Emisi Gas Rumah Kaca”. Gas rumah kaca di atmosfer menghasilkan pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan terjadinya penurunan curah hujan dan berpotensi mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian akan memicu kenaikan harga pangan yang selanjutnya berimbas

pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Situasi ini akan meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kasus kelaparan pangan ekstrim. Selain itu resiko bencana dapat mengakibatkan menurunnya produksi pertanian dan menimbulkan terjadinya kelaparan karena tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat yang jumlahnya terus bertambah. Secara tidak langsung, permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya juga mempengaruhi kondisi lingkungan secara regional, dan global.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023 sebesar 61,68 masuk dalam kriteria sedang, sehingga dalam perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan perlu ditingkatkannya kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi kriteria baik hingga sangat baik berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kabupaten Sumba Barat Daya juga termasuk daerah dengan resiko rawan bencana yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki indeks resiko 114,55 (kategori sedang). Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan.

6. BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN PARIWISATA

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2022. Dengan adanya rencana induk tersebut diharapkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat Daya semakin terarah dan diharapkan mampu memberikan *multiplier effects* pada berbagai sektor dan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat untuk menuju taraf sejahtera. Namun berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan jumlah kunjungan yang sebelumnya 8.214 orang pada tahun 2018 menurun menjadi 2.459 pada tahun 2022.

Kondisi ini harus disikapi secara serius dan menjadi perencanaan pembangunan jangka panjang, mengingat potensi wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat besar, walaupun masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Kabupaten Sumba Barat Daya dianugerahi dengan pesisir pantai sepanjang 97 Km yang bisa menjadi potensi besar wisata bahari, serta ritual adat pasola yang menjadi event tahunan dan telah menjadi *icon* Kabupaten Sumba Barat Daya. Kinerja sektor pariwisata juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini ditunjukkan dengan PDRB sektor akomodasi, makan dan minum yang menjadi pendukung utama dari pariwisata hanya mampu berkontribusi sebesar Rp. 1,70 (milyar) atau 0,04% pada tahun 2023.

7. BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kabupaten Sumba Barat Daya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan standar pelayanan yang belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar.

Tahun 2023, Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan skor indeks pelayanan publik 47,41 dan masuk kriteria zona merah. Rendahnya skor indeks pelayanan publik juga disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum sepenuhnya menerapkan *e-government* sehingga menghambat seluruh proses digitalisasi pelayanan publik, selain itu belum meratanya infrastruktur digital disemua wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan keterbatasan kapasitas SDM. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, ditandai dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan.

Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal.

Kontribusi PAD Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumber – sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

TABEL 2. 36 PERSANDINGAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Pariwisata	Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang diindikasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih mencatatkan angka yang relatif kecil yaitu Rp. 2,15 miliar pada tahun 2024. Meskipun merefleksikan adanya kontribusi ekonomi dari sektor ini, selain itu juga menegaskan bahwa potensi besar pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya belum sepenuhnya tergali secara optimal dan sumbangsihnya terhadap keseluruhan PDRB daerah masih sangat kecil. Meskipun data tahun 2024 mencatatkan jumlah tamu yang menginap di hotel cukup beragam, dengan 12.230 tamu domestik dan 4.589 tamu asing, nilai ekonomi yang dihasilkan dari akomodasi dan makan minum ini belum sebanding dengan kekayaan alam dan budaya yang ditawarkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menunjukkan bahwa rantai nilai pariwisata mungkin belum sepenuhnya berkembang atau wisatawan yang datang belum membelanjakan dananya secara signifikan di berbagai lini usaha pariwisata lainnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.	1. Isu ketimpangan sosial; 2. Isu ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi; 3. Isu akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman; 4. Isu pengelolaan sampah dan limbah B3; 5. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan; 6. Isu ketahanan iklim dan bencana; dan 7. Isu good governance dan akses pelayanan publik yang belum optimal.	Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs, meliputi: a) Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; b) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; c) Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Kesenjangan jawa dan luar jawa; 2. Kualitas SDM rendah; 3. Integrasi domestik terbatas; 4. Rendahnya Tingkat produktivitas; 5. Pariwisata dibawah potensinya; 6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil terhadap perekonomian; 7. Infrastruktur dan literasi digital rendah; 8. Pembangunan belum berkelanjutan;	Pengembangan superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional	1. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah 2. Tingkat kemiskinan 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 4. Rendahnya pertumbuhan ekonomi 5. Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penanganan bencana 6. Belum optimalnya pengembangan pariwisata 7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Pertanian dan Potensi Perkebunan	Pada tahun 2025, BPS Kabupaten Sumba Barat Daya merilis data bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada sektor pertanian mencapai Rp. 1.921,44 miliar, sehingga menjadikannya sektor dominan dan unggulan. Namun, kontribusi yang tinggi pada PDRB ini belum sepenuhnya berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan utamanya adalah seluruh hasil sektor ini belum dihilirisasi, yang berarti sebagian besar masih dijual sebagai bahan baku. Akibatnya, produk – produk tersebut tidak memiliki nilai tambah yang signifikan serta membatasi potensi pendapatan petani dan pelaku usaha. Selain tantangan hilirisasi, data tahun 2024 juga menunjukkan penurunan kinerja pada produksi padi, salah satu komoditas pertanian yang sangat vital dengan rincian sebagai berikut : • Luas Panen mengalami penurunan dari 14.302,87 hektar pada tahun 2023 menjadi 13.253,47 hektar pada tahun 2024; • Produktivitas mengalami penurunan dari 34,74 kuintal per hektar pada tahun 2023 menjadi 30,21 kuintal per hektar pada tahun 2024; dan • Produksi padi secara keseluruhan juga mengalami penurunan dari 49.691,20 ton pada tahun 2023 menjadi 40.037,84 ton pada tahun 2024. Ketiga komponen ini, yaitu luas panen, produktivitas, dan produksi padi, semuanya menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.	1. Isu ketimpangan sosial; 2. Isu ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi; 3. Isu akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman; 4. Isu pengelolaan sampah dan limbah B3; 5. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan; 6. Isu ketahanan iklim dan bencana; dan 7. Isu good governance dan akses pelayanan publik yang belum optimal.	Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi: a) Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; b) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; c) Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Kemiskinan; 2. Kesenjangan jawa dan luar jawa; 3. Kualitas SDM rendah; 4. Integrasi domestik terbatas; 5. Rendahnya Tingkat produktivitas; 6. Iptekin dan riset lemah; 7. Deindustrialisasi dini dan 8. produktivitas pertanian yang masih rendah; 9. Pembangunan belum berkelanjutan.	Kawasan potensial swasembada pangan, air dan energi; daerah tertinggal	1. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah 2. Tingkat kemiskinan 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 4. Rendahnya pertumbuhan ekonomi 5. Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penanganan bencana 6. Belum optimalnya pengembangan pariwisata 7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Peternakan	Sektor peternakan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sektor pertanian adalah komponen vital yang menggerakkan ekonomi dan menjadi bagian yang terintegrasi dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada tahun 2024, ternak babi menonjol sebagai sektor peternakan yang dominan dan unggulan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data menunjukkan tren positif pada populasi babi dengan peningkatan signifikan menjadi 65.897 ekor pada tahun 2024 dari 63.894 ekor pada tahun 2023 yang menandakan bahwa pertumbuhan yang kuat dalam populasi ternak babi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peningkatan ini menunjukkan ketahanan dan potensi besar sektor ini sebagai penopang ekonomi lokal. Namun keberhasilan ini hadir di tengah ancaman yang serius, dimana selama tiga tahun berturut – turut virus <i>African Swine Fever</i> (ASF) telah mewabah dan memiliki tingkat fatalitas hingga 100% pada babi yang terinfeksi. Wabah ini secara konsisten menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak babi. Meskipun menghadapi tantangan berat dari ASF, namun pertumbuhan populasi babi mengindikasikan upaya keras peternak dan mungkin efektivitas langkah – langkah mitigasi yang telah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi bukti daya tahan dan pentingnya sektor peternakan babi bagi perekonomian lokal.	1. Isu ketimpangan sosial; 2. Isu ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi; 3. Isu akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman; 4. Isu pengelolaan sampah dan limbah B3; 5. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan; 6. Isu ketahanan iklim dan bencana; dan 7. Isu good governance dan akses pelayanan publik yang belum optimal.	Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi: a) Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; b) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; c) Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Kemiskinan; 2. Kesenjangan jawa dan luar jawa; 3. Kualitas SDM rendah; 4. Integrasi domestik terbatas; 5. Rendahnya Tingkat produktivitas; 6. Iptekin dan riset lemah; 7. Deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian yang masih rendah; 8. Pembangunan belum berkelanjutan.	Kawasan potensial swasembada pangan, air dan energi; daerah tertinggal	1. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah 2. Tingkat kemiskinan 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 4. Rendahnya pertumbuhan ekonomi 5. Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penanganan bencana 6. Belum optimalnya pengembangan pariwisata 7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Kelautan dan Perikanan	Sektor perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal pada tahun 2023. Potensi maritim ini terlihat dari dua komoditas utama yaitu : hasil perikanan tangkap laut dan rumput laut. Produksi perikanan tangkap di laut mencapai 1.203.200 kilogram (sekitar 1.203,2 ton) pada tahun 2023. Dari volume tersebut, sektor ini berhasil membukukan nilai ekonomi sebesar Rp. 34.860,31 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa perikanan tangkap laut merupakan penyumbang yang sangat substansial bagi pendapatan daerah dan mata pencarian masyarakat pesisir. Selain perikanan tangkap, rumput laut juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang sangat menjanjikan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Produksi rumput laut pada tahun 2023 mencapai 1.688.741 kilogram (sekitar 1.688,74 ton). Meskipun nilai per kilogramnya mungkin tidak setinggi ikan tangkap, volume produksi yang besar ini menghasilkan nilai ekonomi yang tidak kalah impresif, yaitu Rp. 6.754,94 miliar. Kondisi ini sekaligus menegaskan peran strategis rumput laut sebagai komoditas yang memberikan kontribusi besar dan terus berkembang.	1. Isu ketimpangan sosial; 2. Isu ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi; 3. Isu akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman; 4. Isu pengelolaan sampah dan limbah B3; 5. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan; 6. Isu ketahanan iklim dan bencana; dan 7. Isu good governance dan akses pelayanan publik yang belum optimal.	Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi: a) Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; b) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; c) Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Kemiskinan; 2. Kesenjangan jawa dan luar jawa; 3. Kualitas SDM rendah; 4. Integrasi domestik terbatas; 5. Rendahnya Tingkat produktivitas; 6. Iptekin dan riset lemah; 7. Deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian yang masih rendah; 8. Ekonomi laut belum optimal; 9. Pembangunan belum berkelanjutan.	Pengembangan kawasan potensial Swasembada pangan, sentra produksi rumput laut	1. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah 2. Tingkat kemiskinan 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 4. Rendahnya pertumbuhan ekonomi 5. Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penanganan bencana 6. Belum optimalnya pengembangan pariwisata 7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan Visi Misi pada dokumen RPJMD ini berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T** dan **Dominikus Alphawan R. Kaka, S.P.**, yang telah dilantik secara sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan program strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu – isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2029 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3.1 VISI

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sumba Barat Daya dalam jangka waktu 20 tahun yakni :

**“ Mewujudkan Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai
“Tana Marapu” yang Maju dan Berkelanjutan ”**

Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sumba Barat Daya, yang sangat dinamis, dan

mengalami pergeseran – pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 – 2045, maka disusun sebuah cita – cita pembangunan masyarakat Sumba Barat Daya dimasa depan. Cita – cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, berbudaya, dan berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita – cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T** dan **Dominikus Alphawan R. Kaka, S.P.,** yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 adalah :

**“ Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang
Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya
Menyongsong Indonesia Emas 2045 ”**

Visi tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai dalam masa pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan memiliki makna sebagai berikut :

TABEL 3. 1 PENJABARAN VISI

Hebat	:	Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki produktifitas dan kreatifitas yang tinggi dalam mengolah potensi lokal menjadi produk – produk yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;
Berkarater	:	Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kepribadian yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan adat istiadat, sehingga menjadi ciri khas yang tidak akan hilang oleh perkembangan zaman;
Sehat	:	Masyarakat Sumba Barat Daya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mampu berinteraksi secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan;

Cerdas	:	Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang unggul sehingga sangat adaptif dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;
Berketahanan pangan	:	Masyarakat Sumba Barat Daya mampu mempertahankan ketersediaan pangan secara mandiri dan konsisten dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, ditengah ancaman perubahan iklim;
Berbudaya	:	Masyarakat Sumba Barat Daya selalu menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat – istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga keselarasan dan harmonisasi kehidupan, sehingga menciptakan situasi damai dan sejahtera.

Selanjutnya visi tersebut akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

3.2 MISI

Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya – upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun dengan memperhatikan faktor – faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;

2. Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan

memberikan pelayanan Pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik;

3. Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan;

4. Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyediaan pelatihan, bantuan modal usaha, dan program – program pemberdayaan ekonomi masyarakat;

5. Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur

melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta perekonomian lokal;

6. Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup

melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negatif Pembangunan terhadap lingkungan;

7. Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan 2029 merupakan perjalanan yang panjang. Terdapat berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan maupun isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang harus diatasi yang akan bermunculan secara dinamis selama periode tersebut. Berbagai kebijakan dan strategi akan diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan dari semua program pembangunan ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap warga dari individu hingga komunitas memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk memberi masukan, mendukung, menjaga maupun mengevaluasi jalannya Pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek teknis,

seperti perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat, integrasi sistem pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi, pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya komunikasi yang transparan dan kerjasama yang solid, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap potensi dapat dikembangkan. Visi dan misi Kabupaten Sumba Barat Daya didukung dengan tagline **“Membangun Desa, Menata Kota”** yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025 – 2029 merupakan formulasi yang komprehensif dari berbagai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah 5 (lima) tahun kedepan yang memiliki makna sebagai berikut :

“Membangun Desa”

Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa), dan desa merupakan penyokong utama dari sebuah kabupaten. Melihat peran desa yang begitu sentral dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, setidaknya terdapat tiga aspek yang sangat berpengaruh dan harus dibangun didesa yaitu aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur, dan aspek pemerintahan desa. Ketiga aspek ini menjadi penentu keberhasilan apakah desa tersebut berkategori tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri. Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA :

ketersediaan sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci sukses keberhasilan pembangunan didesa. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya peningkatan taraf pendidikan masyarakat desa dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar, memadai, dan berkualitas. Selain pendidikan, derajat kesehatan masyarakat desa juga turut mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ditingkat desa menjadi hal mutlak yang harus dilakukan untuk mendukung dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bertahan terhadap segala tantangan;

2. ASPEK INFRASTRUKTUR :

ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai seperti BTS (*Base Transceiver Station*), jaringan listrik, jalan, jembatan, irigasi, dan sistem perpipaan air minum menjadi salah satu pendorong kunci sukses pembangunan didesa, karena akan memperlancar proses distribusi barang, mobilitas manusia, dan membuka keterisolan suatu daerah. Sehingga, dengan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai akan meningkatkan produktifitas dan menciptakan titik tumbuh perekonomian masyarakat desa, terkhusus akan muncul dan berkembangnya produk – produk unggulan daerah yang berbasis bahan lokal;

3. ASPEK PEMERINTAH DESA :

aparatur pemerintah desa menjadi aktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa, sehingga kapasitas dan kapabilitasnya perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintah desa. Diharapkan dengan meningkatkannya kapasitas dan kapabilitas aparatur desa maka juga akan menciptakan aparatur pemerintah desa yang berintegritas, responsif, dan mampu menjawab setiap permasalahan dan tantangan di desa dengan memanfaatkan APBDes secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, dan efisien.

“Menata Kota”

Menata kota yang berarti merencanakan, mengatur, dan mengelola tata ruang serta infrastruktur kota agar fungsional, nyaman, dan estetis untuk masyarakatnya. Mengingat kota merupakan wajah dari seluruh komponen yang membentuk kabupaten.

Keberadaan desa dan kota menjadi pilar yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebab keduanya saling mengkait dan mendukung satu dengan lainnya. Desa menjadi penyokong utama di kabupaten dengan peran sebagai berikut :

- Sumber tenaga kerja : masyarakat desa dapat menjadi tenaga kerja di kota, baik sebagai buruh maupun di sektor informal;
- Penyedia bahan kebutuhan : desa dapat menyediakan bahan – bahan kebutuhan masyarakat kota, seperti bahan mentah untuk industri; dan
- Mitra pembangunan kota : desa dapat menjadi mitra atau rekan bagi pembangunan kota.

Sedangkan kota menjadi penyokong utama di kabupaten dengan peran sebagai pusat penggerak kegiatan dan pelayanan multisektor yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3.3 TUJUAN

Ketercapaian visi misi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan

partisipatif ke dalam tujuan, maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Dalam perumusannya, tujuan harus bersifat Specific, Measureable, Action Oriented, Realistic, Timely (SMART). Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan disusun dan dirumuskan dari visi dan misi Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan pencapaian visi yang diturunkan menjadi pokok visi. Selain itu, perumusan tujuan berpedoman dan mengacu pada RPJP Tahun 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045, dan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045.

3.4 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran disusun dan dirumuskan dari visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah. Selain itu, perumusan sasaran berpedoman dan mengacu pada sasaran RPJP Tahun 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045, dan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045.

Dalam RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pendapatan per kapita sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju;
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
- 3) Birokrasi yang akuntabel dan transparan;
- 4) Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif;
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju;
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
- 3) Daya Saing Daerah yang meningkat;
- 4) Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif;
- 5) Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pendapatan per kapita menuju setara negara maju;
- 2) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- 3) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat,
- 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Sasaran tersebut disusun untuk mendukung tujuan

“Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

TABEL 3. 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Visi	“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”										
Misi 1	: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
		Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Milyar Rupiah	1.790,7	2.041,76	2.162,08	2.282,4	2.402,72	2.523,04	2.623,04
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	62,66	64,86	67,07	69,27	71,47	73,67	75,77
			PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum)	Milyar Rupiah	1.7	2.22	2.67	2.93	3.19	3.45	4.00
	Pendapatan Per Kapita			Juta Rupiah	13.971.677	15.253.870	17.779.751	20.305.631	22.831.512	25.357.392	26.371.688

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
		Meningkatnya PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan	PDRB ADHB Sektor Pengolahan	Milyar Rupiah	36	45,29	48,57	51,86	55,14	58,43	60
			PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	663	799,405	855,83	912,255	968,68	1025,105	1050,105

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia			Poin	63,74	64,49	65,24	65,99	66,74	67,49	68,50
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta Partisipasi Peserta Didik	Peningkatan capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Sekolah Dasar:								
			a). Literasi Membaca	%	33,39	40,34	47,29	54,24	61,19	68,14	69
			b). Numerasi	%	30,33	35,51	40,69	45,87	51,05	56,23	60

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
			Peningkatan capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Sekolah Menengah Pertama:								
			a). Literasi Membaca	%	26,21	46,56	53,51	60,46	67,41	74,36	75
			b). Numerasi	%	31,14	49,8	54,98	60,16	65,34	70,52	71
			Angka Partisipasi Murni SD (APM)	%	62,46	64,56	66,66	68,76	70,86	72,96	74
			Angka Partisipasi Murni SMP (APM)	%	91,95	92,25	92,55	92,85	93,15	93,45	95
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,39	7,39	8,39	9,39	10,39	11,39	12

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup			Tahun	68,99	69,4	69,81	70,22	70,63	71,04	72
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	kasus	7	0	0	0	0	0	0
			Angka Kematian Bayi (per 100.000 kelahiran hidup)	kasus	59	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
			Prevalensi Balita Stunting	%	39,2	39,20	37,80	36,40	34,90	33,60	32,40
			Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
			<i>Success Rate</i> Pengobatan TBC	%	4,24	40	45	50	60	70	80
			Persentase Kasus Malaria	%	7,4	7	5,5	4	2	1	0

Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif dan berdampak pada penurunan kemiskinan	Tingkat kemiskinan			%	27,48	25,11	24,11	23,11	22,11	21,11	20,11
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,08	1,77	1,67	1,47	1,37	1,27	1
			Gini Ratio	Poin	0,313	0,313	0,300	0,287	0,274	0,261	0,200
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	74	75	76	77	78	79	80

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,493	0,4	0,395	0,39	0,385	0,370	0,350

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi kawasan	Indeks Infrastruktur				46,03	50,76	54,22	57,49	60,74	64,31	68,30
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Desa dan Kota	Indeks Jaringan Jalan	Poin	51,68	54,26	55,77	57,28	58,78	60,29	61,80
			Indeks Sanitasi	Poin	73,28	74,59	75,90	77,28	78,52	79,83	81,14
			Indeks Air Bersih	Poin	25,03	26	26,97	27,94	28,91	29,88	30,85
			Indeks Irigasi	Poin	61,34	62	62,66	63,32	63,98	64,64	65,30
			Indeks Perumahan dan Permukiman	Poin	60,97	62,89	64,77	67,89	72,00	74,71	79
			Indeks Perizinan Tata Ruang	Poin	40,93	44,64	51,16	56,25	58,75	67,10	75,45

Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			%	63,52	64,52	65,52	66,52	67,52	68,52	69,52
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	0,28	0,28	5	10	15	20	25
			Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	0,0085	0,0085	5	10	15	20	25
			Indeks Kualitas Air	Poin	46,67	47,17	47,67	48,17	48,67	49,17	49,67
			Indeks Kualitas Udara	Poin	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	42,20	42,70	43,20	43,70	44,20	44,70	45,20
	Menurunnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	114,55	111,22	107,89	104,86	101,23	97,2	90

Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
						K	K	K	K	K	K
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			Poin	47,41	51	54,59	58,18	61,77	65,36	67
		Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	SAKIP	Nilai	50,05	60,05	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Poin	47,82	47,82	48	48,82	49,64	50,46	55
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintah Digital	Poin	2,03/-	2,38/-	2,73/1	3,08/1,1	3,43/1,2	3,78/1,3	4,13/1,4

3.5 KETERKAITAN VISI – MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 – 2029 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang diuraikan diatas juga disusun dan memiliki keterkaitan dengan visi – misi RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045, visi – misi RPJMN Tahun 2025 – 2029, dan visi – misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029. Keterkaitan Visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dengan dokumen perencanaan lainnya bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi program pembangunan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kepentingan lokal dan nasional sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045, yang mendukung untuk pencapaian : **“Mewujudkan Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai “Tana Marapu” yang Maju dan Berkelanjutan”**.

Keterkaitan Visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 dan visi – misi RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029, tergambar dalam skema dibawah ini.

TABEL 3. 3 KESELARASAN MISI RPJPD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2045 DENGAN MISI RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2029

Visi RPJMD 2025 - 2029		Visi RPJPD 2025 - 2045	
“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”		Selaras	Mewujudkan Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai “Tana Marapu” yang Maju dan Berkelanjutan
Misi RPJMD 2025 - 2029		Misi RPJPD 2025 - 2045	
Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;		Selaras	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
			Misi 8 : Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan;

Misi RPJMD 2025 - 2029		Misi RPJPD 2025 - 2045	
Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;	Selaras	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Sosial;	Misi 8 : Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan;
Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;	Selaras	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Sosial;	Misi 8 : Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan;
Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat;	Selaras	Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;	Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur;	Selaras	Misi 8 : Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan;	Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
		Misi 7 : Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	Misi 8 : Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan;

Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup;	Selaras	Misi 7 : Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
		Misi 8 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan;

		Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik;	Selaras	Misi 4 : Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan;
		Misi 8 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan;

Keselarasan antara Misi RPJMN (**Asta Cita**), RPJMD Provinsi NTT (**Ayo Bangun NTT**), dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya (**Membangun Desa, Menata Kota**) merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap level pemerintahan, dari nasional hingga daerah, bekerja menuju tujuan yang sama.

- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) : Ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional selama 5 tahun yang menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Asta Cita (Delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden) adalah inti dari RPJMN, yang menjabarkan visi pembangunan nasional.
- RPJMD Provinsi NTT (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT) : Dokumen ini merinci visi, misi, dan program pembangunan Provinsi NTT selama 5 tahun. Slogannya, "Ayo Bangun NTT," mencerminkan semangat dan prioritas pembangunan di tingkat provinsi. RPJMD Provinsi harus selaras dengan RPJMN.
- RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya) : Ini adalah rencana pembangunan 5 tahun di tingkat kabupaten yang harus mengacu pada RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN. Misi dalam RPJMD Sumba Barat Daya harus diterjemahkan dari prioritas yang lebih tinggi, disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal.

TABEL 3. 4 KESELARASAN ANTARA MISI RPJMN (ASTA CITA) DENGAN RPJMD PROV. NTT, DAN RPJMD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Visi RPJMN 2025 - 2029		Visi RPJMD Prov. NTT 2025 - 2029		Visi RPJMD Kab. Sumba Barat Daya 2025 - 2029	
"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".	Selaras	NTT Maju, Sehat Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.	Selaras	"Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045"	
Misi RPJMN 2025 - 2029		Misi RPJMD Prov. NTT 2025 - 2029		Misi RPJMD Kab. Sumba Barat Daya 2025 - 2029	
Misi 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Selaras	Misi 2 : Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah Diakses (Sehat); Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (berkelanjutan);	Selaras	Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Misi 2 : Mewujudkan peningkatan akses dan mutu pendidikan Misi 3 : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Misi 4 : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat	

Misi RPJMN 2025 - 2029		Misi RPJMD Prov. NTT 2025 - 2029		Misi RPJMD Kab. Sumba Barat Daya 2025 - 2029
Misi 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Selaras	Misi 1 : Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (Maju);	Selaras	Misi 5 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur
Misi 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Selaras	Misi 1 : Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju);	Selaras	Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Misi 5 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur

Misi RPJMN 2025 - 2029

Misi RPJMD Prov. NTT 2025 - 2029

Misi RPJMD Kab. Sumba Barat Daya 2025 - 2029

Misi 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Selaras	Misi 2 : Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah Diakses (Sehat) Misi 3 : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (Cerdas) Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak Serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (berkelanjutan);	Selaras	Misi 2 : Mewujudkan peningkatan akses dan mutu pendidikan Misi 3 : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
---	----------------	--	----------------	--

Misi RPJMN 2025 - 2029		Misi RPJMD Prov. NTT 2025 - 2029		Misi RPJMD Kab. Sumba Barat Daya 2025 - 2029
		Misi 1 : Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju)		
		Misi 4 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, Serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Sejahtera);		
Misi 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Selaras	Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (berkelanjutan)	Selaras	Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Misi 5 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur
		Misi 1 : Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju)		
Misi 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Selaras	Misi 4 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, Serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Sejahtera)	Selaras	Misi 4 : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat; Misi 5 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur;

Misi RPJMN 2025 - 2029		Misi RPJMD Prov. NTT 2025 - 2029		Misi RPJMD Kab. Sumba Barat Daya 2025 - 2029
Misi 7 : Memperkuat reformasi, politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	Selaras	Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (berkelanjutan);	Selaras	Misi 7 : Meningkatkan pelayanan publik;
Misi 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Selaras	Misi 3 : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (Cerdas) Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak Serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (berkelanjutan)	Selaras	Misi 6 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

3.6 STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program - program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya - upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

3.7 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan merupakan sebuah instrumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan. Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan guna menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkembang dengan memperhatikan sasaran strategis dalam tahapan waktu tertentu. Prioritas pembangunan yang ditentukan pada setiap tahunnya memiliki kesinambungan satu sama lain yang dirangkai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah.

Penetapan tema atau fokus pembangunan tahunan bukan berarti mengabaikan kondisi rutin yang memang harus dikerjakan setiap tahunnya. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan dan diberikan alokasi pendanaan. Prinsip perencanaan strategis dan perencanaan operasional harus berjalan secara seimbang, sehingga tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, melainkan juga melaksanakan segala program yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi.

Seperti halnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang disusun berlandaskan pada upaya penanggulangan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dirumuskan dari kondisi eksisting Kabupaten Sumba Barat Daya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 juga diarahkan sebagai arahan penyusunan prioritas daerah sebagai penyelesaian masalah yang berkembang. Selain itu penyusunan arah kebijakan ini juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai bentuk sinergitas perencanaan pembangunan dari level terendah hingga level tertinggi. Amanat tujuan pembangunan berkelanjutan juga diintegrasikan dalam penyusunan arah kebijakan ini sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terwujud dengan menyeluruh, setara, serta tidak hanya fokus pada masa sekarang melainkan juga pada masa yang akan datang.

TABEL 3. 5 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	S1. Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	ST. 1. Mengembangkan potensi disektor pertanian yang berkelanjutan dengan berfokus pada pemanfaatan tanaman dan ternak yang resilien, penerapan praktik atau pola pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim seperti pengembangan pertanian organik, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, diversifikasi tanaman, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian lokal dengan memberikan pelatihan kepada petani dalam teknik pertanian modern yang ramah lingkungan.	1. Meningkatkan dan menumbuhkan produktivitas dan hilirisasi sektor unggulan daerah yang terintegrasi dengan sektor lain, serta didukung dengan pengelolaan pajak daerah yang berkualitas;
		ST. 2. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang mempertahankan dan melindungi keindahan alam serta kekayaan budaya Sumba Barat Daya dengan mengembangkan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan, pelatihan untuk pelaku pariwisata, dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab.	2. Mengembangkan simpul inovasi dan kretatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk – produk ekonomi kreatif;
			3. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan, serta peningkatan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
			4. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam rangka menciptakan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya di Kabupaten Sumba Barat Daya;
	S2. Meningkatnya PDRB industri pengolahan dan perdagangan	ST. 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang efektif, serta revitalisasi fungsi BUMD sebagai pengungkit PAD	5. Memperluas basis penerimaan pajak daerah dengan menggali potensi pajak daerah baru dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak yang sudah ada;
		ST. 4. Mengembangkan potensi kewirausahaan kepemudaan melalui sektor ekonomi kreatif sebagai penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra - sentra ekonomi lokal.	6. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme BUMD;
		ST. 5. Pengelolaan pembangunan sumber daya industri olahan, penyiapan sentra produksi dikawasan pedesaan, sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta penguatan keterkaitan atau konektivitas desa atau kota.	7. Mewujudkan sistem produksi dan distribusi industri olahan yang terintegrasi antar wilayah desa dan kota guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memperluas lapangan kerja;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		ST. 6. Meningkatkan usaha kecil dan menengah serta koperasi lokal dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi akses pasar.	8. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui penguatan ekosistem kewirausahaan yang inovatif, kreatif, inklusif, dan berkelanjutan; 9. Memperkuat struktur ekonomi kerakyatan melalui penguatan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan UMKM serta koperasi lokal sebagai pilar ekonomi daerah; 10. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam sebagai peluang investasi.
Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan			
Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan yang berkualitas	S3. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta partisipasi peserta didik	ST. 7. Meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan perbaikan sekolah – sekolah, pembangunan ruang kelas yang layak, serta fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidikan. ST. 8. Memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang berkualitas. ST. 9. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kependidikan secara bertahap. ST. 10. Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh dan <i>e-learning</i>, untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara merata; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing; 3. Menciptakan pemerataan akses pendidikan dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh siswa, terutama dari kelompok masyarakat kategori miskin ekstrim; 4. Mengimplementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara objektif dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi; 6. Meningkatkan inovasi penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	S4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	ST. 11. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperluas jaringan fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil dengan pembangunan puskesmas, klinik, atau mobil kesehatan yang dapat mencapai masyarakat yang sulit dijangkau.	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas; 2. Meningkatkan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan; 3. Memastikan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyeluruh bagi masyarakat, serta menjamin ketersediaan fasilitas dan layanan yang memadai bagi peserta JKN; 4. Mewujudkan integrasi Rekam Medis Elektronik (RME) dengan system informasi kesehatan nasional guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data real-time.
		ST. 12. Meningkatkan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan yang mencakup dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Hal ini mencakup pelatihan, insentif, dan penempatan strategis tenaga kesehatan di daerah – daerah yang membutuhkan.	
		ST. 13. Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine dan rekam medis elektronik, untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan.	
Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat			
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif dan berdampak pada penurunan kemiskinan	S5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif	ST. 14. Meningkatkan dan menguatkan kompetensi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.	1. Meningkatkan intensitas pelatihan – pelatihan bersertifikat bagi masyarakat yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan; 2. Meningkatkan pemberian stimulant – stimulant yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memacu kemandirian; 3. Menguatkan keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
		ST. 15. Memastikan partisipasi yang setara dan inklusif dalam semua aspek kehidupan Masyarakat.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur			
Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi kawasan	S6. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur di desa dan kota	ST. 16. Mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan, serta potensi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial.	1. Meningkatkan standar kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
		ST. 17. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial seperti air bersih, sanitasi, perumahan, dan transportasi bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.	2. Meningkatkan konektivitas wilayah yang difokuskan pada peningkatan dan pembangunan jalan dan drainase, dan peningkatan sarana pengendali banjir (kualitas irigasi sekunder dan pengendali SDA), peningkatan pelayanan transportasi massal yang aman dan nyaman;
		ST. 18. Mengembangkan sumber energi yang beragam dan ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan hidro, serta meningkatkan infrastruktur untuk mendistribusikan energi secara efisien.	3. Mendorong pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga surya, air (PLTMH), angin, dan bioenergy sesuai dengan potensi wilayah;
		ST. 19. Membangun infrastruktur air bersih, irigasi pertanian, dan sistem sanitasi yang aman dan terjangkau untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung pertanian yang berkelanjutan.	4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan proyek, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembangunan, hingga operasi dan pemeliharaan, untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan;
		ST. 20. Membangun infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim, terkhusus wilayah perkotaan dan pedesaan.	5. Mengintegrasikan adaptasi iklim kedalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur;
		ST. 21. Mendorong investasi baik dari sektor publik maupun swasta dalam pembangunan infrastruktur, dengan menciptakan kebijakan investasi yang jelas, dan kemitraan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.	6. Mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun kawasan permukiman, perkantoran, komersial, dan industri yang adaptif terhadap iklim;
			7. Menyederhanakan perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi investor dan menerapkan skema pembiayaan Pemerintah – swasta/BUMN dengan pembagian keuntungan dan resiko yang adil.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	S7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	ST. 22. Mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan sistem daur ulang dan pengolahan limbah yang efektif.	1. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah, termasuk volume sampah terpilah, volume sampah yang didaur ulang/diolah, dan efisiensi biaya, untuk memastikan pencapaian target dan perbaikan berkelanjutan; 2. Meningkatkan dan mengembangkan system pengawasan dan pemantauan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara; 3. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan untuk mendukung penegakan regulasi lingkungan dan memastikan bahwa pelaku usaha dan individu mematuhi standar kualitas lingkungan; 4. Mengutamakan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati; 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan pentingnya tindakan adaptasi dan mitigasi; 6. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana.
	S8. Menurunnya risiko bencana	ST. 23. Optimalisasi (kualitas dan distribusi) pemanfaatan informasi cuaca dan iklim dalam merumuskan aksi adaptasi, mitigasi, memperkuat infrastruktur untuk mitigasi risiko bencana alam, termasuk sistem peringatan dini, pembangunan bangunan tahan gempa, pengendalian banjir, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas komunitas (<i>community based</i>) melalui penerapan strategi adaptasi mitigasi dampak bencana dan perubahan iklim yang spesifik sesuai karakteristik lokal, dan memperkuat system penanggulangan bencana berbasis Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang inklusif.	
Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	S9. Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani.	ST. 24. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	1. Meningkatkan reformasi birokrasi yang difokuskan pada peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran, pembangunan berbasis elektronik dan kemudahan pelayanan publik; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya ASN dan sarana prasana pelayanan publik.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahunnya. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahap pertama pada RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2045, maka tema pembangunan yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut ini.

TABEL 3. 6 TEMA RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025 – 2030

Tahun 2025	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui efektifitas pelayanan publik yang didukung penyediaan infrastruktur yang mantap dan penguatan daya saing ekonomi daerah
Tahun 2026	Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas
Tahun 2027	Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang didukung dengan peningkatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang mantap
Tahun 2028	Penguatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang didukung penguatan kualitas sumber daya manusia
Tahun 2029	Pemantapan dan kolaborasi seluruh potensi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan masyarakat yang berkarakter
Tahun 2030	Perwujudan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang hebat berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045

3.8 PROGRAM - PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang secara khusus berhubungan dengan janji – janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 yang memiliki *tagline* “**Membangun Desa, Menata Kota**”, kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan formulasi yang komprehensif dari berbagai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah 5 (lima) tahun kedepan yang memiliki makna sebagai berikut :

TABEL 3. 7 PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2030

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	S.1. Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	O.1. Meningkatnya produksi jagung daan padi	Jumlah produksi jagung Jumlah produksi padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program bantuan alsintan
			O.2. Meningkatnya produksi daging dan telur	Jumlah produksi daging (sapi, kerbau, domba, kambing, unggas, dan babi) Jumlah produksi telur			
			O.3. Meningkatnya produksi tanaman pangan	Peningkatan produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program bantuan alsintan
			O.4. Meningkatnya produksi komoditas peternakan	Peningkatan produksi komoditas peternakan			
			O.5. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Program pengembangan dan promosi pariwisata
			O.6. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
			O.7. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan wirausaha	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
		S.2. Meningkatnya PDRB industri pengolahan dan perdagangan	O.8. Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program stabilitas harga komoditas unggulan
			O.9. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (ISH)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan yang berkualitas	S.3. Meningkatnya akses dan Kualitas pendidikan serta partisipasi peserta didik	O.10. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program beasiswa bagi pelajar hingga mahasiswa

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
		O.11. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Tingkat partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		O.12. Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Indeks pemerataan guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 - 2029
1	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	S.4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	O.13. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program cek kesehatan (Jaminan Kesehatan dan Screening Penyakit) bagi masyarakat kategori miskin ekstrim
			O.14. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		

Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif dan berdampak pada penurunan kemiskinan	S.5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif	O.15. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Sektor Informal Kategori Miskin Ekstrim
			O.16. Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial		

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
			O.17. Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan wirausaha	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelatihan dan Modal Usaha Bagi Pelaku UMKM
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti			
			O.18. Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Program Rehabilitasi Sosial		
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang tertangani		Dinas Sosial	Program jaminan dan bantuan sosial bagi keluarga kategori miskin ekstrim
			O.19. Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Program Perlindungan Jaminan Sosial		

Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

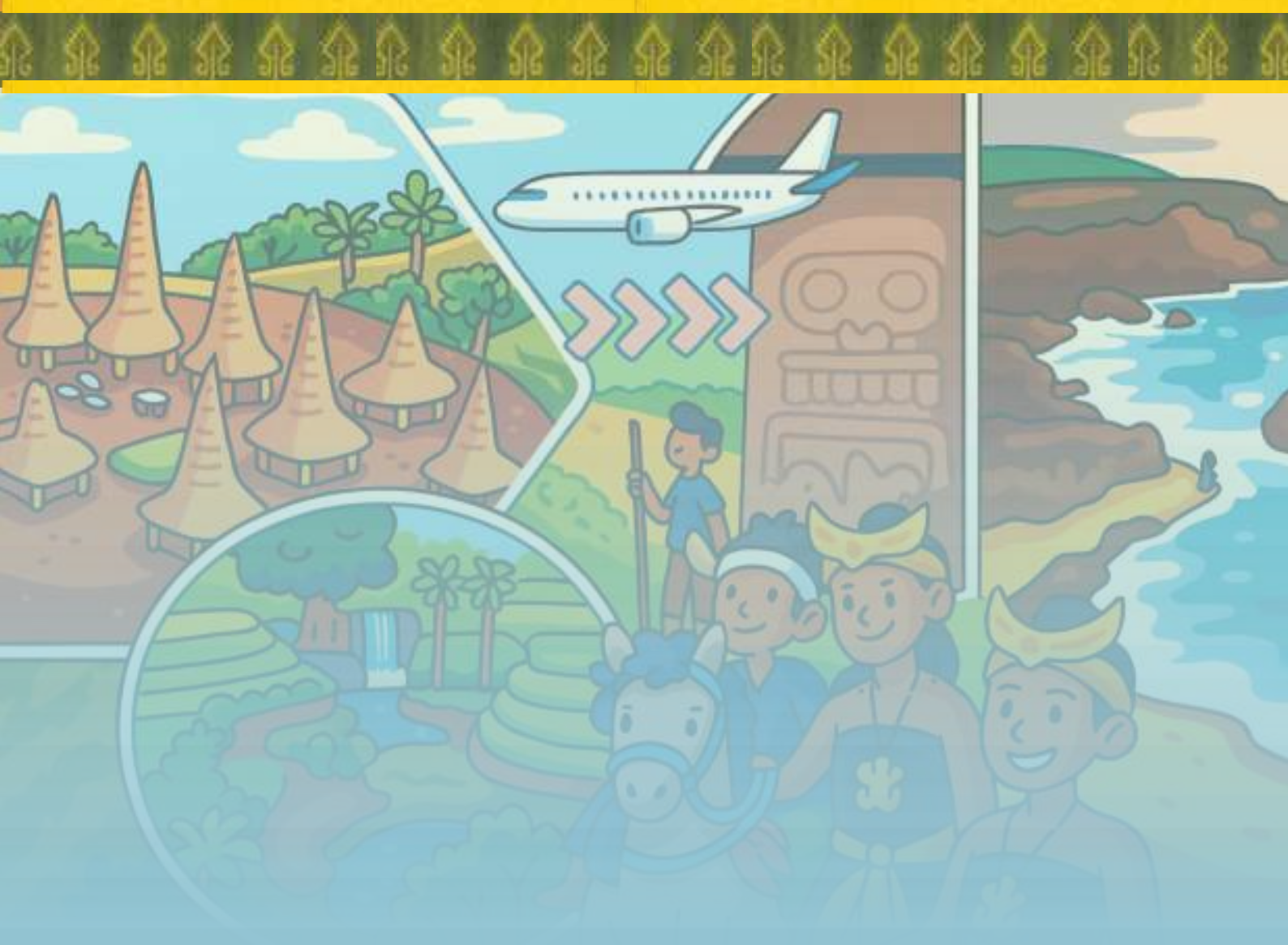
No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi kawasan	S.6. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Desa dan Kota	O.20. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang	Program penataan kota dan desa meliputi peningkatan jalan dalam kota, lampu jalan, drainase, taman kota, trotoar dan tugu (monumen) di persimpangan jalan dan fasilitas umum lainnya
			O.21. Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Program Penataan Bangunan Gedung		
			O.22. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
			O.23. Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan dan pedesaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program bantuan rumah tinggal layak huni
			O.23. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		
			O.24. Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota ditangani	Program Kawasan Permukiman		Program bantuan meteran listrik
			O.25. Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		

Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029				
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	S.7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	O.26. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyelesaian materi teknis RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program penataan kota dan desa meliputi peningkatan jalan dalam kota, lampu jalan, drainase, taman kota, trotoar dan tugu (monumen) di persimpangan jalan dan fasilitas umum lainnya				
				Penetapan RTRW							
				Penyelesaian materi teknis RDTR							
				Penetapan RDTR							
			O.27. Meningkatkan layanan persampahan regional	Persentase timbulan sampah yang terolah difasilitas pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						
				O.28. Meningkatkan layanan pengelolaan persampahan				Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Persampahan		
								O.29. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
										Indeks Kualitas Udara	
		S.8. Menurunnya risiko bencana	O.30. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase penanganan pra bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana									

Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pemetaan Program Prioritas Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025	Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025 -2029
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	S.9. Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani.	O.31. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Program Digitalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
			O.32. Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program SMART Sumba Barat Daya



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan diuraikan dalam program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah, yang disajikan dengan target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya dan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya indikasi rencana program disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4. 1 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2026 – 2030

Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					474.337.142.057		478.776.129.115		478.808.513.492		482.393.095.276		488.144.627.250		SELURUH PERANGKAT DAERAH
Outcomes 1 : Meningkatnya pelaksanaan operasional perangkat daerah	SAKIP	Poin	50,05	65,05		70,05		75,05		80,05		85,05		85,05	
01 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR															
01.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					146.218.178.990		150.604.724.360		155.122.866.090		159.776.552.073		164.569.848.635		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
Outcomes 1 : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	75,99	78,19		79,29		80,39		81,49		82,59		82,59	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	65,19	67,39		68,49		69,59		70,69		85,05		85,05	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	52,15	54,35		55,45		56,55		57,65	-	88,935	-	88,94	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	41	75		85		95		100		100		100	

Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	N/A	-	50	-	75	-	100	-	100	-	100	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					140.480.000		144.694.400		149.035.232		153.506.289		158.111.478		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
Outcomes 3 : Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	%	76,68	92,69		96,95		97,18		97,91		97,91		97,91	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					296.105.000		304.988.150		314.137.795		323.561.928		333.268.786		
Outcomes 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	100	100		100		100		100		100		100	
01.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					60.604.044.328		57.272.165.658		58.990.330.628		60.760.040.546		62.582.841.763		
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	angka	0	0,5		0,55		0,6		0,65		0,65		0,65	
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	100	90		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
					6.153.670.304		6.338.280.413		6.528.428.826		6.528.428.826		6.724.281.690		
					3.283.139.370		3.381.633.551		3.483.082.558		3.483.082.558		3.587.575.034		
					2.975.650.272		3.064.919.780		3.156.867.374		3.156.867.374		3.251.573.395		
					1.957.329.869		2.016.049.765		2.076.531.258		2.076.531.258		2.138.827.196		
					2.666.713.428		2.746.714.831		2.829.116.276		2.829.116.276		2.913.989.764		



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					2.974.499.904		3.063.734.901		3.155.646.948		3.155.646.948		3.250.316.357		
					2.511.865.178		2.587.221.133		2.664.837.767		2.664.837.767		2.744.782.900		
					2.496.749.060		2.571.651.532		2.648.801.078		2.648.801.078		2.728.265.110		
					1.674.863.676		1.725.109.586		1.776.862.874		1.776.862.874		1.830.168.760		
					1.864.795.136		1.920.738.990		1.978.361.160		1.978.361.160		2.037.711.995		
					2.167.352.700		2.232.373.281		2.299.344.479		2.299.344.479		2.368.324.814		
					3.016.786.548		3.107.290.144		3.200.508.849		3.200.508.849		3.296.524.114		
					2.169.667.228		2.234.757.245		2.301.799.962		2.301.799.962		2.370.853.961		
					2.460.986.983		2.534.816.592		2.610.861.090		2.610.861.090		2.689.186.923		
					1.406.696.800		1.448.897.704		1.492.364.635		1.492.364.635		1.537.135.574		
					2.392.828.093		2.464.612.936		2.538.551.324		2.538.551.324		2.614.707.864		
					3.224.793.160		3.321.536.955		3.421.183.063		3.421.183.063		3.523.818.555		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					15.952.241.302		16.430.808.541		16.923.732.797		16.923.732.797		16.923.732.797		
Outcomes 2 : Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	75	100			100		100		100		100		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					393.275.000		405.373.250		417.834.448		430.669.481		443.889.565		
Outcomes 3 : Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	50,94	67,92			80,19		93,4		100		100		100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Outcomes 4 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	0	20,85	-		30,35	-	39,85	-	49,35	-	58,85	-	68,35



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				8.096.218.200		8.339.104.746		8.589.277.888		8.846.956.225		9.112.364.912			
Outcomes 1 : meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan atau yang dimodernisasi	Ha	1708	1719		1725		1730		1736		1742		1742	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				26.593.912.000		27.391.729.360		28.213.481.241		29.059.885.678		29.931.682.248			
Outcomes 2 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terinfeksi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	25,03	27,35		28,89		30,44		31,98		33,53		33,53	
						2.709.813.700		2.791.108.111		2.874.841.354		2.961.086.595		3.049.919.193	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
Outcomes 3 : Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	0,28	0,3	-	0,31	-	0,32	-	0,33	-	0,34	-	0,35	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.943.143.250		10.241.437.548		10.548.680.674		10.865.141.094		11.191.095.327			
Outcomes 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	63,95	64,9		65,7		66,42		67,2		68,1		68,1	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.880.006.700		3.996.406.901		4.116.299.108		4.239.788.081		4.366.981.724			
Outcomes 5 : Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan dan pedesaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	34,07	39,97		42,92		45,87		48,82		51,77		51,77	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan								Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029				2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN				21.148.083.000		21.782.525.490		22.436.001.255		23.109.081.292		23.802.353.731			
Outcomes 6 : Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	83,61	88,52	90,16		91,8		93,44		95,08		95,08		
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	1,44	1,55	1,69		1,86		2,02		2,22		2,22		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				47.487.521.560		48.487.521.560		49.487.521.560		50.487.521.560		51.487.521.560			
Outcomes 7 : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	33,8	35,75	37,7		39,65		41,6		43,55		45,5		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.726.321.000		1.778.110.630		1.831.453.949		1.886.397.567		1.942.989.494			
Outcome 8 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	0	0	0		0		0		0		0		
	Penetapan RTRW	Perda	1	0	1		-		-		-		1		
	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	4	0	1		0		1		0		6		
	Penetapan RDTR	Perkada	3	1	0		1		0		1		6		
01.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				346.715.200		357.116.656		367.830.156		378.865.060		390.231.012			
Outcomes 1 : Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				10.270.003.200		10.578.103.296		10.895.446.395		10.895.446.395		10.895.446.395			
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	2,63	2,71		2,79		2,87		2,96		3,05		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
Outcomes 3 : Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	53,59	55,2	-	56,86	-	58,56	-	60,32	-	62,13	62,13		



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				6.679.814.000		6.880.208.420		7.086.614.673		7.299.213.113		7.518.189.506			
Outcomes 4 : Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	49,71	50,8		51,98		53,16		54,34		55,52		55,52	
01.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcomes 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	5.624.620.686	100	5.793.359.307	100	5.967.160.086	100	6.146.174.888	100	6.330.560.135	100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100		100		100		100	-	100	-	100	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0	33,33		66,67		100		100	-	100	-	100	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				747.662.900		770.092.787		793.195.571		816.991.438		841.501.181			
Outcomes 2 : Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1450	1550		1650		1750		1850		1950		2050	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	324	350		360		370		380		390		400	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				465.287.481		479.246.105		493.623.489		508.432.193		523.685.159			
Outcomes 3 : Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	N/A	15		15		15		15	-	15	-	15	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				269.672.356		277.762.527		286.095.402		294.678.265		303.518.612			
Outcomes 1 : Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.059.374.700		1.091.155.941		1.123.890.619		1.157.607.338		1.192.335.558			
Outcomes 2 : Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	%	13,82	18,48		20,94		23,8		26,26		26,26		26,26	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	41,67	66,67		70,83		75		83,33		91,67		91,67	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				358.726.500		369.488.295		380.572.944		391.990.132		403.749.836			
Outcomes 3 : Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	2554	3400		4200		5000		5200		5400		5400	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				621.347.500		639.987.925		659.187.563		678.963.190		699.332.085			
Outcomes 4 : Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		100	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
02. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
02.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				215.778.000		222.251.340		228.918.880		235.786.447		242.860.040		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA	
Outcomes 1 : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	4	6,7	8,2		10,2		12,8		12,8		12,8		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				973.958.250		1.003.176.998		1.033.272.307		1.064.270.477		1.096.198.591			
Outcomes 2 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	19	57	76		96		100		100		100		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				81.036.000		83.467.080		85.971.092		88.550.225		91.206.732			
Outcomes 3 : Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,41	42	61		81		100		100		100		
02.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				131.392.200		135.333.966		139.393.985		143.575.805		147.883.079		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,36	98,56	98,66		98,76		98,86		98,96		98,96		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				338.135.800		348.279.874		358.728.270		369.490.118		380.574.822			



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Outcomes 2 : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					576.163.900		593.448.817		611.252.282		629.589.850		648.477.545		
Outcomes 3 : Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,493	0,395		0,39		0,385		0,37		0,35		0,35	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					33.905.000		34.922.150		35.969.815		37.048.909		38.160.376		
Outcomes 4 : Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	%	100	100		100		100		100		14		14	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					112.107.000		115.470.210		118.934.316		122.502.346		126.177.416		
Outcomes 5 : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	N/A	10		15		20		25		30		30	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					36.393.500		37.485.305		38.609.864		39.768.160		40.961.205		
Outcomes 6 : Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100		100		100		100		100		100	
02.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					88.309.750		90.959.043		93.687.814		96.498.448		99.393.402		



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Outcomes 1 : Meningkatnya kemampuan kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	%	61,05	63,05		64,05		65,05		66,05		67,05		67,05	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.514.432.287		1.559.865.256		1.606.661.213		1.654.861.050		1.704.506.881		
Outcomes 2 : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	66,2	68,2		69,2		70,2		71,2		72,2		73,2	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					75.766.250		78.039.238		80.380.415		82.791.827		85.275.582		
Outcomes 3 : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,59	8,59		7,59		6,59		5,59		4,59		4,59	
02.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					180.852.000		186.277.560		191.865.887		197.621.863		203.550.519		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANAHAN
Outcomes 1 : Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	%	48,07	50,95		52,48		54,05		55,68		57,35		57,35	
02.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Outcomes 1 : Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	50	53	-	54,59	-	56,23	-	57,91	-	59,65	-	61,44	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					81.188.000		83.623.640		86.132.349		88.716.320		91.377.809		
Outcomes 2 : Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	46,67	47,14		47,61		48,08		48,56		49,05		49,54	
	Indeks Kualitas Udara	Poin	90,69	90,69		90,69		90,69		90,69		90,69		90,69	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					477.858.623		492.194.382		506.960.213		522.169.020		537.834.090		
Outcomes 3 : Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%	2,04	2,17		2,23		2,3		2,37		2,44		2,51	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					18.962.000		19.530.860		20.116.786		20.720.289		21.341.898		
Outcomes 4 : Meningkatkan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	88,04	89,8		90,7		91,61		92,53		93,45		94,39	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					166.644.000		171.643.320		176.792.620		182.096.398		187.559.290		
Outcomes 5 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	100	92		92		92		92		92		92	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
Outcomes 6 : Meningkatnya pengakuan MHA	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					127.476.500		131.300.795		135.239.819		139.297.013		143.475.924		
Outcomes 7 : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	9	18		27		36		45		54		63	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					48.414.000		49.866.420		51.362.413		52.903.285		54.490.384		
Outcomes 8 : Meningkatkan masyarakat penerima penghargaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	%	0,1		0,6		0,8		1		1		1	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					11.485.000		11.829.550		12.184.437		12.549.970		12.926.469		
Outcomes 9 : Meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	~	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					619.259.181		637.836.956		656.972.065		676.681.227		696.981.664		
Outcomes 10 : Meningkatkan layanan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	0,28	0,3		0,31		0,32		0,33		0,34		0,349	
02.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					288.673.000		297.333.190		306.253.186		315.440.781		324.904.005		
Outcomes 1 : Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik	%	96,58	97,84		98,47		99,1		99,73		99,73		99,73	
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	14,15	15,29		16,1		16,9		17,7		17,7		17,7	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					120.055.000		123.656.650		127.366.350		131.187.340		135.122.960		
Outcomes 2 : Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	40,41	42,16		42,58		43		43,43		43,87		44,31	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	8,33	8,41		8,5		8,58		8,67		8,75		8,84	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	43,22	43,65		44,09		44,53		44,97		45,42		45,88	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					170.211.300		175.317.639		180.577.168		185.994.483		191.574.318		
Outcomes 3 : Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	0,07		0,12		0,24		0,37		0,49		0,49	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					122.141.700		122.141.700		122.141.700		122.141.700		122.141.700		
Outcomes 4 : Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	
02.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
PROGRAM PENATAAN DESA					457.446.000		471.169.380		485.304.461		499.863.595		514.859.503		
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	N/A	44,51		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					120.693.000		124.313.790		128.043.204		131.884.500		135.841.035		
Outcomes 2 : Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	N/A	3,47		4,62		5,78		6,94		8,09		8,09	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					599.898.350		617.895.301		636.432.160		655.525.124		675.190.878		
Outcomes 3 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	%	NA	2,89		5,78		8,67		11,56		14,45		14,45	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase BUM Desa Maju	%	NA	2,89		5,78		8,67		11,56	-	14,45	-	14,45	
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	5,78	34,68		49,13		63,58		78,03		92,49		92,49	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					143.406.750		147.708.953		152.140.221		156.704.428		161.405.561		
Outcomes 4 : Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	40	40		40		80		80		100		100	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
02.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				185.519.800		191.085.394		196.817.956		202.722.494		208.804.169		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Outcomes 1 : Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	41,5	48,5	51	52,9	54,4	55,6	55,6						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				5.529.002.950		5.694.873.039		5.865.719.230		6.041.690.807		6.222.941.531			
Outcomes 2 : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	1,1	5,3	7,2	8,9	10,5	12	12						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.464.761.500		2.538.704.345		2.614.865.475		2.693.311.440		2.774.110.783			
Outcomes 3 : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Poin	54,7	57,8	59,3	60,7	62	63,2	63,2						
02.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.953.120.791		2.011.714.415		2.072.065.847		2.134.227.823		2.198.254.657		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN	
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten /Kota	%	2,47	2,55	2,62	2,7	2,78	2,87	2,87						
	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	1.515	7	55,93	56,45	58,73	60	60						
	Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang tersertifikasi	Orang	1	3	5	6	7	8	8						
	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B	Unit	0	0	1	-	-	-	-						

Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0,15	0,15		0,15		0,15		0,23		0,23		0,23	
02.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					118.944.250		122.512.578		126.187.955		129.973.593		133.872.801		
Outcomes 1 : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75	77		79		81		83		85		85	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.886.841.450		1.943.446.694		2.001.750.094		2.061.802.597		2.123.656.675		
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	47,22	55,56		59,722		63,89		68,06		72,22		72,22	
02.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					8.895.500		9.162.365		9.437.236		9.720.353		10.011.964		
Outcome 1 : Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	5,88	7,84		8,8		9,8		10,8		10,8		10,8	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.334.000		51.844.020		53.399.341		55.001.321		56.651.360		
Outcomes 2 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.040.300		51.541.509		53.087.754		54.680.387		56.320.799		
Outcomes 3 : Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	56,86	86,64		89,17		91,7		94,22		96,75		96,75	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				50.334.000		51.844.020		53.399.341		55.001.321		56.651.360			
Outcomes 4 : Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	9,8	7,22		7,22		10,83		14,44		18,05		18,05	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
Outcomes 5 : Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	28,43	61,48	-	62,01	-	62,53	-	63,06	-	63,59	-	63,59	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				151.326.375		155.866.166		160.542.151		165.358.416		170.319.168			
Outcome 6 : Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	9,13	10,97		12,81		12,81		14,65		16,49		16,49	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				140.427.100		144.639.913		148.979.110		153.448.484		158.051.938			
Outcomes 7 : Meningkatnya daya saing UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	8,06	13,42		17,24		20,1		22,32		24,1		24,1	
02.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				205.929.000		212.106.870		218.470.076		225.024.178		231.774.904			
Outcomes 1 : Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milliar rupiah	202.011. 077.106	220.01 1.077.1 06		223.011. 077.106		226.511. 077.106		230.011. 077.106		230.011. 077.106		2,30E+11	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.318.500		1.358.055		1.398.797		1.440.761		1.483.983			
Outcomes 2 : Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	84,62	11,11		10		9,09		8,33		8,33		8,33	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				359.594.290		370.382.119		381.493.582		392.938.390		404.726.541			
Outcomes 3 : Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	95,03	100		100		100		100		100		100	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				51.677.000		53.227.310		54.824.129		56.468.853		58.162.919			
Outcomes 4 : Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	89,78	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1.100.000		1.133.000		1.166.990		1.202.000		1.238.060			
Outcomes 5 : Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100		100		100		100		120		120	
02.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				205.613.600		211.782.008		218.135.468		224.679.532		231.419.918			
Outcomes 1 : Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	9,09	26,36		34,24		41,82		49,39		49,4		49,4	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.076.089.858		2.138.372.554		2.202.523.730		2.268.599.442		2.336.657.426			DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Outcomes 2 : Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	77	84		93		102		102		111		35	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				489.605.700		504.293.871		519.422.687		535.005.368		551.055.529			
Outcomes 3 : Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	43,38	49,89		53,15		57,48		60,74		280		280	
02.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				469.961.700		484.060.551		498.582.368		513.539.839		528.946.034			
Outcomes 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	73,3	100		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan								Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029				2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1.158.822.800		1.193.587.484		1.229.395.109		1.266.276.962		1.304.265.271			
Outcomes 2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	10	25,25		27,78		30,3		35,35		35,35	35,35		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.169.574.654		1.204.661.894		1.240.801.750		1.278.025.803		1.316.366.577			
Outcomes 3 : Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100		100		100		100		100	100		
02.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				272.270.472		280.438.586		288.851.744		297.517.296		306.442.815			
Outcomes 1 : Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	52,79	53,79		54,54		55,54		56,29		57,29	57,29		
02.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				214.751.800		221.194.354		227.830.185		234.665.090		241.705.043			
Outcomes 1 : Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	100	100		100		100		100		100	100		
03. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
03.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				524.091.562		539.814.309		556.008.738		572.689.000		589.869.670			
Outcomes 1 : Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.680	2.080		2.320		2.560		2.800		2.800	2.800		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				398.498.768		410.453.731		422.767.343		435.450.363		448.513.874			
Outcomes 2 : Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	692	830		842		854		866		866	866		
	Produksi Garam	Ton	N/A	5		6		7		8	-	9	-		



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan								Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029				2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					75.570.886		77.838.013		80.173.153		82.578.348		85.055.698		
Outcomes 3 : Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	-	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					119.176.500		122.751.795		126.434.349		130.227.379		134.134.201		
Outcome 4 : Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	24,21	26		27		28		29		30		30	
03.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					661.908.736		681.765.998		702.218.978		723.285.547		744.984.114		
Outcomes 1 : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,31	0,36		0,4		0,43		0,45		0,46		0,46	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					491.042.000		505.773.260		520.946.458		536.574.852		552.672.097		
Outcomes 2 : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	2.837	2.961		3.023		3.085		3.147		3.209		3.209	
	Jumlah wisatawan Nusantara	Orang	10.335	12.105		12.990		13.875		14.760		15.645		15.645	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					64.002.400		65.922.472		67.900.146		69.937.151		72.035.265		
Outcomes 3 : Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	NA		33,33		66,67		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					212.973.550		219.362.757		225.943.639		232.721.948		239.703.607		
Outcomes 4 : Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	35,18	37,15		39,13		41,11		43,08		45,06		45,06	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
03.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.302.443.908		1.341.517.225		1.381.762.742		1.423.215.624		1.465.912.093			
				1.171.489.243		1.206.633.920		1.242.832.938		1.280.117.926		1.318.521.464			
Outcomes 1 : Meningkatnya produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	%	16,98	18,98	19,98		20,98		21,98		22,98		22,98		
		% (ternak besar)	1,58	0,99	0,98		0,97		0,96		0,96		0,96		
Outcomes 2 : Meningkatnya produksi komoditas peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	% (ternak kecil)	9,98	2,91	2,83		2,75		2,68		-	2,68	-	2,68	
		% (unggas)	6,73	5,32	5,05		4,81		4,59		-	4,59	-	4,59	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				382.437.980		393.911.119		405.728.453		417.900.307		430.437.316			
				210.473.000		216.787.190		223.290.806		229.989.530		236.889.216			
Outcomes 3 : Meningkatnya produksi jagung dan padi	Jumlah Produksi Jagung	Ton	257.124	311.808	321.163		330.798		340.721		340.721		340.721		
	Jumlah Produksi Padi	Ton	83.125	88.187	90.833		93.558		96.365		-	96.365	-	96.365	
Outcomes 4 : Meningkatnya produksi daging dan telur	Meningkatnya produksi daging (sapi, Kerbau, babi, kambing, unggas)	Ton	559,34	586,02	599,33		1.185,35		625,99		625,99		625,99		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				699.165.871		720.140.847		741.745.073		763.997.425		786.917.347			
Outcomes 5 : Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				86.808.350		88.978.559		91.203.023		93.483.098		93.483.098			
Outcome 6 : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	N/A	12,78	13,58		14,38		15,18		15,98		15,98		



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.764.265.240		1.817.193.197		1.871.708.993		1.927.860.263		1.985.696.071			
Outcomes 7 : Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	2,8	34,58		50,47		66,36		82,24		98,13		98,13	
03.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				116.876.234		120.382.521		123.888.808		127.395.095		130.901.382			
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	31,25	56,25		68,75		81,25		93,75		100		100	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				419.371.600		431.952.748		444.911.330		458.258.670		472.006.430			
Outcomes 2 : Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (ISH)	%	7,016	6,816		6,716		6,616		6,516		6,416		6,416	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				19.427.350		20.010.170		20.592.991		21.175.811		21.758.632			
Outcomes 3 : Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	%	0,46	0,69	-	0,81	-	0,93	-	1,04	-	1,16	-	1,16	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				97.051.500		99.963.045		102.961.936		106.050.794		109.232.318			
Outcomes 4 : Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	30	40		45		50		55		60		60	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				4.680.000		4.820.400		4.965.012		5.113.962		5.267.381			
Outcomes 5 : Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	%	16,13	29,03		35,48		41,94		48,39		54,84		54,84	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
03.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.139.579.124		1.173.766.498		1.208.979.493		1.245.248.877		1.282.606.344			
Outcomes 1 : Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (PUI) / Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3	3,26		3,37		3,46		3,54		3,61		3,61	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					19.474.000		20.058.220		20.659.967		21.279.766		21.918.159			
Outcome 2 : Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap	%	7,16	9,47		10,62		11,78		12,93		14,09		14,09		
03.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					289.780.000		298.473.400		307.427.602		316.650.430		326.149.943			
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di Fasilitas Perencanaannya	%	NA	33	0	50		67		83	-	100	-	100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TRANSMIGRASI	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					5.000.000		5.150.000		5.304.500		5.463.635		5.627.544			
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	0,33	1,15		1,56	-	1,97	-	2,38	-	2,79	-	2,79		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					132.770.500		136.753.615		140.856.223		145.081.910		149.434.367			
Outcomes 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100		100		100		100		100		100		
04. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
04.01. SEKRETARIAT DAERAH																
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	577.866.000	100	595.201.980	100	613.058.039	100	631.449.781	100	650.393.274	100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	33,33	33,33	3.786.101.000	50	3.899.684.030	66,67	4.016.674.551	83,33	4.137.174.787	100	4.261.290.031	100	
	persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100	100	176.718.000	100	182.019.540	100	187.480.126	100	193.104.530	100	198.897.666	100	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan ekonomi)	%	N/A	80	400.691.400	82,5	412.712.142	85	425.093.506	87,5	437.846.311	90	450.981.701	90	
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	80	84,8	177.387.800	95	182.709.434	95	188.190.717	96	193.836.439	96	199.651.532	96	
	Tingkat Kematangan UKPBJ	%	100	100	337.306.500	100	347.425.695	100	357.848.466	100	368.583.920	100	379.641.437	100	
04.02. SEKRETARIAT DPRD															
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					7.468.149.250		7.692.193.728		7.922.959.539		8.160.648.326		8.405.467.775		
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	persentase penetapan ranperda tahun n	%	100	100		100		100		100		100		100	
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100		100		100		100	-	100	-	100	
05. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
05.01. PERENCANAAN															



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.615.934.187		1.664.412.213		1.714.344.579		1.765.774.916		1.818.748.164		
Outcomes 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.768.651.300		1.821.710.839		1.876.362.164		1.932.653.029		1.990.632.620		
Outcomes 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
	Outcomes 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
Outcomes 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100		100		100		100		100		100	
05.02. KEUANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					254.382.348.759		262.013.819.223		269.874.233.799		275.970.460.813		279.809.123.857		
Outcomes 1 : Meningkatkan tata kelola anggaran	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					824.668.500		849.408.555		874.890.812		901.137.536		928.171.662		
Outcomes 2 : Meningkatkan tata kelola aset daerah	persentase penambahan nilai aset tetap	%	6,16	8		8		8		8		8		8	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan								Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029				2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.973.023.460		2.032.214.164		2.093.180.589		2.155.976.006		2.220.655.287			
Outcomes 1 : Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3,65	3,69		3,74		3,78		3,83		3,87	3,87		
05.03. KEPEGAWAIAN															
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.785.253.400		1.838.811.002		1.893.975.332		1.950.794.592		2.009.318.430			
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	0,9	100		100		100		100		100	100		
Outcomes 2 : Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0,88	90		93		96		98		100	100		
Outcomes 3 : Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	0,17	20		21		25		27		29	29		
Outcomes 4 : Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	0,76	80		83		85		88	-	90	90		
05.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				585.442.000		603.005.260		621.095.418		639.728.280		658.920.129			
Outcomes 1 : Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	0,058	10		15		20		25		30	30		
05.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				811.808.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000			
Outcomes 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil keltibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100	100		



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
05.06. RISET DAN INOVASI DAERAH															
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				0		36.162.240		61.247.107		87.084.520		113.697.056		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
Outcomes 1 : Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	N/A	0		100		100		100		100			
06. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
06.01. INSPEKTORAT DAERAH															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.510.284.000		1.555.592.520		1.602.260.296		1.650.328.104		1.699.837.948		77	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
Outcomes 1 : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	76,96	77		77		77		77		77			
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				288.196.750		296.842.653		305.747.932		314.920.370		324.367.981		3	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
Outcomes 2 : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2		2		3		3		3			
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2		2		3		3	-	3	-	3	
07. UNSUR KEWILAYAHAN															
07.01. KECAMATAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcomes 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	%	100	100	189.625.000	100	195.313.750	100	201.173.163	100	207.208.357	100	213.424.608	100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KECAMATAN
		%	100	100	31.120.000	100	32.053.600	100	33.015.208	100	34.005.664	100	35.025.834	100	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		%	100	100	170.436.500	100	175.549.595	100	180.816.083	100	186.240.565	100	191.827.782	100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KECAMATAN
		%	100	100	17.455.000	100	17.978.650	100	18.518.010	100	19.073.550	100	19.645.756	100	
		%	100	100	203.697.000	100	209.807.910	100	216.102.147	100	222.585.212	100	229.262.768	100	
		%	100	100	202.906.000	100	208.993.180	100	215.262.975	100	221.720.865	100	228.372.491	100	
		%	100	100	252.071.000	100	259.633.130	100	267.422.124	100	275.444.788	100	283.708.131	100	
		%	100	100	230.143.000	100	237.047.290	100	244.158.709	100	251.483.470	100	259.027.974	100	
		%	100	100	174.049.000	100	179.270.470	100	184.648.584	100	190.188.042	100	195.893.683	100	
		%	100	100	304.033.750	100	313.154.763	100	322.549.405	100	332.225.888	100	342.192.664	100	
		%	100	100	175.770.750	100	181.043.873	100	186.475.189	100	192.069.444	100	197.831.528	100	
		%	100	100	50.379.000	100	51.890.370	100	53.447.081	100	55.050.494	100	56.702.008	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcomes 2 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	31.226.500	100	32.163.295	100	33.128.194	100	34.122.040	100	35.145.701	100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KECAMATAN
		%	100	100	90.048.500	100	92.749.955	100	95.532.454	100	98.398.427	100	101.350.380	100	
		%	100	100	41.383.000	100	42.624.490	100	43.903.225	100	45.220.321	100	46.576.931	100	
		%	100	100	256.823.000	100	264.527.690	100	272.463.521	100	280.637.426	100	289.056.549	100	
		%	100	100	95.705.000	100	98.576.150	100	101.533.435	100	104.579.438	100	107.716.821	100	
		%	100	100	23.821.000	100	24.535.630	100	25.271.699	100	26.029.850	100	26.810.745	100	
		%	100	100	44.826.000	100	46.170.780	100	47.555.903	100	48.982.581	100	50.452.058	100	
		%	100	100	46.112.750	100	47.496.133	100	48.921.016	100	50.388.647	100	51.900.306	100	
		%	100	100	76.551.000	100	78.847.530	100	81.212.956	100	83.649.345	100	86.158.825	100	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		%	100	100	26.624.000	100	27.422.720	100	28.245.402	100	29.092.764	100	29.965.547	100	
		%	100	100	27.010.750	100	27.821.073	100	28.655.705	100	29.515.376	100	30.400.837	100	
		%	100	100	618.886.000	100	637.452.580	100	656.576.157	100	676.273.442	100	696.561.645	100	
		%	100	100	577.526.750	100	594.852.553	100	612.698.129	100	631.079.073	100	650.011.445	100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcomes 3 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	16.740.000	100	17.242.200	100	17.759.466	100	18.292.250	100	18.841.017	100	
		%	100	100	16.317.500	100	16.807.025	100	17.311.236	100	17.830.573	100	18.365.490	100	
		%	100	100	36.928.750	100	38.036.613	100	39.177.711	100	40.353.042	100	41.563.633	100	
		%	100	100	22.600.000	100	23.278.000	100	23.976.340	100	24.695.630	100	25.436.499	100	
		%	100	100	21.280.000	100	21.918.400	100	22.575.952	100	23.253.231	100	23.950.827	100	
		%	100	100	13.862.000	100	14.277.860	100	14.706.196	100	15.147.382	100	15.601.803	100	
		%	100	100	6.559.000	100	6.755.770	100	6.958.443	100	7.167.196	100	7.382.212	100	
		%	100	100	21.485.000	100	22.129.550	100	22.793.437	100	23.477.240	100	24.181.557	100	
		%	100	100	12.240.250	100	12.607.458	100	12.985.681	100	13.375.252	100	13.776.509	100	
		%	100	100	18.281.000	100	18.829.430	100	19.394.313	100	19.976.142	100	20.575.427	100	
		%	100	100	27.660.000	100	28.489.800	100	29.344.494	100	30.224.829	100	31.131.574	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Outcomes 4 : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100	136.676.000	100	140.776.280	100	144.999.568	100	149.349.555	100	153.830.042	100	
		%	100	100	168.138.000	100	173.182.140	100	178.377.604	100	183.728.932	100	189.240.800	100	



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024 ¹	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		%	100	100	175.632.250	100	180.901.218	100	186.328.254	100	191.918.102	100	197.675.645	100	
		%	100	100	94.798.000	100	97.641.940	100	100.571.198	100	103.588.334	100	106.695.984	100	
		%	100	100	72.050.000	100	74.211.500	100	76.437.845	100	78.730.980	100	81.092.910	100	
		%	100	100	152.063.500	100	156.625.405	100	161.324.167	100	166.163.892	100	171.148.809	100	
		%	100	100	150.906.000	100	155.433.180	100	160.096.175	100	164.899.061	100	169.846.032	100	
		%	100	100	130.852.500	100	134.778.075	100	138.821.417	100	142.986.060	100	147.275.642	100	
		%	100	100	73.076.000	100	75.268.280	100	77.526.328	100	79.852.118	100	82.247.682	100	
		%	100	100	119.583.000	100	123.170.490	100	126.865.605	100	130.671.573	100	134.591.720	100	
		%	100	100	120.059.250	100	123.661.028	100	127.370.858	100	131.191.984	100	135.127.744	100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcomes 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persentase desa/kelurahan yang menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	%	100	100	44.650.000	100	45.989.500	100	47.369.185	100	48.790.261	100	50.253.968	100	
		%	100	100	44.830.000	100	46.174.900	100	47.560.147	100	48.986.951	100	50.456.560	100	
		%	100	100	142.368.000	100	146.639.040	100	151.038.211	100	155.569.358	100	160.236.438	100	
		%	100	100	53.986.000	100	55.605.580	100	57.273.747	100	58.991.960	100	60.761.719	100	
		%	100	100	61.614.800	100	63.463.244	100	65.367.141	100	67.328.156	100	69.348.000	100	
		%	100	100	77.633.200	100	79.962.196	100	82.361.062	100	84.831.894	100	87.376.851	100	
		%	100	100	16.130.000	100	16.613.900	100	17.112.317	100	17.625.687	100	18.154.457	100	
		%	100	100	61.148.250	100	62.982.698	100	64.872.178	100	66.818.344	100	68.822.894	100	
		%	100	100	70.008.000	100	72.108.240	100	74.271.487	100	76.499.632	100	78.794.621	100	
		%	100	100	58.376.000	100	60.127.280	100	61.931.098	100	63.789.031	100	65.702.702	100	
		%	100	100	35.927.500	100	37.005.325	100	38.115.485	100	39.258.949	100	40.436.718	100	
DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KECAMATAN															



Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan										Kondisi pada akhir tahun RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
08. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
08.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					926.666.626		954.466.625		983.100.624		1.012.593.642		1.042.971.451		
Outcomes 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.114.448.306		1.147.881.755		1.182.318.208		1.182.318.208		1.182.318.208		
Outcomes 2 : Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA					383.811.000		395.325.330		407.185.090		419.400.643		431.982.662		
Outcomes 3 : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	93,75	94,83		97,06		97,44		97,73		98,98		98,98	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					383.811.000		395.325.330		407.185.090		419.400.643		431.982.662		
Outcomes 4 : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Penyelesaian Konflik	%	100	100		100		100		100		100		100	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2025 – 2029 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatannya. Sejalan dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4
2.	Tingkat Kemiskinan	%	27.48	25.11	24.11	23.11	22.11	21.11	20.11
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	63.74	64.49	65.24	65.99	66.74	67.49	68
4.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.99	69.4	69.81	70.22	70.63	71.04	72
5.	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	13,971,677	15,253,870	17,779,751	20,305,631	22,831,512	25,357,392	26,371,688
6.	Indeks Infrastruktur	Poin	46,03	50,76	54,22	57,49	60,74	64,31	68,30
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	61.18	61,18	62	64	66	68	70
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	47.41	51	54.59	58.18	61.77	65.36	67

TABEL 4. 3 INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 – 2030

No.	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan						Kondisi pada akhir tahun RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	62,66	64,86	67,07	69,27	71,47	73,67	75,77	75,77
2	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Poin	136,97	130,22	107,89	125,86	120,23	115,20	110,50	105,90
3	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	81,22	82,22	83,22	84,22	85,22	86,22	87,22	87,22
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69	90,69
5	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	46,67	47,17	47,67	48,17	48,67	49,17	49,67	49,67
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	42,20	42,70	43,20	43,70	44,20	44,70	45,20	45,20
7	Indeks Jaringan Jalan	Poin	51,68	54,26	55,77	57,28	58,78	60,29	61,80	61,80
8	Indeks Sanitasi	Poin	73,28	74,59	75,90	77,28	78,52	79,83	81,14	81,14
9	Indeks Air Bersih	Poin	25,03	26	26,97	27,94	28,91	29,88	30,85	30,85
10	Indeks Irigasi	Poin	61,34	62	62,66	63,32	63,98	64,64	65,30	65,30
11	Indeks Perumahan dan Permukiman	Poin	60,97	62,89	64,77	67,89	72,00	74,71	79	79
12	Indeks Perizinan Tata Ruang	Poin	40,93	44,64	51,16	56,25	58,75	67,10	75,45	75,45
13	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	0,28	0,28	5	10	15	20	25	25

No.	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan						Kondisi pada akhir tahun RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	%	0,0085	0,0085	5	10	15	20	25	25
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,14	2,10	2,06	2,02	1,98	1,94	1,90	1,90
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Literasi Tingkat SD	%	33,39	40,34	47,29	54,24	61,19	68,14	69	69
2	Numerasi Tingkat SD	%	30,33	35,51	40,69	45,87	51,05	56,23	60	60
3	Literasi Tingkat SMP	%	26,21	46,56	53,51	60,46	67,41	74,36	75	75
4	Numerasi Tingkat SMP	%	31,14	49,8	54,98	60,16	65,34	70,52	71	71
5	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	6,39	7,39	8,39	9,39	10,39	11,39	11,39	12
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	64,46	64,56	66,66	68,76	70,86	72,96	74	74
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,95	92,25	92,55	92,85	93,15	93,45	95	95
8	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	7	0	0	0	0	0	0	0
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	59	0	0	0	0	0	0	0
10	Prevalensi Balita Stunting	%	39,2	39,20	37,80	36,40	34,90	33,60	32,40	32,40
11	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Kasus Malaria	%	7,4	7	5,5	4	2	1	0	0



No.	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan						Kondisi pada akhir tahun RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Succes Rate Pengobatan TBC	%	4,24	40	45	50	60	70	80	80
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,08	1,77	1,67	1,47	1,37	1,27	1	1
15	Gini Ratio	Poin	0,313	0,313	0,300	0,287	0,274	0,261	0,200	0,200
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP)	%	74	75	76	77	78	79	80	80
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,493	0,4	0,395	0,39	0,385	0,370	0,350	0,350
18	Total Fertility Rate (TFR)	Poin	3,28	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
19	Angka Kelahiran Menurut Usia Tertentu/Age Spesific Fertility Rate 15 – 19 Tahun	Poin	22.3	21.9	21.5	21.1	20.7	20.4	20	20
20	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	%	64,6	66,3	67,8	69,1	70,3	71,4	72,3	72,3
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	1.790,7	2.041,76	2.162,08	2.282,4	2.402,72	2.523,04	2.623,04	2.623,04
2	PDRB ADHB Sektor Pariwisata (Akmomodasi, Makan dan Minum)	Milyar Rupiah	1,7	2,22	2,67	2,93	3,19	3,45	4	4
3	PDRB ADHB Sektor Pengolahan	Milyar Rupiah	36	45,29	48,57	51,86	55,14	58,43	60	60
4	PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	663	799,405	855,83	912,255	968,68	1.025,10	1.050,10	1.050,10

No.	Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan						Kondisi pada akhir tahun RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Tax Ratio Terhadap PDRB	%	0,46	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,74
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Poin	47,82	47,82	48	48,82	49,64	50,46	55	55
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintah Digital	Poin	2,03/-	2,38/-	2,73/1	3,08/1,1	3,43/1,2	3,78/1,3	4,13/1,4	4,13/1,4
4	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	2,96	3	3,04	3,08	3,16	3,20	3,24	3,24
5	Indeks Masyarakat Digital (IMDI)	Poin	40,02	41,02	42,02	43,02	44,02	45,02	46,02	46,02
6	SAKIP	Poin	50,05	60,05	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	85,05

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
01 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR								
01.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	75,99	76,99	78,19	79,29	80,39	81,49	82,59



Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	65,19	66,19	67,39	68,49	69,59	70,69	85,05
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	52,15	53,15	54,35	55,45	56,55	57,65	88,935
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	41	42	75	85	95	100	100
01.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
Indeks Keluarga Sehat	angka	0	0	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65
Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	100	90	90	100	100	100	100
01.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	33,80	33,80	35,75	37,70	39,65	41,60	43,55
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	25,03	25,03	27,35	28,89	30,44	31,98	33,53
Penetapan RTRW	Dokumen	0	0	0	1	-	-	-

Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Penetapan RDTR	%	23,08	23,08	30,77	30,77	38,46	38,46	46,15
Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	0,28	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
01.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	53,59	55,20	55,20	56,86	58,56	60,32	62,13
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	49,71	50,68	50,80	51,98	53,16	54,34	55,52
01.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
01.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	2554	3000	3400	4200	5000	5200	5400
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	41,67	50,00	66,67	70,83	75	83,33	91,67
02. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
02.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	4	4,5	6,7	8,2	10,2	12,8	12,8
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,41	3,41	42	61	81	100	100
02.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,493	0,45	0,395	0,39	0,385	0,37	0,35
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,36	98,46	98,56	98,66	98,76	98,86	98,96
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
02.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	66,2	67,2	68,2	69,2	70,2	71,2	72,2
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	10,59	9,5	8,59	7,59	6,59	5,59	4,59
02.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	%	48,07	48,07	50,95	52,48	54,05	55,68	57,35
02.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	0,28	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34



Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
02.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Perekaman KTP elektronik	%	96,58	96,79	97,84	98,47	99,10	99,73	99,73
02.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	N/A	44,51	44,51	100	100	100	100
Persentase Desa Mandiri	%	NA	NA	2,89	5,78	8,67	11,56	14,45
Persentase BUM Desa Maju	%	NA	NA	2,89	5,78	8,67	11,56	14,45
02.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	54,7	55,5	57,8	59,3	60,7	62	63,2
02.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,23	0,23
02.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75	76	77	79	81	83	85
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	47,22	51,94	55,56	59,722	63,89	68,06	72,22
02.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Persentase Koperasi Aktif	%	56,86	56,86	86,64	89,17	91,70	94,22	96,75
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	9,13	9,13	10,97	12,81	12,81	14,65	16,49
02.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Nilai Realisasi Penanaman Modal	Miliar rupiah	202.011.077.106	212.111.630.961	220.011.077.106	223.011.077.106	226.511.077.106	230.011.077.106	230.011.077.106
02.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	77	80	84	93	102	102	111
02.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100	100	100	100	100	100
02.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	52,79	53,79	53,79	54,54	55,54	56,29	57,29
02.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
Tingkat Ketersediaan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	100
03. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
03.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.680	1.848	2.080	2.320	2.560	2.800	2.800
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	692	761	830	842	854	866	866



Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Produksi Garam	Ton	N/A	0	5	6	7	8	9
03.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	2.837	2.894	2.961	3.023	3.085	3.147	3.209
Jumlah wisatawan Nusantara	Orang	10.335	11.369	12.105	12.990	13.875	14.760	15.645
03.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
Jumlah Produksi Jagung	Ton	257.124	282.837	311.808	321.163	330.798	340.721	340.721
Jumlah Produksi Padi	Ton	83.125	85.619	88.187	90.833	93.558	96.365	96.365
Meningkatnya produksi daging (sapi, Kerbau, babi, kambing, unggas)	Ton	559,34	567,73	586,02	599,33	1.185,35	625,99	625,99
03.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	31,25	32,19	56,25	68,75	81,25	93,75	100
03.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap	%	7,16	7,37	9,47	10,62	11,78	12,93	14,09
03.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100
04. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
04.01. SEKRETARIAT DAERAH								



Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan ekonomi)	%	N/A	80	80	82,5	85	87,5	90
Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	80	82,4	84,8	95	95	96	96
Tingkat Kematangan UKPBJ	%	100	100	100	100	100	100	100
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	33,33	33,33	33,33	50	66,67	83,33	100
Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	100	100
04.02. SEKRETARIAT DPRD								
Persentase penetapan ranperda tahun n	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
05. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
05.01. PERENCANAAN								
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100
05.02. KEUANGAN								
Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Persentase penambahan nilai aset tetap	%	6,16	6,19	8	8	8	8	8
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3,65	3,67	3,69	3,74	3,78	3,83	3,87
05.03. KEPEGAWAIAN								
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	90	92,7	100	100	100	100	100
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	87,71	89,02	90	93	96	98	100
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	16,67	17,17	20	21	25	27	29
05.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	0,058	0,060	10	15	20	25	30
05.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
05.06. RISET DAN INOVASI DAERAH								
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	N/A	0	0	100	100	100	100
06. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
06.01. INSPEKTORAT DAERAH								

Indikator Program	Satuan	Baseline capaian 2024	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			K	K	K	K	K	K
Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	76,96	76,96	77	77	77	77	77
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	2	3	3	3
07. UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01. KECAMATAN								
persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
persentase desa/kelurahan yang menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
08. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
08.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Persentase Penyelesaian Konflik	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100





BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2029 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, terhitung mulai dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Prov. NTT Tahun 2025 - 2029 dan RPJMN Tahun 2025 - 2029. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparaturnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dukungan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Prov. NTT maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani seluruh masyarakat.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah :

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. RKPD masa transisi pada tahun pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025 – 2030 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2045. RPJMD juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sumba Barat Daya dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar melaksanakan program - program dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan sebaik - baiknya;
4. Setiap perangkat daerah, baik yang berbentuk badan, dinas, sekretariat, dan perangkat daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Daya;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Sumba Barat Daya harus dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Sumba Barat Daya harus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029, setiap perangkat daerah perlu mengupayakan pengaturan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, instansi terkait maupun masyarakat luas;

11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing – masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing – masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bapperida Kabupaten Sumba Barat Daya menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA, PPAS serta APBD setiap tahunnya.
13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Bupati Sumba Barat Daya



Ratu Ngadu Bonnu Wulla

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Bapperida	
Sekretaris Badan Bapperida	
Kepala Bidang PPE	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	



MEMBANGUN DESA **ENATA KOTA**

